



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

ISSN 3047-1745

Volume 2, 2025

2024

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

Laporan Kinerja
Sekretariat
Jenderal





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

ISSN 3047-1745

Volume 2, 2025

2024

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

Laporan Kinerja
Sekretariat
Jenderal





Daftar Isi

Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
Kata Pengantar	viii
Pernyataan Telah Direviu	xi

01

Pendahuluan 2

Latar Belakang	2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi	2
Sumber Daya Manusia	11
Potensi	11
Permasalahan Utama	12
Lingkungan Strategis	12
Sistematika Penyajian	13

02

Perencanaan Kinerja 16

Rencana Strategis Tahun 2020-2024	16
Rencana Kerja Tahun 2024	20
Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai feedback Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	22
Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26



03

Akuntabilitas Kinerja

27

Capaian Kinerja	27
Kinerja Anggaran	97
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	103
Evaluasi Internal Atas Capaian Kinerja Tahun 2024	104
Tindak Lanjut Atas Evaluasi SAKIP Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024	107
Penghargaan dan Kinerja Lainnya	110

04

Penutup

132

Kesimpulan	132
Lampiran	136



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin	11
Tabel 2	Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	20
Tabel 3.	Penetapan Target Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	22
Tabel 4.	Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 Berdasarkan DIPA Awal	25
Tabel 5.	Penyesuaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	27
Tabel 6.	Capaian IKU Sekretariat Jenderal Tahun 2024	27
Tabel 7.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2024	28
Tabel 8.	Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	30
Tabel 9.	Rincian Hasil Evaluasi RB KKP Tahun 2023	31
Tabel 10.	Perbandingan Hasil Evaluasi RB KKP Tahun 2023 dengan KL Lain/Provinsi/Kab/Kota	32
Tabel 11.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	34
Tabel 12.	Capaian Indikator Pembentuk Indeks RB KKP Tahun 2024 (Berdasarkan Perhitungan Mandiri)	26
Tabel 13.	Kategori Capaian IP ASN.....	27
Tabel 14	Penilaian Komponen Kualifikasi (Bobot 25)	28
Tabel 15	Penilaian Komponen Kompetensi (Bobot 40).....	29
Tabel 16	Nilai Predikat Kinerja PNS.....	30
Tabel 17	Nilai Hukuman Disiplin	30
Tabel 18.	Realisasi IP ASN KKP Tahun 2024 Berdasarkan Unit Organisasi Eselon I... ..	31
Tabel 19.	Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2024 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran	32
Tabel 20.	Nilai IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2023 (Berdasarkan Hasil Pengukuran dari BKN)	32
Tabel 21.	Hasil Pengukuran IP ASN Nasional Tahun 2022	33
Tabel 22.	Variabel pada Dimensi Input dan Proses (Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP Tahun 2024.....	36
Tabel 23.	Hasil Pengukuran Indikator Pembentuk PKP KKP Tahun 2024 Tahun 2024	37
Tabel 24.	Hasil Pengukuran IPKP KKP Tahun 2024 Tahun 2024.....	38
Tabel 25.	Perbandingan Hasil Pengukuran Dimensi Input KKP dengan	38
Tabel 26.	Perbandingan Hasil Pengukuran Dimensi Proses KKP dengan Kementerian/Lembaga Lainnya Tahun 2024	39
Tabel 27.	Variabel Perhitungan NKPA Tahun 2024.....	45
Tabel 28.	Perhitungan NKPA KKP Tahun 2024.....	48
Tabel 29.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 - 2023	49
Tabel 30.	Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024.....	51
Tabel 31.	Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024.....	52
Tabel 32.	Top 15 Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024.....	53



Tabel 33. Capaian Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP	59
Tabel 34. Rincian capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (Persen)	65
Tabel 35. Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dengan Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP	65
Tabel 36. Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Organisasi Eselon II	66
Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja" Tahun 2024 Lingkup KKP	70
Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja" Tahun 2024 Lingkup Sekretariat Jenderal.....	71
Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja" Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024	72
Tabel 40. Rincian Komponen Pengungkit pada Lembar Kerja Evaluasi penilaian WBK	76
Tabel 41. Rincian Komponen Hasil pada Lembar Kerja Evaluasi penilaian WBK.....	76
Tabel 42. Persyaratan Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	77
Tabel 43. Realisasi Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Setjen	78
Tabel 44. Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024.....	78
Tabel 45. Rekapitulasi Hasil Pleno Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK Lingkup KKP Tahun 2024.....	80
Tabel 46. Rincian capaian dan target IKU-10.....	85
Tabel 47. Realisasi PNBP BLU Layanan Tahun 2024	86
Tabel 48. Realisasi PNBP BLU Layanan Tahun 2024.....	86
Tabel 49. Perbandingan Realisasi PNBP BLU LPMUKP dengan PNBP KKP Tahun 2024	88
Tabel 50. Rincian Realisasi Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Tahun 2024.....	92
Tabel 51. Rincian capaian dan target IK-11	94
Tabel 52. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2019-2024	94
Tabel 53. Pagu dan Anggaran Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024	98



Tabel 54. Anggaran dan Realisasi KKP Berdasarkan Unit Organisasi Eselon I Tahun 2024	99
Tabel 55. Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2024	100
Tabel 56. Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2024.....	100
Tabel 57. Pergerakan Pagu Anggaran Per Bulan Sekretariat Jenderal Tahun 2024	101
Tabel 58. Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024.....	104
Tabel 59. Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025	105
Tabel 60. Hasil Penilaian AKIP Pada Sekretariat Jenderal Tahun 2024.....	108
Tabel 61. Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB116	
Tabel 62. Perbandingan Nilai hasil Indeks BerAKHLAK dengan Kementerian/Lembaga Terkait.....	126
Tabel 63. Daftar Instansi Pusat Menurut Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024	128
Tabel 64. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Tahun 2024	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi KKP.....	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	4
Gambar 3.	Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Jenderal berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014	14
Gambar 4.	Dialog Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2024.....	26
Gambar 5.	Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2023.....	31
Gambar 6.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP di Tingkat Nasional Tahun 2023.....	32
Gambar 7.	Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2017-2024.....	35
Gambar 8.	Surat BKN hal Hasil Pengukuran IP ASN KKP Tahun 2023.....	33
Gambar 9.	Tampilan media e-milea.....	34
Gambar 10.	Tampilan Majalah Segara.....	41
Gambar 11.	Tampilan Majalah Mila.....	42
Gambar 12.	Tampilan Podcast Segara (Samudera Informasi Kelautan dan Perikanan).....	42
Gambar 13.	Tampilan Video Dokumenter.....	43
Gambar 14.	Capture Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	47
Gambar 15.	Inovasi BULIK MANIS (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa).....	55
Gambar 16.	Inovasi Kado Spesial yang Diinisiasi oleh Loka Kawasan Konservasi Perairan (LKKPN) Pekanbaru	55
Gambar 17.	Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP dan Unit Organisasi Eselon I Tahun 2024.....	60
Gambar 18.	Contoh <i>Sharing</i> Informasi Manajemen Pengetahuan dalam <i>Portal Collaboration</i>	62
Gambar 19.	<i>Entry Meeting</i> BPK RI dan Penyusunan Laporan Keuangan.....	68
Gambar 20.	Komponen dan Indikator Pengungkit dan Hasil pada WBK	75
Gambar 21.	Peringatan Hakordia Tahun 2024 dan Penyampaian Penghargaan kepada Unit Kerja Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024 pada 12 Desember 2024.....	81
Gambar 22.	Penyaluran Dana Bergulir LPDB KUMKM.....	95
Gambar 23.	LPMUKP Hadirkan Pembiayaan Kapal untuk Koperasi Biak Jaya Lestari Membangun Kesejahteraan Nelayan Biak.....	95
Gambar 24.	Peresmian <i>soft launching</i> pabrik es balok milik Koperasi Mattoangin Samudera Niaga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang mendapatkan dana bergulir dari LPMUKP	96
Gambar 25.	Porsi Anggaran Efektif Sekretariat Jenderal Per Jenis Belanja	98
Gambar 26.	Grafik Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2024.....	101
Gambar 27.	Tampilan Aplikasi Kinerjaku	106



Gambar 28. Penghargaan atas Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tertinggi Unit Organisasi Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal	107
Gambar 29. Nilai Sistem Merit Tertinggi di Tingkat KL	111
Gambar 30. KKP kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian	111
atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang diserahkan pada 19 Juli 2024.....	111
Gambar 31. Bhumandala Award Tahun 2024.....	113
Gambar 32. Penyerahan Anugerah Reksa Bandha 2024.....	113
Gambar 33. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Tahun 2024	114
Gambar 34. Penghargaan Terbaik II Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024	115
Gambar 35. Peringkat Terbaik IV untuk Jaringan dan Dokumentasi.....	117
Informasi Hukum (JDIH) KKP dengan kategori Eka Acalapati	117
Gambar 36. Peringkat Terbaik IX dengan Kategori AA Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023.....	117
Gambar 37. Selamatkan Arsip Kemaritiman, KKP Terima Tiga Penghargaan dari ANRI.....	118
Gambar 38. Hasil Penilaian Indeks SPBE KKP Tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB.....	120
Gambar 39. Sertifikasi Akreditasi Klinik Pratama KKP	121
Gambar 40. Capaian ITKP Nasional Tahun 2024.....	123
Gambar 41. Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi ASN dengan Predikat B	125
Gambar 42. Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK KKP Tahun 2024	127

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dapat diselesaikan. Ucapan selamat dan syukur tak lupa kami sampaikan atas kinerja yang telah diraih Sekretariat Jenderal sepanjang Tahun 2024. Tahun 2024, Sekretariat Jenderal telah mampu mencetak rekor kinerja terbaiknya, melalui peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu sebesar 102,36 di Tahun 2023 menjadi 119,97 di Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang Tahun 2020-2024. Pencapaian atas kinerja organisasi tersebut merupakan hasil kerja keras, dedikasi serta komitmen yang luar biasa dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal.

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap individu yang telah menjadi bagian dari keberhasilan ini. Prestasi ini mencerminkan kualitas super tim di lingkup Sekretariat Jenderal dan kolaboratif yang harmonis lintas Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semangat kolaborasi ini akan terus dilanjutkan di Tahun 2025 guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan individu, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.



**Rudy Heriyanto Adi
Nugroho**

Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Sekretariat Jenderal akan terus berupaya menjadi garda terdepan untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjadi *support system* yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan antara lain melalui pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan pola kerja baru, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, penerapan teknologi dan informasi yang andal, efisiensi anggaran, mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan berfokus pada sinergi dan kolaborasi lintas Unit Organisasi Eselon I dan lintas sektor, memperkuat infrastruktur digital untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif serta mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi antar-instansi. Hal tersebut mutlak diperlukan dalam mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru serta mendorong percepatan tujuan Pembangunan kelautan dan perikanan.

Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal pada tahun berikutnya.


Rudy Heriyanto Adi Nugroho

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi selama Tahun 2024 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan di Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Sebagai perwujudan visi Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 yaitu "Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang terdiri dari 2 Sasaran Program dan 11 Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setjen Triwulan I, II dan III yaitu 105,86; 90,47; 106,16; dan 119,97 di Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2024, seluruh indikator kinerja di Tahun 2024 telah sesuai dengan target kinerja atau bahkan melampaui target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi KKP target 80 realisasi 91,26 atau mencapai 114,08 %.
2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup KKP target 85 realisasi 88,84 atau mencapai 104,52%.
3. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP target 95 realisasi 97,14 atau mencapai 102,25%.
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP target 82 realisasi 87,18 atau mencapai 106,32%.
5. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP target 76 realisasi 80,78 atau mencapai 106,29%.
6. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP target 94 realisasi 131,6 atau mencapai 120% dalam aplikasi kinerjaku (normalisasi capaian pada aplikasi kinerjaku maksimal 120%).
7. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal target <0,5 realisasi 0,09 atau mencapai 120% dalam aplikasi kinerjaku (normalisasi capaian pada aplikasi kinerjaku maksimal 120%).
8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal target 95 realisasi 100% atau mencapai 105,26%.
9. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal target 5 (kumulatif) realisasi 5 unit kerja atau mencapai 100%.

10. Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan BLU LPMUKP target 97% realisasi 107,73% atau mencapai 111,06%.
11. Persentase Penyaluran Dana bergulir BLU LPMUKP target 90% realisasi 108,47% atau mencapai 120% dalam aplikasi kinerjajaku (normalisasi capaian pada aplikasi kinerjajaku maksimal 120%).

Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 sebesar Rp902.569.227.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp57.931.082.000 sehingga pagu anggaran efektif sebesar Rp822.863.865.685. Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp822.863.865.685 atau mencapai 97,42%. Berdasarkan jenis belanja porsi anggaran efektif belanja barang mencapai 62,25%, belanja modal sebesar 27,25% dan belanja pegawai mencapai 10,49%.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, persentase realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,23 poin yaitu 96,20% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja salah satunya terkait kinerja anggaran, dengan tetap mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien dan efektif.

Alokasi anggaran Sekretariat Jenderal terdiri dari 2 (dua) Satker Pusat yaitu Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), 1 (satu) satker Kantor Daerah yaitu Badan Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta 34 Provinsi satker Tugas Pembantuan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 37 satuan kerja lingkup Sekretariat Jenderal realisasi tertinggi berada pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jambi masing-masing 100% dan realisasi terendah yaitu BLU LPMUKP sebesar 78,04%.

Prestasi KKP atas peran serta Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 antara lain Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan KKP, Predikat Memuaskan "A" atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Sistem Merit, Bhumandala Award, Anugrah Reksa Bhandha, Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indeks Kualitas Kebijakan dan prestasi lainnya.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal KKP untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal KKP. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 18 Februari 2025

Plh. Inspektur Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wahjudi Poerwanto
NIP. 196701161997031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



CAPAIAN KINERJA SETJEN 2024

Secara umum **capaian kinerja** Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024 telah **mencapai lebih dari 100%**, yakni sebesar **119,97** dengan rincian sebagai berikut:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Jenderal



Indeks Reformasi Birokrasi KKP



Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP



Indeks Profesionalitas ASN lingkup KKP



Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal



Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP



Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP



Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP



Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal



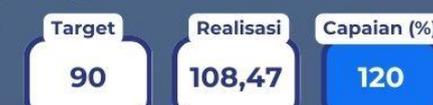
PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat



Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan BLU LPMUKP



Persentase Penyaluran Dana bergulir BLU LPMUKP



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

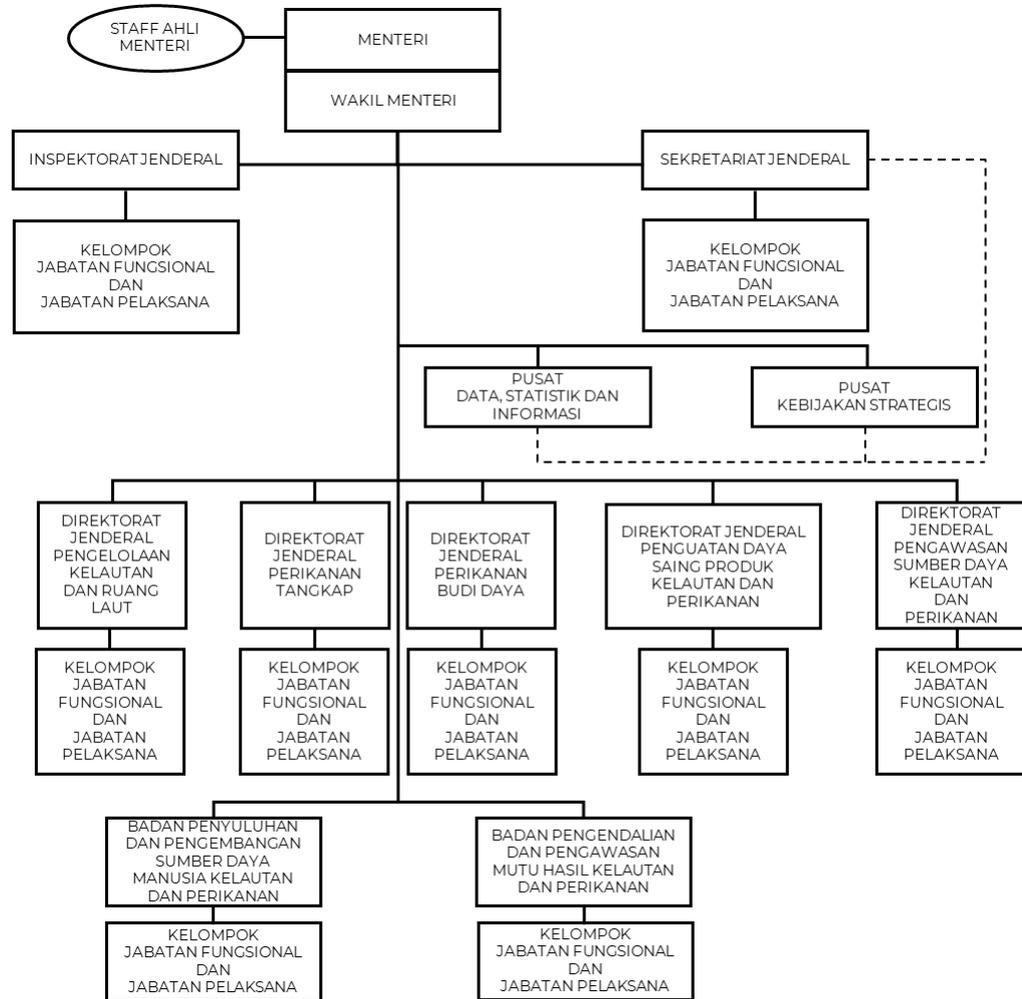
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal mengacu pada 1). Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 3). Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP Instansi Pemerintah dan 4). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di KKP. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal menjelaskan tentang capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap capaian kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal menjelaskan kinerja yang telah diperjanjikan Sekretaris Jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan memberikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

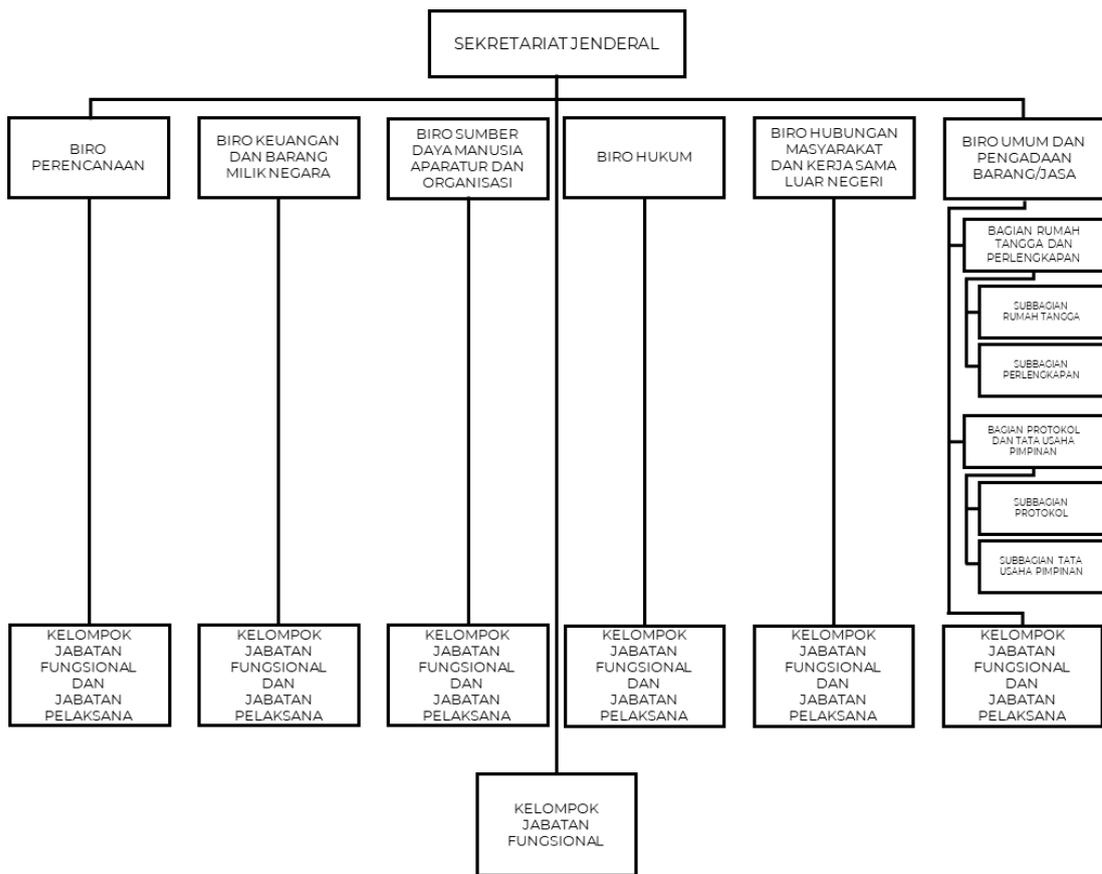
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah mencabut Peraturan Menteri KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi KKP



Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;
4. Biro Hukum;
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
6. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

- 1. Biro Perencanaan**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan lintas sektor, program dan anggaran, serta pengelolaan pendanaan luar negeri, kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga dibidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan kebijakan strategis dan lintas sektor;
2. koordinasi penyusunan dan sinkronisasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. koordinasi pengelolaan revisi rencana kerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau daftar isian pelaksanaan anggaran;
4. koordinasi, analisis, formulasi, dan perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri serta dana transfer;
5. koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi;
6. koordinasi penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah;
7. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Perencanaan; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi Biro Perencanaan.

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- 2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan pengendalian kepatuhan perbendaharaan;
2. koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
4. koordinasi dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah, dan pelaporan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi bidang keuangan;
5. koordinasi penyusunan standar biaya keluaran, penelaahan rencana kerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pelaksanaan anggaran;
6. koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pembinaan badan layanan umum;
7. koordinasi tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta penyelesaian kerugian negara;
8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara;
9. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, manajemen talenta, pemantauan dan evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur;
2. koordinasi alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai aparatur sipil negara;
3. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara;

4. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
5. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara;
6. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, informasi, dan arsip kepegawaian;
7. koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
8. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
9. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

4. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, rancangan perjanjian nasional, dan instrumen hukum internasional, serta advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, konsultasi publik, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
2. pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
3. koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan
4. pembahasan rancangan perjanjian nasional;
5. koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan pembahasan instrumen hukum internasional;
6. koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum, penyelesaian perkara
7. hukum, dan diseminasi hukum;
8. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
9. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hukum; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hukum.

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

5. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;
2. koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
3. koordinasi pelaksanaan layanan informasi publik dan perpustakaan;
4. koordinasi penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
5. koordinasi pelaksanaan layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
6. pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

6. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha pimpinan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa. Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan;
2. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
3. pelaksanaan urusan persandian;
4. koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
5. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor pusat, dan keamanan kantor pusat, serta pengelolaan angkutan pegawai;
6. pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran
7. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
8. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
9. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;

10. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa;
11. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
12. pelaksanaan urusan administrasi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.

Susunan organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:

1. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
2. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
3. kelompok jabatan fungsional; dan
4. jabatan pelaksana.

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor pusat, urusan angkutan pegawai, keamanan kantor pusat, serta koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran.

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan dan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Selain 6 Biro, struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdapat Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin).

7. Pusat Data, Statistik, dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Data, Statistik, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data, Statistik, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
3. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;

4. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
5. pengelolaan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
7. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
8. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Data, Statistik, dan Informasi; dan
9. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Susunan organisasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pada tahun 2022, Sekretariat Jenderal terdapat penambahan Unit Kerja yaitu Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang secara administrasi berada dibawah Pusat Data, Statistik dan Informasi berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 3/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Selain itu di Sekretariat Jenderal terdapat Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan Satuan Kerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016, ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2022, BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BLU LPUMKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran, Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan BLU LPMUKP, Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan, Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan, Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan

manajemen risiko, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan dan Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

1.3 Sumber Daya Manusia

Sekretariat Jenderal memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 506 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS lingkup Sekretariat Jenderal berdasarkan unit kerja sebagaimana pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat Jenderal	4	-	4
2.	Biro Perencanaan	32	18	50
3.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	36	30	66
4.	Biro Hukum	22	13	35
5.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	22	21	43
6.	Biro Keuangan dan BMN	31	22	53
7.	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	109	49	158
8.	Pusat Data Statistik dan Informasi	47	35	82
9.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9	6	15
	Jumlah	312	194	506

Sumber: epegawaikp.go.id (20 Januari 2025)

1.4 Potensi

Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal, untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal antara lain:



1.5 Permasalahan utama (*strategic issued*)

Untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat Jenderal masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Masih diperlukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang disesuaikan dengan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi yang bersifat dinamis.
2. Pelaksanaan pemerintahan berbasis digital masih perlu penguatan sarana dan prasarana SDM untuk mencapai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, Indeks SPBE KKP Tahun 2024 sebesar 3,99 dengan predikat Sangat Baik mengalami peningkatan sebesar 11,45% dibandingkan Tahun 2023 dengan nilai 3,58.
3. Ketersediaan sumber daya manusia, wilayah kerja yang luas, dan penyediaan sistem aplikasi yang handal dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik kelautan dan perikanan.
4. Belum seluruh pegawai mendapatkan luasan ruang kerja yang ideal karena keterbatasan pemilikan gedung perkantoran.

1.6 Lingkungan Strategis

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KKP tahun 2020-2024, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka Sekretariat Jenderal dan jajarannya akan menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP.

1.7 Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Sekretariat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Renja KKP Tahun 2024 serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai Rencana Strategis, dukungan pada Prioritas Nasional, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024. Selain itu, juga diuraikan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan informasi terkait pencapaian dan analisis indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024, serta upaya peningkatan kinerja. Selain itu juga diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang meliputi efisiensi anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kinerja Lainnya

Pada subbab ini menguraikan prestasi KKP yang didukung oleh kinerja Sekretariat Jenderal dalam upaya peningkatan layanan publik.

Bab III. Penutup

Bab ini menyajikan informasi dan simpulan umum terkait dengan kinerja Tahun 2024.

Lampiran

**BAB I
Pendahuluan**

Penjelasan umum organisasi



01

02



**BAB II
Perencanaan Kinerja**

Ringkasan perjanjian

**BAB IV
Penutup**

- Kesimpulan umum
- Langkah peningkatan kinerja



04



03

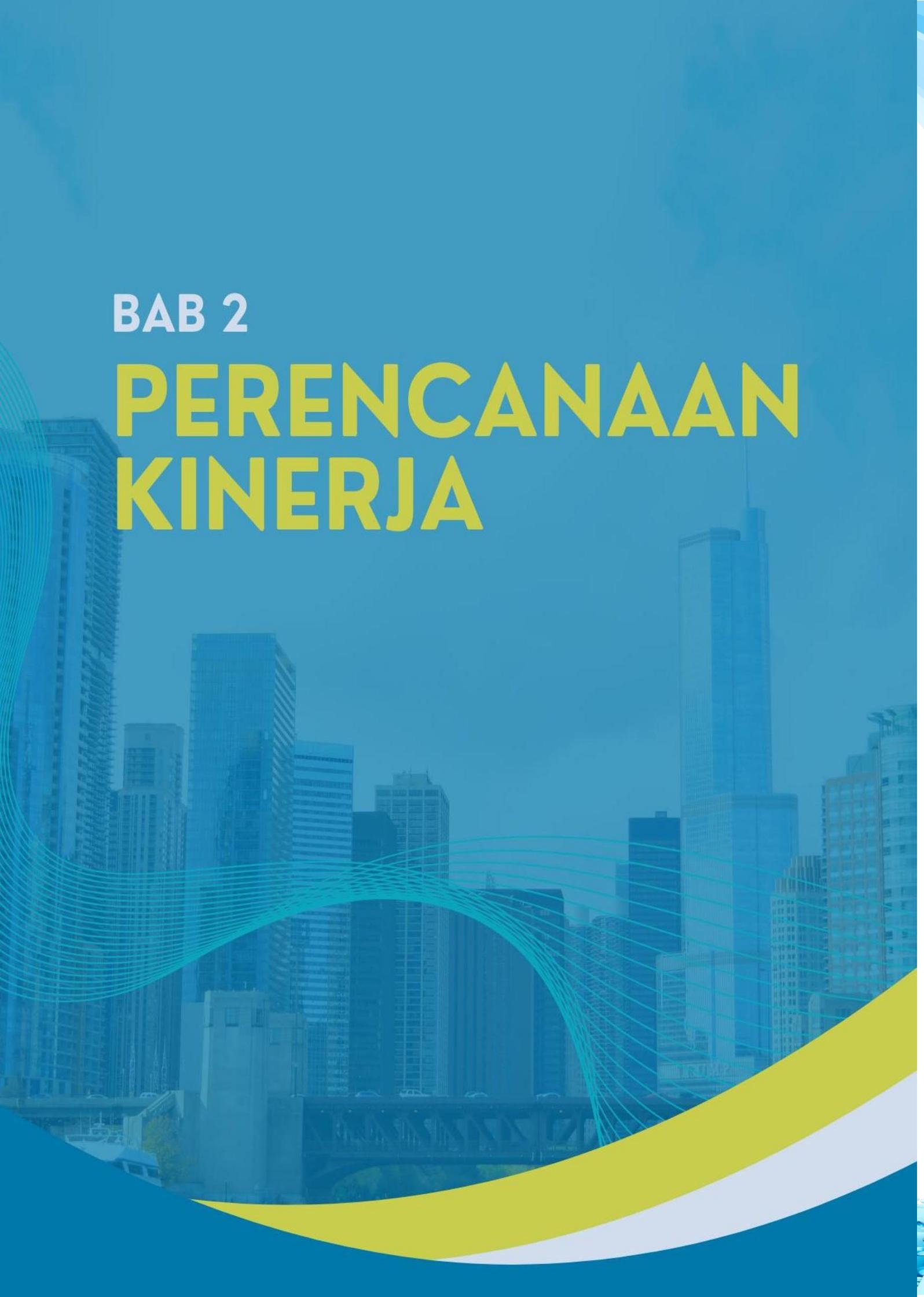
**BAB III
Akuntabilitas Kinerja**

- Capaian kinerja
- Realisasi anggaran

Gambar 3. Sistematisasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Jenderal berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan yakni "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada tahun 2020-2024 Sekretariat Jenderal menetapkan visi, yaitu "Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP". Sekretariat Jenderal sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan reformasi birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP.

Misi Sekretariat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, maka misi yang ditetapkan adalah:

1. peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen; dan
2. penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

Tujuan Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Jenderal KKP disusun tujuan beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator indeks sistem merit, indeks pengelolaan keuangan, indeks pengelolaan aset, indeks perencanaan, indeks kearsipan, nilai SPBE KKP, persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP, rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan; dan
2. meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan KKP, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi KKP.

Sasaran Program

Sasaran Program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Jenderal sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2023, sasaran program yang ditetapkan adalah "Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup KKP dan Sekretariat Jenderal", dengan indikator kinerja:

1. nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai);
2. nilai SAKIP KKP (nilai);
3. nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai);
4. nilai SPBE KKP (nilai);
5. opini BPK atas LK KKP (opini);
6. batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal (%);
7. level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Jenderal (level);
8. indeks kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KKP (indeks);
9. nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (nilai);
10. indeks sistem merit KKP (indeks);
11. IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal (indeks);
12. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit);
13. persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP (%);
14. rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (%);
15. unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit);
16. unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%);
17. rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal (%);
18. indeks pengelolaan asset KKP (indeks);
19. indeks pengelolaan keuangan KKP (indeks);
20. indeks perencanaan KKP (indeks);
21. indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal (nilai);
22. nilai kinerja anggaran lingkup Sekretariat Jenderal (nilai);
23. persentase pencapaian target PNBPN BLU LPMUKP (%); dan
24. persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (%).

Sementara itu, sasaran program Sekretariat Jenderal untuk Tahun 2024, yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan indikator kinerja yaitu : indeks RB KKP (indeks), indeks profesionalitas ASN lingkup KKP (indeks), indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (indeks), nilai kinerja perencanaan anggaran KKP (Nilai), nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (Nilai), persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup KKP (%), batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal(%), persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%); dan unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup Sekretariat Jenderal (Unit).
2. PNPB BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan indikator kinerja yaitu persentase pencapaian target PNPB layanan BLU LPMUKP (%) dan persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP.

Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Berdasarkan peran Sekretariat Jenderal yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi KKP Tahun 2020-2024 terutama yang terkait dengan Sekretariat Jenderal, yaitu

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP, maka arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan layanan dukungan manajemen internal KKP melalui:
 - a. mewujudkan manajemen perubahan dalam budaya organisasi;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik;
 - c. memfasilitasi dan koordinasi penyusunan dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran;
 - e. meningkatkan penataan tata laksana pelaksanaan tugas berbasis elektronik melalui penerapan SPBE;
 - f. mewujudkan ASN KKP yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan merit sistem;
 - g. meningkatkan pelayanan umum internal KKP; dan
 - h. meningkatkan layanan barang dan jasa KKP.
2. meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi melalui:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja;

- b. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan barang milik negara (BMN);
 - c. menyediakan data statistik dan sistem informasi yang handal;
 - d. membangun manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses;
 - e. meningkatkan kerja sama internasional;
 - f. meningkatkan kerja sama antarlembaga dan lintas sektor;
 - g. penguatan perencanaan dan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan dengan target program kegiatan KKP telah responsif gender; dan
 - h. meningkatkan strategi transformasi digital KKP, yang terdiri atas pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar, serta dapat dibagipakaikan, memanfaatkan analisis dari big data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia teknologi, informasi, dan komunikasi, dan meningkatkan literasi digital masyarakat kelautan dan perikanan.
3. fasilitasi percepatan penyaluran dana kelolaan BLU LPMUKP melalui: pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan; dan meningkatkan kualitas layanan penyaluran dana bergulir melalui modernisasi BLU.

Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi KKP dan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KKP. Penyusunan peraturan perundang-undangan di KKP dilaksanakan berdasarkan program penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat k/l yang terdiri atas struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Kerangka kelembagaan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
- b. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses

pembangunan kelautan dan perikanan; dan tata laksana dan SDM aparatur

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Program kerja yang dilaksanakan yaitu "Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan" dengan tujuan peningkatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KP Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2024, Sekretariat Jenderal melaksanakan 6 Kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu 2322. Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama, 2323. Pengelolaan Organisasi dan SDM, 2325. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN, 2325. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN, 2328. Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum, 2329. Pengelolaan Data dan Informasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
01 - SEKRETARIAT JENDERAL				
WA - Program Dukungan Manajemen				
2322 - Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama				
AEC - Kerja sama	002 - Kesepakatan kerja sama antar lembaga	1	dokumen	4.003.481
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan hukum	5	layanan	8.335.000
	969 - Layanan bantuan hukum	1	layanan	2.165.000
PEC - Kerja sama	001 - Kerjasama internasional bidang kelautan dan perikanan	2	dokumen	7.500.000
2323 - Pengelolaan Organisasi dan SDM				
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	3	layanan	1.600.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan manajemen SDM	12	layanan	13.790.932

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
2325 - Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN				
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	layanan	1.860.000
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan perencanaan dan penganggaran	37	dokumen	32.801.110
	953 - Layanan pemantauan dan evaluasi	2	dokumen	8.245.967
	955 - Layanan manajemen keuangan	7	dokumen	7.979.930
2328 - Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum				
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Alat pengolah data dan komunikasi lingkup Sekretariat Jenderal	168	unit	6.159.084
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan hubungan masyarakat dan informasi	3	layanan	18.305.000
	959 - Layanan protokoler	2	layanan	30.123.778
	962 - Layanan umum	16	layanan	56.550.650
	994 - Layanan perkantoran	2	layanan	306.989.433
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	15	unit	23.662.714
	971 - Layanan prasarana internal	2	unit	12.963.946
2329 - Pengelolaan Data dan Informasi				
BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Layanan data statistik kelautan dan perikanan	4	layanan	3.650.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	layanan	3.292.495

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	001 - Aplikasi sistem informasi kelautan dan perikanan	5	layanan	16.181.925
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Sistem informasi sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi yang operasional	2	unit	39.900.000
	002 - Sarana data citra satelit radar	101	unit	11.546.300
	003 - <i>Satellite Constelation Mission for Marine and Fisheries Resources</i>	5	unit	100.000
RCL - OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - OM sarana data citra satelit radar	1	unit	216.160
6453 - Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan				
BDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - UMKM yang dilayani permodalan BLU	4723	umkm	9.893.945
BIF - Pengawasan dan Pengendalian Layanan	001 - Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1	layanan	1.383.120
BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Layanan teknologi informasi LPMUKP	1	layanan	764.000
CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Layanan pengadaan perangkat TIK	5	unit	100.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan umum	1	layanan	3.162.305
	994 - Layanan perkantoran	1	layanan	24.779.369
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan sarana internal	5	unit	30.000
FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Laporan pengelolaan keuangan	2	laporan	883.680
	002 - Laporan pengawasan	1	laporan	575.340

Eselon I/Program/Kegiatan/KRO/RO		Volume	Satuan	Anggaran (Rp000)
	internal pengelolaan modal modal usaha			
	003 - Laporan monitoring dan evaluasi program pengelolaan dana bergulir	1	laporan	167.335
	002 - Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	500	lembaga	1.678.000

Sumber: Keputusan Menteri KP Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2024

2.3. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai *feedback* Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Penentuan target indikator kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Penetapan Target Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No.	IKU	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Penjelasan
1.	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	78	78,43	80	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2023 dan sesuai dengan roadmap RB KKP 2023-2024
2.	Indeks Profesionalitas ASN KKP	81,22	84,75	85	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor B.88/SJ.3/TU.140/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN 2023 dan Target

No.	IKU	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Penjelasan
					2024
3.	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP	87,3	87,3	95	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023
4.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP	86	90,84	86	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024, dimana untuk NKA akan diterbitkan PMK tentang Perhitungan NKA TA 2024
5.	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP	75	82,93	76	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024
6.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP	92	112,59	94	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024
7.	Batas Tertinggi Nilai	≤0,5	0,01	≤0,5	Target disusun berdasarkan hasil

No.	IKU	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Penjelasan
	Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2023				evaluasi tahun 2023, dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024
8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal	75	99,12	95	Target disusun berdasarkan hasil Evaluasi Capaian dan hasil Validasi Indikator Kinerja Setjen Tahun 2024 bersama Inspektorat I
9.	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen	2	2	5	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan untuk tahun 2023 untuk Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan WBK Lingkup Setjen dari hasil Penilaian Mandiri 3 unit Kerja yaitu : Biro Perencanaan 83,97, Biro Humas dan KLN 81,34 dan Biro SDMAO 83,97
10.	Persentase Pencapaian Target PNPB BLU LPMUKP	97	73,4	97	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023
11.	Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP	80	152,29	90	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023

Sumber. Aplikasi kinerjajaku (diolah)

Dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal Tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp 659.661.999.000 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP- DIPA) induk Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-032.01-0/2024 yang ditetapkan pada 30 November 2023.

Tabel 4. Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 Berdasarkan DIPA Awal

No	Satker	Anggaran (Rp)
1.	Biro Umum Dan Pengadaan Barang/Jasa	577.471.085.000
2.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	28.151.820.000
3.	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan	41.739.094.000
4.	34 Satker Provinsi Tugas Pembantuan Lingkup Sekretariat Jenderal	12.300.000.000
	Jumlah	659.661.999.000

Sumber: DIPA Setjen Tahun 2024

Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp617.822.905.000, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp100.000.000, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp41.739.094.000 dan PNBPN sebesar Rp43.011.358.000. Berdasarkan jenis belanja alokasi tersebut terbagi menjadi 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp91.672.785.000, belanja barang sebesar Rp474.318.802.000 dan belanja modal sebesar Rp93.670.412.000.



Gambar 4. Dialog Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2024

2.4. Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Proses penyesuaian Perjanjian Kinerja merupakan proses keberlanjutan dari reviu atas Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani digunakan sebagai komitmen organisasi yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Sasaran Program dan indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja dilakukan penajaman dan dilakukan perbaikan substansi dan peningkatan target (apabila diperlukan), termasuk penyesuaian pada level Unit Kerja Eselon II dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang dinamis. Perubahan tersebut memerlukan adaptasi dan agilitas organisasi. Beberapa proses dan pembahasan Penyesuaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Sebagai Berikut :

1. Pengesahan DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2024 pada 30 November 2023.
2. Pengesahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 pada 18 Desember 2023.
3. Dialog Kinerja Organisasi Tahun 2024 Lingkup Sekretariat Jenderal pada 11 Januari 2024.
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 tanggal 5 April 2024.
5. Pengesahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 pada 7 Oktober 2024.
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut dengan rincian sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Penyesuaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

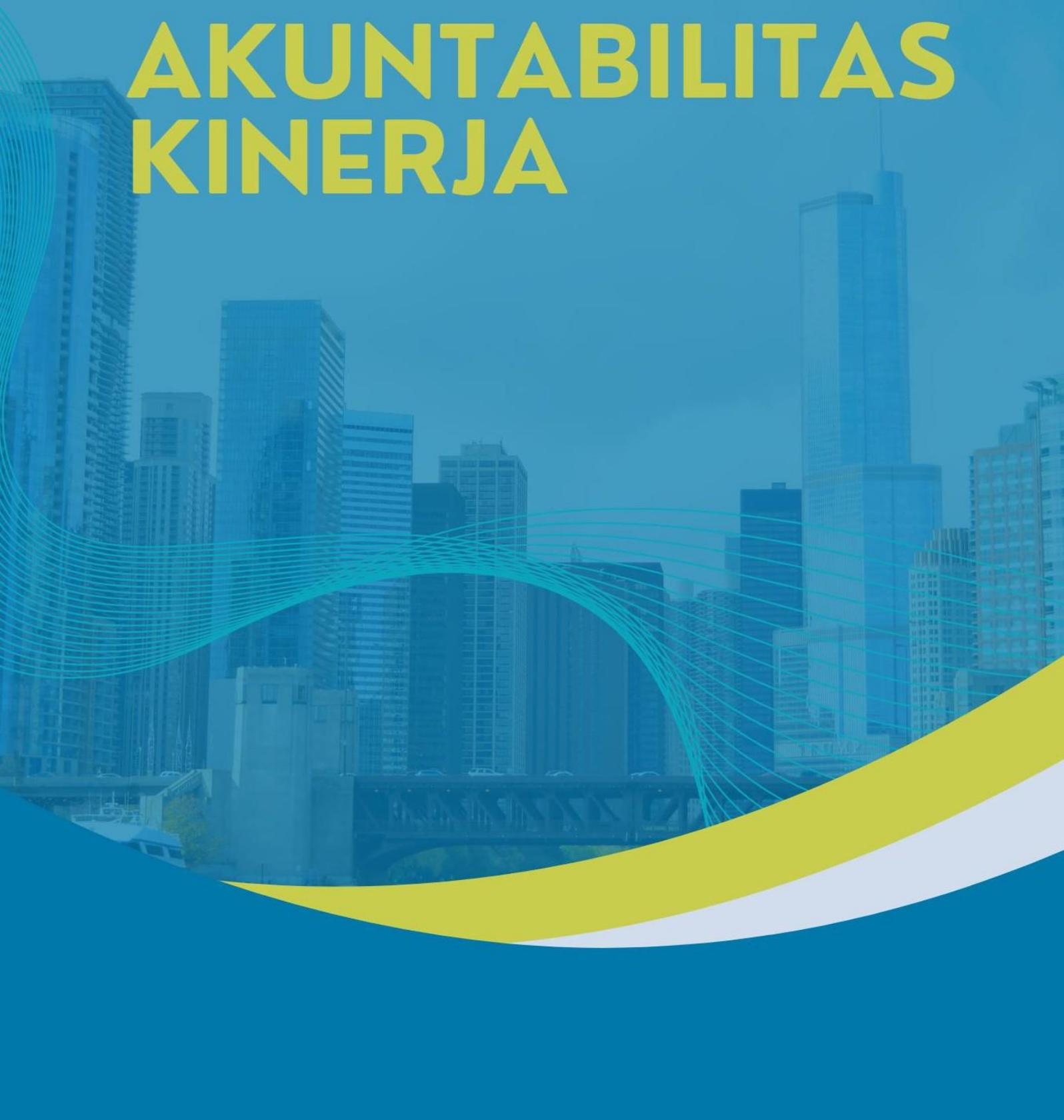
No	Perjanjian Kinerja Pengesahan 18 Desember 2023		No	Perjanjian Kinerja Pengesahan 7 Oktober 2024		Penjelasan
	Indikator Kinerja	Target 2024		Indikator Kinerja	Target 2024	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	80	1.	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	80	
2.	Indeks Profesionalitas ASN KKP	85	2.	Indeks Profesionalitas ASN KKP	85	
3.	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	87,5	3.	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	95	

No	Perjanjian Kinerja Pengesahan 18 Desember 2023		No	Perjanjian Kinerja Pengesahan 7 Oktober 2024		Penjelasan
	Indikator Kinerja	Target 2024		Indikator Kinerja	Target 2024	
	Publik (PIKP) KKP			Publik (PIKP) KKP		
4.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP	86	4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) KKP	82	Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dan target menjadi 82
5.	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP	76	5.	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP	76	
6.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP	94	6.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP	94	

No	Perjanjian Kinerja Pengesahan 18 Desember 2023		No	Perjanjian Kinerja Pengesahan 7 Oktober 2024		Penjelasan
	Indikator Kinerja	Target 2024		Indikator Kinerja	Target 2024	
7.	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2023	≤ 0,5	7.	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2023	≤0,5	
8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal	95	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal	95	
9.	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen	5	9.	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen	5	
10.	Persentase Pencapaian Target PNBPN BLU LPMUKP	97	10.	Persentase Pencapaian Target PNBPN BLU LPMUKP	97	
11.	Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP	90	11.	Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP	90	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Dalam memantau capaian kinerja organisasi, Sekretariat Jenderal melakukan pengukuran kinerja secara triwulanan melalui aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) sesuai karakteristik indikator kinerja yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja. Proses pengukuran dan perhitungan capaian kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun dan disepakati. Tampilan dashboard capaian Sekretariat Jenderal Tahun 2024 seperti pada gambar berikut:

Tabel 6. Capaian IKU Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Jenderal					108,31	
Indeks Reformasi Birokrasi KKP	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	91,26	114,08
Indeks Profesionalitas ASN lingkup KKP	indeks	Maximize	Akumulasi	85	88,84	104,52
Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	97,14	102,25
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	87,18	106,32
Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	80,78	106,29
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	131,6	120,00

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal	persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	≤0,5	0,09	120,00
Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	100	105,26
Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal	unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5	5	100,00
PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat					115,63	
Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan BLU LPMUKP	107,92		Nilai Posisi Akhir	97	107,73	111,06
Persentase Penyaluran Dana bergulir BLU LPMUKP	108,47		Nilai Posisi Akhir	90	108,47	120,00

NKO Sekretariat Jenderal mengalami fluktuatif, namun demikian tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple* karena adanya penyesuaian jumlah indikator kinerja, nomenklatur indikator kinerja, manual indikator, tata cara perhitungan serta adanya penyesuaian target akibat adanya perubahan kebijakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2024

Tahun	NKO	Jumlah Indikator Kinerja
2019	107,60	28
2020	97,70	24
2021	92,94	22

Tahun	NKO	Jumlah Indikator Kinerja
2022	83,51	21
2023	102,36	11
2024	119,97	11

Sumber: Kinerja.kkp.go.id dan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran Program 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Jenderal

IK 1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), (3) serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Nilai kinerja RB KKP merupakan ukuran perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di KKP yang dilaksanakan berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan PermenPANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang *Roadmap* RB, PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan KepmenKP 166 Tahun 2023 tentang *Roadmap* RB KKP 2020-2024. Komponen RB K/L dibagi menjadi 2 dimensi yaitu dimensi RB general dan RB tematik. Dimensi RB General (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. Komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas subkomponen kualitas rencana aksi dan subkomponen implementasi rencana aksi,
- b. Komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 indikator dan
- c. Capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 7 indikator

Sedangkan dimensi RB tematik (bobot 10) terdiri atas komponen capaian RB tematik (bobot 10), diukur dengan 5 indikator yaitu Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting. Pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan berdasarkan pada :

- a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- b. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi		
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

2. Analisa Capaian Kinerja

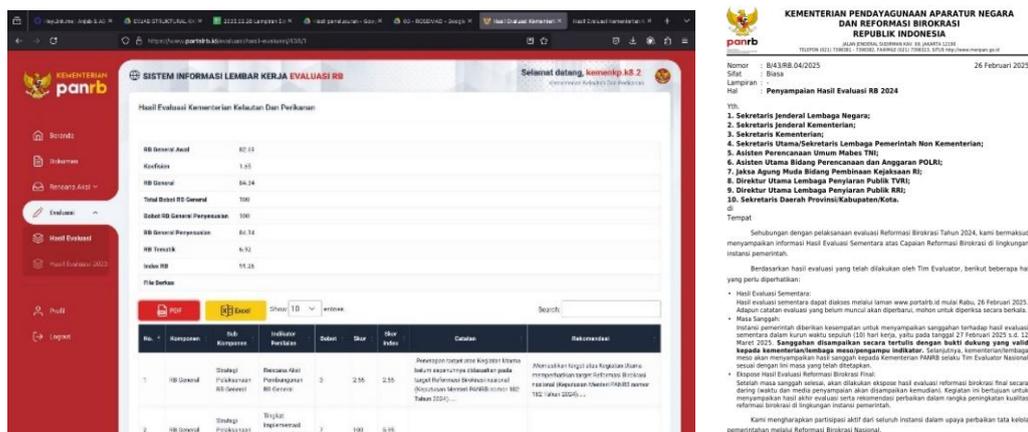
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara Kementerian PAN dan RB melalui laman <https://www.portalrb.id/> capaian indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2024 sebesar 91,26 sebagaimana surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/43/RB.04/2025 tanggal 26 Februari 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 9. Rincian Hasil Evaluasi RB KKP Tahun 2024

No	Penilaian	Nilai
1.	Reformasi Birokrasi General	82,69
2.	Koefisien	1,65
3.	Reformasi Birokrasi Tematik	6,92
	Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2024	91,26 (A)
	Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2023	85,40 (A-)

Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 telah disampaikan oleh Kementerian PANRB melalui <https://www.portalrb.id/> sebagaimana tampilan berikut:



Gambar 5. Surat Deputy Bidang Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Nomor B/43/RB.04/2025 tanggal 26 Februari 2025 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2024



LOKUS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023



Gambar 6. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP di Tingkat Nasional Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, didapatkan nilai rata-rata Indeks RB di Tingkat Kementerian /Lembaga dengan jumlah populasi sebanyak 82 KL ada;ah sebesar 76,81. Hal ini menunjukkan bahwa capainn indeks reformasi birokrasi Tahun 2024 berada diatas rata-rata KL. Sebaran nilai indeks Reformasi Birokrasi di Tingkat KL terdiri dari 26 KL dengan predikat A, 44 KL predikat BB dan 12 KL predikat B.

Tabel 10. Perbandingan Hasil Evaluasi RB KKP Tahun 2023 dengan KL Lain/Provinsi/Kab/Kota

Predikat	KL	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
AA	-	-	-	-
A	26	5	35	66
BB	44	13	100	157
B	12	12	135	159
CC	-	2	119	121
C	-	2	90	92
D	-	-	29	29
Total	82	34	508	624
Populasi	82	34	508	624
≥B	82	30	270	382
%	100%	88,24%	53,15%	61,22%

Sumber: Kementerian PAN dan RB

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32

Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/SJ Tahun 2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 pada tanggal 18 Maret 2024.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan RB, KKP telah melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB setiap triwulan dan melakukan penyesuaian rencana aksi RB KKP tahun 2024. Pada tanggal 14 Oktober 2024, telah disahkan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang telah disesuaikan, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Inspektur Jenderal Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor T.255/ITJ/HP.450/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi Capaian Rencana aksi Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target beberapa indeks kegiatan RB yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang *RoadMap* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024.
2. Target beberapa indeks kegiatan RB dalam roadmap RB KKP telah disesuaikan mengingat dalam portal RB, target tidak dapat diinput apabila target di bawah capaian Tahun 2023. Target yang disesuaikan meliputi target Tahun 2024 disesuaikan dengan hasil capaian tahun 2023 (minimal disamakan dengan nilai capaian pada Tahun 2023).
3. Penyempurnaan rencana aksi RB KKP mengacu kepada laporan evaluasi Inspektorat Jenderal dan arahan dari Kementerian PANRB antara lain :
 - a. Rencana aksi yang kurang tepat targetnya, yaitu yang seharusnya target dihitung pada akhir tahun, namun di uraikan per triwulan telah disesuaikan.
 - b. Rencana aksi yang masih belum mencantumkan jumlah anggaran yang dibutuhkan.
4. Rencana aksi yang satuan output bersifat administratif dan belum mengarah pada dampak kegiatan.

KKP telah melaksanakan pembahasan perubahan *roadmap* RB KKP pada tanggal 13, 14, dan 18 Maret 2024 dan telah tersusun rancangan perubahan *roadmap* RB KKP. Adapun penyesuaian yang dilakukan yaitu:

- a. Penambahan indikator kegiatan utama yang belum masuk pada kegiatan utama RB General dan RB Tematik yang menjadi poin penilaian sesuai

- dengan Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Capaian Prioritas Nasional dan Capaian Indikator Kinerja dan Pengendalian Inflasi.
- b. Penyesuaian kategori penilaian pada indikator Tingkat keberhasilan ZI dari semula berupa prosentase menjadi skala.

Tabel 11. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

SP.01. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal												
IKU-1. Indeks Reformasi Birokrasi KKP												
Realisasi 2018-2023							2024				Renstra Setjen 2020-2024 (KepSekjen 11/2024)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
78,95	78,6	79,38	78,27	77,79	78,43	85,4	80	91,26	114,08%	6,86	80	114,08%

Sumber: Hasil Evaluasi KemenPANRB

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80, realisasi tahun 2024 telah melampaui target atau tercapai sebesar 114,08%.

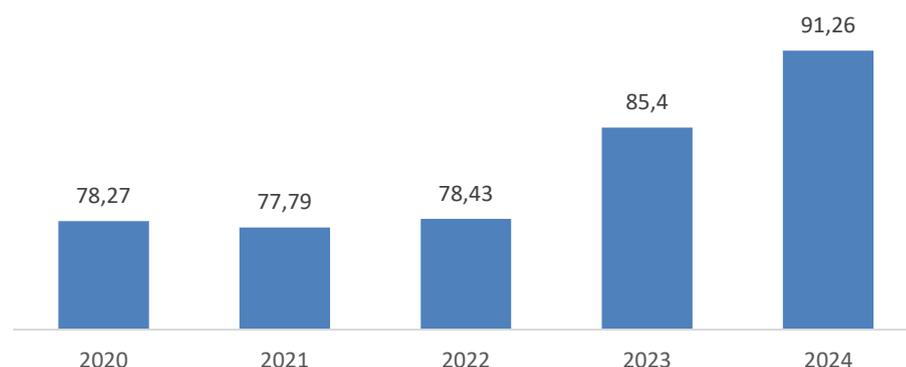
Pelaksanaan Evaluasi RB dilakukan melalui 2 jenis yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Internal dilaksanakan oleh Evaluator Internal yaitu APIP masing-masing K/L/D atau Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal reformasi birokrasi di instansinya. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator eksternal yang terdiri dari Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Evaluator Meso merupakan KL yang memiliki peran, tugas dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya. Evaluator Nasional merupakan Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/D. Pelaksanaan Evaluasi RB dilaksanakan secara terintegrasi melalui Portal RB Nasional mulai dari input rencana aksi oleh K/L/PD, input data hasil indikator RB oleh KL Meso, penilaian/evaluasi oleh evaluator nasional sampai pada penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Evaluator Internal dilakukan secara terpadu melalui Portal RB.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, secara umum temuan Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah dikecualikan dari perhitungan karena tidak menjadi lokus penilaian indikator meso.
2. Instansi pemerintah banyak yang mendapatkan nilai nol karena tidak memenuhi persyaratan penilaian indikator meso.
3. Instansi pemerintah tidak mengoptimalkan dalam memilih tema RB tematik.
4. Instansi Pemerintah tidak menetapkan seluruh kegiatan utama sampai tahun 2024.
5. Instansi Pemerintah tidak menyusun rencana aksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
6. Rencana aksi sekedar formalitas, kurang berkualitas dan secara logika kurang berdampak.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tindak lanjut hasil evaluasi RB yang diperlukan oleh setiap KL adalah sebagai berikut :

1. Setiap Instansi Pemerintah perlu memastikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan utama dan memenuhi persyaratan penilaian dari KL pengampu indikator.
2. Setiap Instansi Pemerintah perlu memastikan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi betul-betul mengungkit capaian indikator kegiatan utama.
3. Setiap instansi pemerintah perlu mengoptimalkan perannya dalam RB Tematik.



Gambar 7. Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024

3. **Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
KKP telah melakukan monitoring pelaksanaan RB General dan RB Tematik secara berkala. Rincian capaian Indeks RB Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Indikator Pembentuk Indeks RB KKP Tahun 2024 pada Portal RB Melalui tautan <https://www.portalrb.id> (diakses pada 28 Februari 2025)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,55	2,55
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,95
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3,68	2,95
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	1	1
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	84,01	3,36
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	94,12	1,88
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	88,69	1,77
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	92,01	1,84
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3	1,5
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	5	1,5

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	83,94	1,26
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1,5	100	1,5
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,73	0,82
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	85,1	1,7
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	393	3,83
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,8	1,44
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	90,15	1,35
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3,99	7,18
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	3	93,89	2,37
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Kementerian/Lemba ga	7	83,33	4,9
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3	5
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	83,03	3,32
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	78,71	3,15
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	80,31	8,03
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	91,78	7,34
28	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lemba ga)	2	1,06	1,06
29	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga)	2	1,71	1,71
30	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2	1,02	1,02

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
31	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Laju Inflasi (Kementerian/Lemba ga)	2	1,29	1,29
32	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	1,84	1,84
33	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	1,2

Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan upaya penyempurnaan kinerja dalam rangka meningkatkan Indeks RB KKP yaitu :

- a. Telah dilakukan berkoordinasi dengan unit organisasi yang menjadi koordinator indikator utama RB General dan RB Tematik untuk mengidentifikasi penyesuaian.
- b. Telah dilakukan penyusunan dan pengesahan rencana aksi RB General dan RB Tematik yang selaras dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Optimalisasi pelaksanaan rencana aksi yang belum terlaksana untuk dilanjutkan pada periode selanjutnya.
- d. Mendorong pelaksanaan pemenuhan rencana aksi.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di Lingkungan KKP pada Tahun 2024 yaitu terdapat beberapa rencana aksi yang belum dapat seratus persen tercapai di Tahun 2024 antara lain:

- a. Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Unit Organisasi Eselon I teknis dan Organisasi Non Struktural yang ditargetkan 8 usulan dari Eselon I, namun hanya tercapai 3 (tiga) usulan dari Eselon I atau 37,50%, hal ini disebabkan KKP dalam proses penataan kembali susunan organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain berupa penambahan unit Eselon I dan Jabatan Struktural pada tugas dan fungsi tertentu.
- b. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP, Keputusan Menteri tentang Proses Bisnis level 2 dan 3 di lingkungan KKP belum dapat disusun disebabkan terdapat perubahan organisasi mengacu Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usulan organisasi dan tata kerja KKP sedang dalam proses pembahasan di Kementerian PANRB.
- c. Sistem Merit, Penyusunan Pedoman Indikator Penilaian Kinerja Pegawai pada seluruh jabatan berupa Pedoman Indikator Penilaian Kinerja pada seluruh jabatan belum dapat dilaksanakan disebabkan pedoman uraian

tugas analisis jabatan berdasarkan leveling Standar Kompetensi Jabatan direncanakan akan disusun Tahun 2025. Penyusunan analisis permasalahan kinerja bagi seluruh pegawai berupa persentase hasil penilaian kinerja pegawai yang telah ditindaklanjuti dengan perencanaan pengembangan pegawai belum dilengkapi dokumen pendukungnya, Penyusunan *Individual Development Plan (IDP)* dan *Human Capital Development Plan (HCDP)* Tahun 2024-2028 berdasarkan *gap* kompetensi dan *gap* kinerja belum dapat terselesaikan seluruhnya yaitu dengan progres 80% dari seluruh jabatan disebabkan hasil *self assessment* belum seluruhnya selesai dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan promosi dan mutasi pegawai dalam rangka pelaksanaan manajemen karier sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar sistem merit akan dilaksanakan pada Tahun 2025 atas pelaksanaan mutasi melalui survey pelayanan mutasi.

4. Rencana Aksi (Upaya) Peningkatan Capaian Kedepan

Adapun rencana tindak lanjut dari kendala yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Rencana aksi yang belum dapat tercapai seratus persen pada Tahun 2024 menjadi prioritas utama untuk diselesaikan di Tahun 2025.
2. Merumuskan Roadmap Reformasi Birokrasi KKP apabila Grand Design RB dan RoadMap RB terbaru telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
3. Melakukan monitoring dan pemantauan rencana aksi RB KKP secara berkala.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP, kegiatan utama yang dilakukan antara lain monitoring capaian rencana aksi triwulanan, penginputan capaian dalam portal RB. Alokasi anggaran yang digunakan sebesar Rp127.152.000,00 dengan realisasi sebesar Rp121.676.174,00 atau mencapai 95,69%. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak *video conference*.

IK 2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, yang diukur setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori Capaian IP ASN terdiri dari 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 13. Kategori Capaian IP ASN

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu 1). Kualifikasi, 2). Kompetensi, 3). Kinerja dan 4). Disiplin. Metode Pengukuran IP ASN Tahun 2024 mencakup :

a) Kualifikasi (bobot nilai 25)

Dimensi kualifikasi menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau keahlian khusus, sehingga seseorang mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai profesinya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN.

Tabel 14 Penilaian Komponen Kualifikasi (Bobot 25)

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh (Bobot)					
			S3	S2	SI/DI V	DII I	DII/DI/SLT A/ Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Ketrampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

b) Kompetensi (bobot nilai 40)

Dimensi kompetensi menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude) yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan. Kesemuanya itu tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kelas antara lain: pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural dan lain-lain.

Sedangkan pelatihan non klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui proses pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas mencakup di tempat kerja (experiential learning), pembelajaran melalui hubungan sosial (social learning), dan pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel (flexible learning). Pelatihan non klasikal berupa experiential learning dilakukan dengan kegiatan magang, benchmarking, detasering dan lainnya. Contoh kegiatan social learning adalah coaching dan mentoring. Kemudian contoh kegiatan flexible learning dilakukan dengan pelatihan jarak jauh, e-

learning, dan belajar mandiri.

Tabel 15 Penilaian Komponen Kompetensi (Bobot 40)

No	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2	0	0	0

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

c) Kinerja (bobot nilai 30)

Dimensi kinerja merupakan penggambaran capaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan pada perencanaan kerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan capaian, target, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang bersangkutan. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil diwujudkan dalam komponen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Kemudian Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

Tabel 16 Nilai Predikat Kinerja PNS

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

d) Disiplin bobot nilai 5

Dimensi disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, apabila dimensi disiplin dilanggar atau tidak ditaati maka ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun hukuman disiplin tidak langsung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan. Penilaian ini mengacu pada Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang membagi hukuman disiplin dalam 3 (tiga) kategori yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Terdapat penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir.

Tabel 17 Nilai Hukuman Disiplin

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

2. Analisa Capaian Kinerja

IP ASN KKP dilakukan pengukuran secara semesteran dengan target Tahun 2024 sebesar 85 (kategori tinggi). Berdasarkan formula perhitungan yang telah ditetapkan, hasil penilaian IP ASN KKP Tahun 2024 sebesar 88,44 (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 21,23, Kompetensi 36,53, Kinerja 25,70, dan Disiplin 4,94.

Hasil tersebut berdasarkan pengukuran 4 (empat) aspek yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan *closing* data dari database kepegawaian SIMPEG dan SIASN tanggal 8 Januari 2025. Detail Capaian IP ASN di KKP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi IP ASN KKP Tahun 2024 Berdasarkan Unit Organisasi Eselon I

No	Unit Kerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Target Semester I Tahun 2025	Target 2025
1	SETJEN	85	87,05	102,41	81	87
2	DJPKRL	88	90,86	103,25	81	87
3	DJPT	84	89,10	106,07	81	87
4	DJPB	85	86,80	102,11	81	87
5	DJPDSPKP	87	89,12	102,43	81	87
6	DJPSDKP	82	87,25	106,40	81	87
7	ITJEM	85	90,82	106,84	82	88
8	BPPSDMKP	79	86,23	109,15	81	87
9	BPPMHKP	86	88,77	103,22	81	87
IPASN KKP		85 (Tinggi)	88,44 (Tinggi)	104,05	82 (Tinggi)	88 (Tinggi)

Sumber. database kepegawaian SIMPEG dan SIASN tanggal 8 Januari 2025 (Nota Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor 62/SJ.3/TU.140/I/2025/SJ.2/TU.210/III/2017 tanggal 9 Januari 2025 hal Capaian IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran per Unit Organisasi Eselon I, nilai IP ASN tertinggi yaitu Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 90,86 dan terendah yaitu BPPSDMKP sebesar 86,23.



Tabel 19. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2024 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Dimensi IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	SETJEN	21,85	33,06	27,14	5	87,05
2	DJPKRL	21,22	37,95	26,69	5	90,86
3	DJPT	21	36,53	26,57	5	89,10
4	DJPB	21,03	35,17	25,60	5	86,80
5	DJPDSPKP	21,76	37,28	25,06	5	89,12
6	DJPSPDKP	21,11	35,84	25,31	5	87,25
7	ITJEM	21,21	39,49	25,12	5	90,82
8	BPPSDMKP	20,90	35,77	24,69	4,87	86,23
9	BPPMHKP	20,95	37,67	25,16	4,99	88,77
	Total	21,23	36,53	25,7	4,98	88,44 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 10.499 PNS KKP, tanpa data BP Batam dan CPNS. Data terakhir diambil pada tanggal 9 Januari 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024>

Indeks IP ASN KKP Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian KL lainnya hal ini disebabkan BKN dan KL terkait masih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

KKP juga telah menyampaikan surat kepada Direktur Jabatan ASN, Badan Kepegawaian Negara Nomor B.4989/SJ.3/TU.210/XI/2024 perihal Permintaan data Capaian Pengukuran IP ASN di Lingkungan KKP Tahun 2023 dan melalui surat jawaban dari Direktur Jabatan ASN, BKN Nomor 28/B-BM.02.01/SD/C.II/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN KKP disampaikan nilai capaian IP ASN dari 10.598 PNS dan 435 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan KKP sebesar 85,66 dengan nilai per dimensi sebagaimana berikut :

Tabel 20. Nilai IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2023 (Berdasarkan Hasil Pengukuran dari BKN)

Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai	Dimensi				Nilai Indeks	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
PNS	10.598	21,79	34,07	25,29	5,00	86,15	Tinggi
PPPK	435	24,57	19,66	24,61	5,00	75,71	Sedang
ASN	11.033	21,90	33,50	25,26	5,00	85,66	Tinggi

Sumber. BKN

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sudoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 9094241
 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 28/BM.02.01/SD/C.II/2025 Jakarta, 3 Januari 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Yth. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 di
 Jakarta

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor B.4989 /S.J.3/TU.210/XI/2024 perihal Permintaan Data Capaian Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan nilai capaian Indeks Profesionalitas ASN dari 10.598 (sepuluh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 435 (empat ratus tiga puluh lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 85,66 dengan nilai per Dimensi terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Direktur Jabatan ASN,


 NIP. 197401111992001



Tembusan :
 Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, sebagai laporan;

Lampiran Surat Direktur Jabatan ASN
 Nomor : 28/BM.02.01/SD/C.II/2025
 Tanggal : 3 Januari 2025

**Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023
 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai	Dimensi				Nilai Indeks	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
PNS	10.598	21,79	34,07	25,29	5,00	86,15	Tinggi
PPPK	435	24,57	19,66	24,61	5,00	75,71	Sedang
ASN	11.033	21,90	33,50	25,26	5,00	85,66	Tinggi

Gambar 8. Surat BKN hal Hasil Pengukuran IP ASN KKP Tahun 2023

Berdasarkan data dan informasi dari website resmi BKN, hasil pengukuran IP ASN Nasional Tahun 2024 belum dirilis dan data yang terakhir dipublikasi dalam website BKN adalah hasil pengukuran IP ASN Nasional Tahun 2022 yaitu sebesar 59,52 terdiri dari dimensi kualifikasi sebesar 21,10, kompetensi sebesar 14,09, kinerja sebesar 19,33 dan disiplin sebesar 5. IP ASN Nasional Tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil pengukuran pada 82 Kementerian dengan nilai rata-rata sebesar 71,82, 33 Lembaga dengan nilai rata-rata sebesar 71,56, 38 Pemerintah Daerah Provinsi dengan rata-rata nilai sebesar 59,36 dan 508 Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan nilai rata-rata sebesar 57,54.

Tabel 21. Hasil Pengukuran IP ASN Nasional Tahun 2022

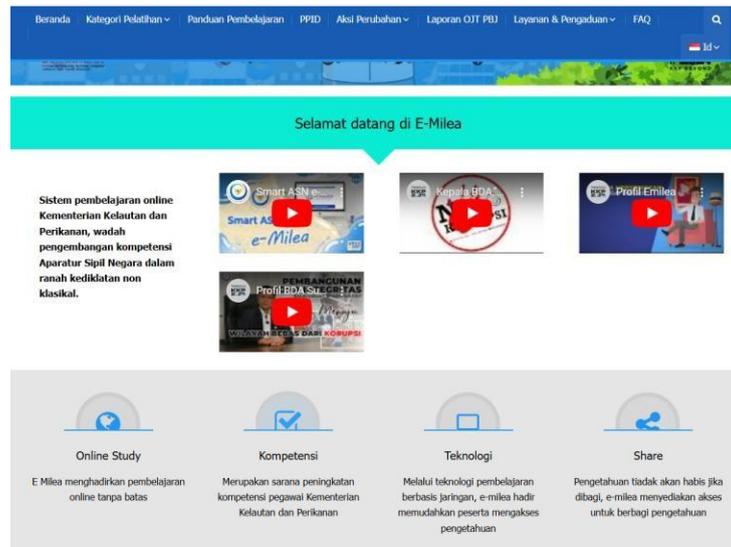
Instansi	Jumlah Instansi	Jumlah PNS yang Diukur	Dimensi				Nilai Indeks
			Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
Instansi Pusat	82	856.560	21,30	21,83	23,70	5,00	71,82
a. Kementerian	33	683.185	21,32	21,51	23,73	5,00	71,56
b. Lembaga	49	173.375	21,29	22,04	23,68	5,00	72,00
Instansi Daerah	546	2.720.335	21,07	12,93	18,67	5,00	57,67
a. Provinsi	38	470.521	21,48	12,69	20,19	5,00	59,36
b. Kab/Kota	508	2.249.814	21,03	12,95	18,56	5,00	57,54
Jumlah	628	3.576.895	21,10	14,09	19,33	5,00	59,52

Sumber. Laporan Kinerja BKN Tahun 2023

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IP ASN KKP antara lain :

1. Sosialisasi target IP ASN tahun 2024 melalui penyampaian Nota Dinas keseluruhan Unit Organisasi Eselon I.
2. Monitoring capaian IP ASN secara berkala melalui penyampaian Nota Dinas kepada Unit Organisasi Eselon I dan selanjutnya dilakukan berjenjang ke unit organisasi dibawahnya.
3. Tersedianya dashboard pengukuran IP ASN secara real time sehingga masing-masing pegawai dapat memantau mandiri capaian IP ASN dan melakukan upaya perbaikan pada dimensi yang masih kurang.
4. Telah dilakukan himbauan kepada seluruh unit kerja untuk melakukan peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin di masing-masing unit kerja.
5. Telah disediakan media peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai melalui pelatihan diklat pimpinan, diklat fungsional, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar/workshop dengan metode hybrid.
6. Telah disediakan media online peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai melalui diklat yang dapat diakses melalui elearning.kkp.go.id. E-Milea menawarkan model pelatihan mandiri bagi peserta, terbuka, tidak berbayar serta materi yang dapat diunduh secara langsung. Model pelatihan e-learning mandiri memungkinkan peserta untuk belajar tentang suatu subjek berdasarkan kebutuhan dan minat peserta, serta formatnya fleksibel tanpa pembatasan waktu selama 24 jam.
7. Pemberian informasi secara intensif mengenai pemenuhan nilai per dimensi di setiap Unit Organisasi Eselon I agar data dapat segera termutakhirkan ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
8. Koordinasi intensif dengan badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait informasi ter-update pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
9. Koordinasi intensif dengan pengelola Indeks Profesionalitas ASN terkait informasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).



Gambar 9. Tampilan media e-milea

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Dalam rangka meningkatkan capaian IP ASN beberapa hal yang akan dilakukan antara lain :

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan ketrampilan sesuai dengan deskripsi pekerjaan serta mengusulkan untuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi yang bersangkutan.
2. Meningkatkan kompetensi dengan sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepegawaian.
3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih rendah bagi pegawai yang bersangkutan.
4. Monitoring dan evaluasi presensi.
5. Program pelatihan dan pendidikan perjenjangan yang dilakukan secara hybrid baik online dan offline agar kesempatan pembelajaran bagi Pejabat Pimpinan Madya dan Pratama serta Pimpinan Unit Organisasi lebih mudah dilaksanakan karena umumnya terkendala pelaksanaan diklat bagi pejabat tinggi karena unsur dibutuhkan kinerjanya bagi organisasi.
6. Peningkatan awareness pegawai untuk melakukan pemutakhiran data elektroniknya dalam aplikasi simpeg.
7. Pengusulan peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai dengan pelatihan diklat pimpinan, diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan seminar/workshop

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IP ASN di KKP, kegiatan utama yang dilakukan antara lain monitoring capaian IP ASN KKP secara berkala, pemantauan dashboard IP ASN KKP, pendampingan dan penyampaian informasi terkait IP ASN kepada Unit Organisasi Eselon I lingkup KKP. Alokasi anggaran yang digunakan sebesar Rp56.930.000, realisasi 56.860.320 atau 99,88%. Selain itu untuk IP ASN di lingkungan Unit Organisasi Eselon I juga dikelola oleh masing masing unit kerja Eselon I. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja IP ASN antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak *video conference*.

IK 3. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah Indikator Kinerja baru di Tahun 2023. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah aktivitas manajemen informasi dan komunikasi publik, yang juga sering disebut sebagai aktivitas manajemen kehumasan, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan tujuan mewujudkan reputasi pemerintah, dan mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan dan program-program pemerintah. Pengukuran indeks ini bertujuan mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi publik baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Konteks informasi dalam indeks PIKP adalah Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden. Landasan hukum Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Indeks ini tidak saja melibatkan responden unit pelayanan informasi dan komunikasi publik pada instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, tetapi juga masyarakat.

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) disusun berdasarkan konsep manajemen komunikasi kehumasan serta agenda *setting*. Setidaknya ada 4 (empat) dimensi yang diukur yaitu dimensi input, proses, output dan outcome. Sumber data capaian Indeks PIKP berdasarkan hasil publikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indeks PIKP

dihitung dan diolah oleh Kementerian Kominfo (saat ini Kementerian Digitalisasi dan Komunikasi) berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang Tahun 2023 dan diumumkan pada Tahun 2024. Realisasi Indeks PIKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 diperoleh dari hasil Dimensi Input dan hasil Dimensi Proses (rata-rata hasil).

Tabel 22. Variabel pada Dimensi Input dan Proses (Indeks Pengelolaan

	Variabel	Indikator Variabel	Jumlah Indikator	Bobot
Input	1. Anggaran	2	15	50%
	2. Bahan Informasi	3		
	3. Sarana dan Prasarana	4		
	4. Media dan Prasarana	2		
Proses	Pengumpulan Data	1	20	50%
	Perencanaan	6		
	Pelaksanaan	10		
	Monitoring dan Evaluasi	3		

Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP Tahun 2024

Sumber. Kementerian Digitalisasi dan Komunikasi

Dimensi input terdiri dari variabel anggaran, variabel bahan informasi, variabel sarana dan prasarana dan variabel media dan saluran informasi. Sedangkan dimensi proses terdiri dari variabel pengumpulan data dalam rangka perencanaan program, variabel perencanaan, variabel pelaksanaan, dan variabel monitoring dan evaluasi. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ditentukan berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Tim Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terdapat 4 (empat) aspek yang menjadi penilaian dalam survei tersebut, yaitu Dimensi Input, Dimensi Proses, Dimensi Output, dan Dimensi Outcome. Namun untuk pengukuran di Tingkat Kementerian/Lembaga hanya menggunakan perhitungan pada 2 (dua) dimensi yaitu input dan proses. Adapun kriteria penilaian indeks PIKP sebagai berikut : 1). Sangat Baik (skor >80), 2). Baik (skor 71–80), 3). Sedang (skor 61–70), 4). Buruk (skor 51–60) dan 5). Sangat Buruk (skor <50).

2. Analisa Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, KKP telah mengisi kuesioner survei PIKP yang dikirimkan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen. Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil survei PIKP yang telah diajukan secara mandiri oleh KKP kemudian dinilai dan hasilnya diumumkan pada tahun 2024 pada Buku Indeks PIKP. Pengukuran ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja masing-masing instansi pengelola informasi dan komunikasi publik di tingkat K/L dan Dinas Kominfo Provinsi. Indeks PIKP terdiri atas 4 (empat) dimensi penilaian, yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi

outcome. Untuk level K/L penilaian atas Indeks PIKP hanya dilakukan pada dimensi input dan dimensi proses. Target Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP Tahun 2024 sebesar 95 dengan realisasi sebesar 97,14 atau mencapai 102,25%. Capaian ini merupakan rata-rata dari 2 (dua) indikator penilaian pembentuk, yaitu nilai dimensi input Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan nilai dimensi proses Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang diperoleh oleh KKP sebagai berikut :

Tabel 23. Hasil Pengukuran Indikator Pembentuk PKP KKP Tahun 2024 Tahun 2024

Indikator Pembentuk	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Nilai Dimensi Input Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	96,9	99,91	103,11%
Nilai Dimensi Proses Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	93,3	94,36	101,14%
Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP	95	97,14	102,25%

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 87,30 maka terdapat kenaikan capaian sebesar 11,27%. Jika dibandingkan dengan target Renstra Perubahan Setjen 2020-2024 (Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11/Kep-SJ/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) sebesar 95, maka target telah terpenuhi dengan capaian sebesar 97,14 atau persentase capaian sebesar 102,25%.

Tabel 24. Hasil Pengukuran IPKP KKP Tahun 2024 Tahun 2024

Realisasi 2019-2023					2024			Renstra Setjen 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	87,30	95	97,14	102,25%	11,27%	95	102,25%

Sumber. Kementerian Komunikasi dan Digital, Volume 5, 2024

Untuk dimensi input dan dimensi proses yang menjadi komponen pembentuk capaian atas Indeks PIKP, terdapat perbandingan di tingkat nasional dimana KKP memperoleh peringkat ke-I untuk nilai dimensi input dan nilai dimensi proses sebagaimana berikut :

Tabel 25. Perbandingan Hasil Pengukuran Dimensi Input KKP dengan

No	Kementerian/ Lembaga	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
1	KKP	100	99,63	100	100	99,91	Sangat Baik
2	Kementerian ESDM	100	97,09	100,00	100,00	99,27	Sangat Baik
3	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100	94,69	100	100	98,67	Sangat Baik
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	87,50	87,18	100	100	93,67	Sangat Baik
5	Kementerian Pertanian	100	83,42	100	90,91	93,58	Sangat Baik
6	Sekretariat Negara	100,00	88,37	94,44	90,91	93,43	Sangat Baik
7	Komisi Pemberantasan Korupsi	100,00	73,63	100,00	100,00	93,41	Sangat Baik
8	Lembaga Administrasi Negara	100,00	88,00	94,44	90,91	93,34	Sangat Baik
9	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	100,00	73,63	100,00	100,00	93,41	Sangat Baik
10	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	100,00	88,55	100,00	81,82	92,59	Sangat Baik
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100,00	90,38	94,44	81,82	91,66	Sangat Baik
12	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100	83,70	88,89	90,91	90,87	Sangat Baik

Sumber. Kementerian Komunikasi dan Digital, Volume 5, 2024

Tabel 26. Perbandingan Hasil Pengukuran Dimensi Proses KKP dengan Kementerian/Lembaga Lainnya Tahun 2024

No	Kementerian/Lembaga	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
1	KKP	100	100	77,43	100	94,36	Sangat Baik
2	Kementerian ESDM	100	100	76,50	100	94,13	Sangat Baik
3	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	100	100	71,41	100	92,85	Sangat Baik
4	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100	95	75,35	100	92,85	Sangat Baik
5	Badan Kepegawaian Negara	100	100	68,67	100	92,17	Sangat Baik
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100	85,00	74,15	100,00	89,79	Sangat Baik
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	100	85,00	69,06	100	88,51	Sangat Baik
8	Kementerian Ketenagakerjaan	100	85,00	66,09	100,00	88,51	Sangat Baik
9	Kementerian Perindustrian	100	90	55,40	100	86,35	Sangat Baik
10	Badan Meteorologi	75	93,7	75,39	100,00	86,03	Sangat Baik

Sumber. Kementerian Komunikasi dan Digital, Volume 5, 2024

Secara nasional, kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik Tahun 2024 termasuk kategori "baik". Kinerja tersebut dicapai dengan dukungan dari dimensi input, output, dan outcome. Kinerja dari dimensi proses berada pada tingkat "sedang". Secara nasional, hasil pengukuran 2019-2024 menunjukkan adanya peningkatan kinerja PIKP dari tahun ke tahun. Kecuali kinerja dimensi proses yang terus mengalami penurunan sejak 2022, kinerja semua dimensi PIKP pada Tahun 2019-2024 selalu berada pada kategori "baik" dengan skor yang cenderung terus meningkat.

Aktivitas manajemen komunikasi publik (riset, perencanaan, pelaksanaan, dan Monev) selama ini kurang mendapatkan perhatian dari K/L dan Dinas Kominfo Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yang telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Digitalisasi dan Komunikasi, kinerja PIKP untuk dimensi proses masih perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan kinerja dimensi proses, disarankan agar

instansi pelaksana fungsi PIKP bersifat lebih strategis data-driven, and proactive, melalui:

1. Pemanfaatan Riset :
 - a. mengembangkan strategi komunikasi yang jelas (tujuan, target khalayak, pesan-pesan kunci, taktik dan saluran).
 - b. meningkatkan pemanfaatan data dan *data analytics* untuk memonitor dampak, melakukan penyesuaian strategi, dan memahami sentiment khalayak.
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Program Kegiatan:
 - a. Menyusun rencana (termasuk bahan) program/kegiatan komunikasi reguler jangka pendek (*weekly, monthly*), menengah (*quarterly*), dan panjang (*yearly*) secara sistematis dan berbasis data.
 - b. Menyusun rencana komunikasi situasional (termasuk komunikasi krisis) untuk mempertahankan kredibilitas organisasi dalam situasi sulit dan penuh tantangan.
3. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Komunikasi melalui
 - a. Meningkatkan komunikasi dua arah untuk mendapatkan *feedback* dari khalayak, mengidentifikasi isu-isu yang muncul, serta memperkuat hubungan dan mempertahankan komunikasi yang terbuka.
 - b. Mengintegrasikan penggunaan berbagai saluran dan media (*integrated communication*) untuk mempertahankan *unified voice and message* (narasi tunggal), menghindari informasi dan pesan-pesan yang saling bertentangan, dan meningkatkan engagement khalayak.
 - c. Memberdayakan komunikasi internal dengan memanfaatkan saluran-saluran internal, menjadikan karyawan sebagai duta organisasi, kepemimpinan komunikasi yang lebih profesional.

Adapun faktor pendukung pencapaian target pada indikator kinerja ini, yaitu dukungan alokasi anggaran, sarana dan prasarana, serta optimalisasi media dan saluran komunikasi dalam diseminasi seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh KKP. Selain itu, kolaborasi bersama seluruh unit organisasi eselon I di lingkup KKP juga menjadi faktor utama atas pencapaian ini.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2024 sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, yaitu:

- a. Monitoring media sosial dengan 72.513 data di twitter/X, 2.315 data di instagram, 1.131 data di facebook, 177 data di tiktok, dan 2.722 data di youtube.

- b. monitoring media massa dengan 21.430 pemberitaan di media online, 1.428 pemberitaan di media cetak, dan 132 pemberitaan di media TV.
- c. 20 kali konferensi pers dan 139 siaran pers.
- d. Bincang Bahari dengan topik Potensi Industri Ikan Hias melalui Nusatic 2024, Lulusan Vokasi KKP Unggul, Langsung Terjun Dunia Kerja Pasca Wisuda, BEECAMP Ciptakan Wirausaha Baru Kelautan dan Perikanan, Apa Itu Susu Ikan, dan Pangan Biru untuk Swasembada Pangan.



Gambar 10. Tampilan Majalah Segara



Gambar 11. Tampilan Majalah Mila



Gambar 12. Tampilan Podcast Segara (Samudera Informasi Kelautan dan Perikanan)

- e. Produksi 13 episode podcast "Segara", produksi 12 edisi KKP News, produksi 3 Majalah Si Mila, produksi 3 Majalah Segara, produksi 84 video pendek, publikasi konten di media sosial KKP, meliputi: Instagram, 214 konten, tiktok, 31 konten, twitter, 139 konten, facebook, 176 konten, youtube, 25 buah video, 31 live video, 39 buah short video.
- f. Penyusunan 3 bahan investigasi isu, meliputi 1) pencemaran lingkungan dari tambak budi daya di Karimunjawa, 2) pengelolaan sedimentasi hasil laut di Morodemak dan 3) profiling Rusdianto Samawa terkait pemberitaan negatif dan Narasi "Tangkap Menteri Trenggono" di media.
- g. Menyusun 15 strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi: Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan, Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, Satelit Cakupan Nusantara, Tahun Tuna, Asian-Pasific Aquaculture 2024, Update Kebijakan Pengelolaan Lobster, Kampung Nelayan Modern, Udang Sebagai Komoditas Unggulan, Strategi Komunikasi Tanggap Darurat Bencana Alam, Gerakan Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut, Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan, Hari Anti Korupsi Sedunia, Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Pangan Biru (dalam rangka Harkannas) dan Makan Bergizi Gratis Menu Ikan pada Hari Nusantara.
- h. Survei persepsi masyarakat bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan konsultan komunikasi untuk pengelolaan benih bening lobster.
- i. Produksi 16 video documenter yaitu Labuh Saji, Lestarkan Laut Lewat Tradisi, Distribusi Perikanan Berkereta, Harapan di Bawah Laut Kapoposang, Kalamo di Timur Indonesia, Tuna Sirip Kuning

dari Tanah Papua, Srikandi dari Seriwe, Dialektika Penangkapan Ikan Terukur, OECM Lindungi Laut, Raja Lele dari Gunung Kidul, Si Badut Pembawa Berkah, Budi Daya Cuan Ala Anak Muda Tasik, Negeri Ikan Mas Pasaman, Pulau Pasaran Pemberi Harapan, Laut Rumah Suku Bajo, Sidat Pundi Ekonomi Berdikari dan Penjaga Laot Aceh.



Gambar 13. Tampilan Video Dokumenter

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil penilaian yang disampaikan di Tahun 2024, untuk dimensi proses variabel pelaksanaan nilai yang diperoleh masih belum optimal yaitu sebesar 77,43. Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya perbaikan melalui :

1. Sinergi dan kolaborasi melalui agenda *setting* yang akan diperbaharui setiap bulan bersama dengan Unit Organisasi I lingkup KKP.
2. Pelaksanaan kegiatan produksi dan publikasi terkait rencana dan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan melalui website resmi KKP, dan media sosial.
3. Produksi video dokumenter terkait pembangunan kelautan dan perikanan.
4. Layanan manajemen isu dan pemantauan opini publik terkait pembangunan kelautan dan perikanan.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.281.715.000 dengan realisasi Rp15.942.922.090 atau mencapai 99,45%, dengan kegiatan utama yaitu peliputan dan dokumentasi, konferensi pres, publikasi melalui media massa, penyebaran informasi terkait kebijakan KKP, *Journalist Briefing/Bincang Bahari*, *Media Relation*, *Media Summit* (Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari), analisa media dan monitoring pemberitaan, pengembangan strategi komunikasi, peningkatan *engagement* dalam rangka publikasi kebijakan dan capaian sektor kelautan dan perikanan di media.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP antara lain media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, *drive* penyimpanan *file online* dan perangkat lunak *video conference*.

IK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Penilaian dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui laman MONEV Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id>). Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran K/L dilakukan dengan mengukur variabel:

1. Efektivitas penggunaan anggaran : Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/*output* dan hasil/*outcome* yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi: capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis, capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I, dan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga.
2. Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga: Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK (Standar Biaya Khusus) yaitu standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. NKPA Kementerian/Lembaga, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator.

Adapun bobot setiap indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 27. Variabel Perhitungan NKPA Tahun 2024

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
	2. Nilai Efektivitas Unit Eselon I	20
	3. Nilai Efektivitas Satker	30
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain a. Sangat Baik, apabila NKA > 90; b. Baik, apabila NKA >80 - 90; c. Cukup, apabila NKA >60 - 80; d. Kurang, apabila NKA >50 – 60; e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50. Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas : efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Variabel Efisiensi: efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi: penggunaan SBK dan/atau efisiensi SBK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi data pra-pelaporan meliputi:

1. Manual indikator kinerja sasaran strategis : pengisian manual indikator kinerja sasaran strategis dilakukan di tingkat kementerian/lembaga. pengisian manual indikator dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan. apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja sasaran strategis, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 januari hingga akhir februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja sasaran strategis, antara lain: definisi indikator kinerja sasaran strategis; formula perhitungan capaian indikator; tujuan; tingkat kendali;tingkat validitas indikator; polarisasi capaian; instansi penyedia data; sumber/aplikasi/media data; waktu data tersedia; periode pelaporan; dan/atau keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.
2. Manual indikator kinerja program : pengisian manual indikator kinerja program dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja program, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja program, antara lain: definisi indikator kinerja program, formula perhitungan capaian indikator; tujuan; tingkat kendali; tingkat validitas indikator; polarisasi capaian; instansi penyedia data; sumber/aplikasi/media data; waktu data tersedia; periode pelaporan; dan/atau dan keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tingkat Unit Eselon I dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi. Variabel efektivitas, diukur berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) diperoleh dari rata-rata aritmatik capaian Indikator Kinerja Program. Nilai tertinggi yang didapat adalah 100% (seratus persen).
- b. Nilai Efektivitas Satker, diperoleh dari rata-rata aritmetika capaian per RO seluruh Satker.

2. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan laman Monev Kementerian Keuangan diperoleh NKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 adalah 87,18 dari target 82,00. Dengan persentase pada efektivitas dengan perolehan 88,86 pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), sebesar 94,99 pada Indikator Kinerja Program (IKP), dan Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 97,04. Perolehan pada komponen efisiensi Penggunaan SBK mencapai sebesar 90,17 dan Efisiensi Standar Biaya Khusus (SBK) mencapai sebesar 52,25.

No.	Kode K/L	K/L	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas			Efisiensi	
				IKSS	IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		87.18	88.86	94.99	97.04	90.17	52.25

Gambar 14. Capture Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Apabila dibandingkan dengan capaian NKPA di Tingkat Unit Organisasi Eselon I, capaian NKPA tertinggi yaitu Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan nilai 97,90 dan terendah yaitu Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP yaitu 82,38. Realisasi NKPA Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian dengan KL lainnya disebabkan sampai saat penyusunan laporan kinerja, Keputusan Menteri Keuangan terkait Hasil Evaluasi NKPA Tahun 2024 belum dirilis.

Tabel 28. Perhitungan NKPA KKP Tahun 2024

No.	Unit Eselon I	NKPA
1	Sekretariat Jenderal	88.72
2	Inspektorat Jenderal	90.61
3	Ditjen Perikanan Tangkap	84.12
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	86.99
5	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	94.01
6	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	82.38
7	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	97.90
8	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	95.28
9	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	82.83
NKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan		87.18

Sumber. Aplikasi MonevKemenkeu (15 Januari 2025)

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada Indikator Kinerja NKPA di tahun 2024, antara lain:

- a. Perubahan target yang ditetapkan pada di tahun 2024 diturunkan menjadi 82 yang semula adalah 86 penyebabnya adalah adanya migrasi sistem menggunakan laman MONEV Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id>) akibatnya perkembangan data saat ini berubah dan dihitung otomatis oleh sistem dari Kementerian Keuangan.
- b. Sebagian besar Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memahami cara perhitungan dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024 dengan mekanisme yang baru, yaitu berdasarkan variabel indikator Efektivitas dan Efisiensi. Hal ini berdasarkan uji petik yang sudah dilakukan ke beberapa Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengawasan SDKP, dan BPPSDMKP. Akibatnya perkembangan capaian nilai NKPA tidak dapat meningkat secara signifikan.

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP di Tahun 2024 sebesar 87,18 dari target 82. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena adanya formulasi perhitungan NKPA sesuai Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Tabel 29. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 - 2023

Sasaran Program 1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal											
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP											
Tahun 2018-2023						2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/KEP-SJ/2024)	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	-	82	87,18	106,32%	-	82	106,32%

NKPA merupakan indikator baru di Tahun 2024 merupakan penyesuaian dari indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP. Sebagai perbandingan dengan capaian sebelumnya NKPA belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena NKPA baru diimplementasikan di Tahun 2024 dengan metode perhitungan yang baru.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja antara lain: koordinasi dengan Unit Organisasi Eselon I untuk dapat mengoptimalkan kinerja sehingga dapat mendorong NKPA KKP, pendampingan pelaporan target dan realisasi data capaian *output* pada aplikasi SAKTI dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain optimalisasi sarana koordinasi dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi *Zoom Meeting*. Langkah optimalisasi sarana komunikasi digital ini diyakini dapat menghemat anggaran secara efisien.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Dalam rangka menjaga ketercapaian NKPA upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi/Bimtek/Workshop dan koordinasi dalam upaya peningkatan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara Berkala.
3. Identifikasi dan Monev Implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian NKPA, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp108.614.000 dengan realisasi Rp102.902.875 atau mencapai 94,74%, dengan kegiatan utama yaitu monitoring pelaksanaan capaian NKA KKP dan sosialisasi kebijakan pelaksanaan anggaran dalam rangka peningkatan capaian kinerja anggaran KKP. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP antara lain media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, *drive* penyimpanan *file online* dan perangkat lunak *video conference*.

IK 5. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Pada tahun 2024, berdasarkan surat dari Kementerian PANRB Nomor B/51/S.PP.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pengumuman KIPP 2024, bahwa Kementerian PANRB meniadakan kegiatan Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024, dan akan menyelenggarakan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi. Namun demikian, penyelenggaraan KIPP di lingkup KKP akan tetap dilaksanakan. Mekanisme penyelenggaraan KIPP di lingkup KKP merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunju Pelaksanaan KIPP Tahun 2023, dengan modifikasi yaitu syarat penyelenggaraan inovasi minimal 1 (satu) tahun dan tidak harus layanan publik ke masyarakat.

Kegiatan Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP tahun 2024 diharapkan dapat mendorong inovasi, meningkatkan partisipasi, dan memberikan penghargaan bagi inovator, sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, memelihara kualitas inovasi yang berkelanjutan, serta membangun jaringan kerja sama antar lembaga dan pihak terkait dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.

Tujuan pelaksanaan kegiatan penilaian proposal inovasi pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai upaya menjaring dan menumbuhkan pengetahuan, serta mengimplementasikan gagasan inovasi sebagai upaya penciptaan dalam pembinaan inovasi pelayanan publik. Adapun tujuannya, yaitu:

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi pelayanan publik sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan jaringan inovasi pelayanan publik nasional.
3. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang inovasi pelayanan publiknya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik.
4. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik.
5. Meningkatkan citra penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

2. Analisa Capaian Kinerja

Indikator kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP merupakan indikator kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan. Realisasi Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP berdasarkan Nota Dinas Pusdatin Nomor 3113/SJ.7/TU.210/VIII/2024 adalah senilai 80,78 dari target sebesar 76 atau telah mencapai 106,30 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024

Sasaran Program 1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal											
Indikator Kinerja : Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP											
Tahun 2018-2023						2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/KEP-SJ/2024)	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	82,93	76	80,78	106,29%	-2,59	76	106,29%

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 76 sebagaimana tertuang pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, realisasi di Tahun 2024 telah melampaui target atau sebesar 106,29%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu sebesar 82,93%, realisasi di Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,59%. Namun apabila dilihat dari Jumlah proposal inovasi yang diajukan oleh Unit Organisasi Eselon I mengalami kenaikan yaitu di tahun 2023 sebesar 28 proposal menjadi 61 proposal di Tahun 2024. Peningkatan jumlah proposal yang dinilai pada Tahun 2024 ini dikarenakan terdapat target untuk menghasilkan ide yang lebih banyak dari berbagai unit layanan publik, dengan lebih banyaknya proposal diharapkan dapat meningkatkan ditemukan ide yang lebih bervariasi untuk di jadikan inovasi unggulan KKP di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2025. Meskipun hal ini mengakibatkan penurunan nilai, namun diharapkan para calon inovator dapat belajar sebelum mengikuti kompetisi yang lebih luas.

Tabel 31. Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024

No	Unit Organisasi	Jumlah Proposal yang Disubmit tahun 2023	Jumlah Proposal yang Disubmit tahun 2024	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1	4	76	84.26	110.87
2	Ditjen Perikanan	4	6	76	87.31	114.88

No	Unit Organisasi	Jumlah Proposal yang Disubmit tahun 2023	Jumlah Proposal yang Disubmit tahun 2024	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
	Tangkap					
3	Ditjen Perikanan Budi Daya	2	14	76	76.07	100.10
4	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1	5	76	85.26	112.18
5	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5	8	76	81.13	106.75
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan PerikananS	5	12	76	80.24	105.57
7	BPPMHKP Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9	12	76	80.31	105.68
8	Sekretariat Jenderal	1	-	-	-	-
	Jumlah	28	61	76	80.78	106.30

Sumber. Pusdatin, KKP

Penilaian proposal inovasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang telah ditetapkan. Setiap aspek memiliki bobot penilaian yang berbeda berdasarkan beberapa aspek yaitu:

1. Latar belakang dan tujuan (10%): memuat rumusan masalah yang jelas, menggambarkan kondisi awal, kelompok sasaran masyarakat yang terpengaruh, dan tujuan inovasi dengan target yang terukur.
2. Kebaruan/nilai tambah (15%): memuat ide atau gagasan inovatif, serta keunggulan atau nilai tambah yang dimiliki, termasuk keunikan atau kebaruan dari inovasi.

3. Implementasi inovasi (5%): memuat strategi implementasi yang jelas dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan inovasi.
4. Signifikansi (30%): memuat dampak yang dihasilkan oleh inovasi, dan metode yang digunakan untuk mengukur dampak tersebut.
5. Adaptabilitas (20%): memuat informasi mengenai kemungkinan replikasi inovasi, serta instansi yang berpotensi mereplikasi inovasi tersebut.
6. Sumber daya (5%): meliputi penilaian terhadap ketersediaan sumber daya, baik keuangan, sumber daya manusia, metode, maupun peralatan atau material yang diperlukan untuk melaksanakan inovasi.
7. Strategi keberlanjutan (15%): memuat strategi yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan inovasi, termasuk strategi institusional, manajerial, dan sosial yang akan diterapkan.

Pada tanggal 9 Agustus 2024 telah dilaksanakan rapat pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Terdapat 61 (enam puluh satu) proposal inovasi yang diajukan oleh Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP dan pengusulan pemberian penghargaan bagi inovasi yang mendapatkan predikat Top 15 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 32. Top 15 Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024

No	Unit Organisasi	Nama UPP	Inovasi
1	Ditjen Perikanan Tangkap	Balai Besar Penangkapan Ikan	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)
2	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
3	Ditjen Penguatan Daya Saing dan Produk KP	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)
4	Ditjen Perikanan Tangkap	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)
5	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkal Pinang	JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan) Inovasi Non Digital Cepat Vira
6	Ditjen Perikanan Tangkap	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	SELASIH (Sistem Informasi)

No	Unit Organisasi	Nama UPP	Inovasi
			Pelayanan Air Bersama)
7	Ditjen Perikanan Budidaya	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	SiPATIN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)
8	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New)
9	Ditjen Perikanan Tangkap	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpan dan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu dan
10	Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)
11	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora
12	Ditjen Penguatan Daya Saing KP	Direktorat Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)
13	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Politeknik KP Sidoarjo	Aplikasi PENTARU: Penerimaan Taruna Baru (Efektif, Efisien, Transpran)
14	Ditjen Perikanan Budidaya	BPBAP Takalar	Bibit Rumput Laut Kualitas Unggul (Biru LautKu)
15	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	BDA Sukamandi	<i>Learning Management System Electronic Millennial Learning (E- MILEA)</i>



BULIK MANIS (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa) Idaman Nelayan merupakan inovasi alat tangkap ramah lingkungan yang dikembangkan oleh Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang. Inovasi ini menjawab permasalahan nelayan terkait dengan terbatasnya jumlah bubu ikan yang dapat dibawa, karena bentuk dan konstruksinya yang besar dan tetap. BULIK MANIS menawarkan bubu ikan yang mudah dilipat dan dipasang untuk meningkatkan efisiensi penataan bubu di kapal dan

efektivitas/produktivitas alat tangkap.

BULIK MANIS menjadi salah satu program Kampung Nelayan Maju (KALAJU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di 3 lokasi. Selain itu, BBPI melalui bimbingan teknis, telah menyebarkan BULIK MANIS di 5 lokasi. Sehingga secara akumulatif, 250 nelayan sudah menggunakan bubu lipat ikan di seluruh Indonesia mulai dari Tahun 2019-2023. Salah satu daerah percontohan implementasi yang sukses adalah Jepara, di mana terbukti meningkatkan efektivitas penangkapan dengan peningkatan 17% hasil tangkapan dan 25% nilai pendapatan. Selain itu, BULIK MANIS meningkatkan efisiensi penataan bubu di kapal, di mana nelayan mampu membawa bubu lipat ikan 62,5% lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Keberhasilan BULIK MANIS merupakan bentuk inovasi pelayanan publik BBPI untuk mendukung program ekonomi biru.



Gambar 15. Inovasi BULIK MANIS (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa)



Gambar 16. Inovasi Kado Spesial yang Diinisiasi oleh Loka Kawasan Konservasi Perairan (LKKPN) Pekanbaru

Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut) adalah inovasi pelayanan publik di bidang pengembangan destinasi wisata minat khusus berbasis konservasi di Pulau Bando. Bermula dari permasalahan sampah kiriman dari main land Sumatera mencapai 400 kg di Tahun 2022, yang menghambat penyu bertelur dan berkurangnya daya tarik bagi wisatawan, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru berinovasi melalui KADO SPESIAL untuk menjaga keindahan dan keanekaragaman agaman hayati di Pulau Bando, sehingga layanan publik karcis masuk dan tanda masuk kawasan konservasi dapat berkelanjutan.

Kado Spesial memiliki kebaruan peran mitra yang kolaboratif secara ekologi, sosial dan ekonomi dengan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan sampah, pengembangan wisata survival dan pelestarian keanekaragaman hayati laut. KADO SPESIAL berhasil mengendalikan sampah laut melalui Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pengepul Sampah dan Bank Sampah Sahabat Alam yang menciptakan sirkular ekonomi sebesar Rp 2.973.000,- dari hasil pemilahan sampah mencapai 1.310,5 kg. Kado Spesial juga mengembangkan destinasi wisata survival bagi wisatawan mancanegara. Kegiatan ini berhasil menciptakan perputaran ekonomi masyarakat senilai Rp. 275.000.000. Selain itu, Kado Spesial juga berhasil menyelamatkan 14.213 telur penyu yang mendukung Goal 14 SDGs dan secara paralel tercapai penguatan kemitraan sesuai Goal 17 SDGs.

Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian KL terkait, karena tidak semua KL memiliki indikator ini. Namun demikian terdapat inovasi pelayanan publik di lingkup KKP yang diajukan ikut serta dalam ajang penghargaan tingkat internasional yaitu the United Nations Public Service Awards (UNPSA). Inovasi yang diikutsertakan disesuaikan dengan tiga kategori inovasi UNPSA 2024, yakni Inovasi pada Institusi Publik, Pelayanan Publik Responsif Gender, serta kategori khusus Mengatasi Perubahan Iklim. UNPSA merupakan penghargaan internasional paling prestisius dalam bidang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Inovasi pelayanan publik Indonesia yang pernah meraih prestasi di UNPSA antara lain yaitu inovasi Kerjasama Dukun Beranak dengan Inovasi Bidan dari Kabupaten Aceh Singkil dan Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan dari Kabupaten Sragen (2015), inovasi Early Detecting and Treatment (EDAT) Penyakit Malaria di Kabupaten Bintuni Papua Barat (2018), dan inovasi PetaBencana.id yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sama Yayasan PetaBencana.id (2019). Berikut daftar inovasi Indonesia yang diajukan pada UNPSA 2024 yang salah satunya merupakan inovasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Fuji Lestari (Fish-Apartment Untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri) – Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inovasi Fish Apartment (FUJI LESTARI) BBPI Semarang masuk kedalam finalis TOP 99

pada kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) Tahun 2023 berdasarkan Kepmen PANRB No 541/2023 dan Nominasi Kategori Tackling Climate Change United Nation of Public Service Award (UNPSA) Tahun 2024 berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB No B.478/PP.00.05/2023. Inovasi yang dilombakan pada ajang *United Nation of Public Service Award* (UNPSA) Tahun 2024 tersebut terdiri dari:

- a. Kategori Inovasi pada Institusi Publik (*Innovation in Public Institutions*)
 1. JAKI (Jakarta Kini) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 2. SIPELANDUKILAT (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Untuk Wilayah Perbatasan dan Pedalaman – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
 3. JSS (Jogja Smart Service) – Pemerintah Kota Yogyakarta
- b. Kategori Pelayanan Publik Responsif Gender (*Gender-Responsive Public Services*)
 1. SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Cek dan Sadari – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. UPTD PPA DKI Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 4. SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang) – Pemerintah Kota Semarang
- c. Kategori khusus Mengatasi Perubahan Iklim (*Special Category on Tackling Climate Change*)
 1. SIKATAM-SC – Kementerian Pertanian
 2. Fuji Lestari (Fish-Apartment Untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri) – Kementerian Kelautan dan Perikanan
 3. SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 4. REKLAMASI LAUT – Kabupaten Bangka

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Menetapkan Surat Keputusan tentang Penilai Internal Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2024.
2. Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik kepada seluruh Unit Organisasi
3. Menyampaikan sertifikat hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik kepada 3 (tiga) inovasi terbaik melalui kegiatan silaturahmi nelayan nasional yang diselenggarakan pada tanggal 26 September 2024.
4. Evaluasi kegiatan penilaian proposal inovasi pada Tahun 2024
5. Koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I lain untuk penyusunan proposal inovasi pelayanan publik.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Membuat aplikasi penilaian sederhana untuk mempermudah proses penilaian serupa dengan sinovik.
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN RB Untuk menjaga kualitas pelayanan publik di lingkup KKP dan mendorong unit kerja eselon I untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang *agile*, efektif dan efisien di dukung oleh SDM berkualitas.
3. Menyiapkan tim penilai beserta *timeline* kegiatan penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
4. Pendampingan dalam menyusun proposal inovasi pelayanan publik baik dari tim penilaian internal KKP maupun tim penilai di tingkat Unit Kerja Eselon I.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp373.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 367.661,094,00 atau mencapai sebesar 98,54%, dengan kegiatan utama Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP, sosialisasi dan pendampingan penyusunan proposal inovasi.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak video *conference*.

IK 6. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh Pemerintah ataupun Swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang mengukur pemanfaatan teknologi informasi dengan penilaian aspek keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase Unit Kerja Level I – II yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi Manajemen Pengetahuan melalui platform *Collaboration Office*

(<https://portal.kkp.go.id>). Pejabat yang dinilai keaktifannya adalah Pejabat setingkat Eselon II. Adapun komponen penilaian Manajemen Pengetahuan adalah:

1. Keaktifan 100%
2. Target nilai 3 poin, dengan maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4 poin, dan
3. Pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II

Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulanan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain:

1. Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 4W1H (*Who, What, Where, When and How*) dengan sumber pengetahuan jelas akan poin 0,5.
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Pengukuran capaian dilakukan melalui 1). menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Collaboration Office*), 2). pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload, keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan, 3). pengukuran Unit Kerja Eselon I dihitung dengan berdasarkan pejabat pusat eselon 2, 4). poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan dan 5). data capaian diterbitkan oleh Pusdatin dengan menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah menjadi capaian untuk KKP dan Unit Kerja Eselon I.

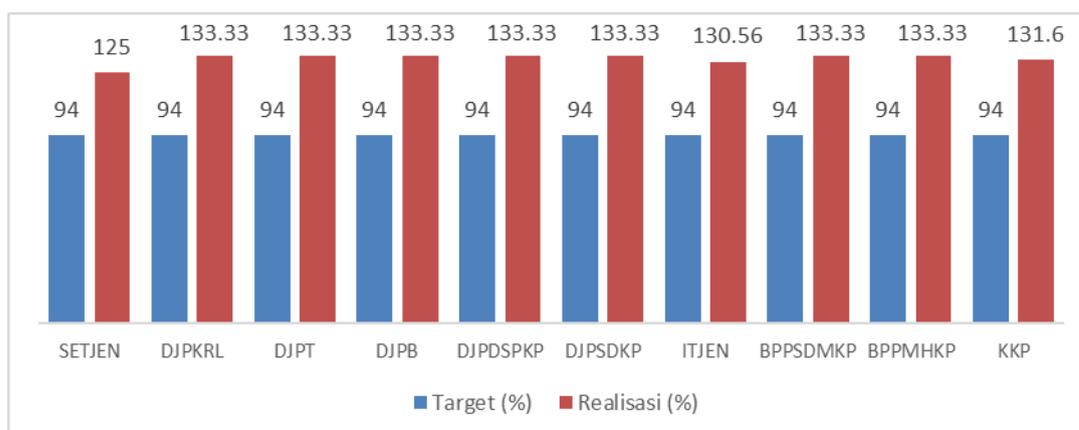
2. **Analisa Capaian Kinerja**

Target Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Tahun 2024 sebesar 94 dengan realisasi sebesar 131,60% atau mencapai 140% dan menjadi sebesar 120% dalam aplikasi kinerjaku. Hal ini disebabkan capaian maksimal dalam aplikasi kinerjaku adalah sebesar 120% (normalisasi capaian sebesar 120%). Apabila dibandingkan dengan target Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 target Tahun 2024 sebesar 94% dengan realisasi sebesar 131,60% atau mencapai 140% dan menjadi sebesar 120% dalam aplikasi kinerjaku (normalisasi capaian maksimal 120%). sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33 Capaian Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP

Sasaran Program 1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal											
Indikator Kinerja. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP (%)											
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/KEP-SJ/2024)		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	
91,14	96,06	95,59	98,32	112,59	94	131,6	140,00% Atau 120% pada aplikasi kinerjaku	2,28	94	140,00% Atau 120% pada aplikasi kinerjaku	

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP pada Tahun 2024 adalah 131,60%, yang menunjukkan bahwa capaian sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Hal ini dapat dicapai karena sebagian besar Pejabat di Level I aktif dalam melakukan sharing informasi capaian kinerja masing-masing unit kerja. Realisasi Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2023 adalah 129,32%, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 kenaikannya adalah 2,28%. Capaian berdasarkan Unit Organisasi Eselon I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Gambar 17. Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP dan Unit Organisasi Eselon I Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat target Manajemen Pengetahuan seluruh Unit Organisasi Eselon I tahun 2024 adalah 94% dengan realisasi paling tinggi yaitu sebesar 133,33% ada di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP, Badan Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya KP. Sedangkan nilai paling rendah yaitu sebesar 125% diduduki oleh Sekretariat Jenderal.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu

1. Adanya Komitmen pimpinan untuk melakukan berbagi pengetahuan melalui *collaboration office*, sehingga dapat berbagi pengetahuan dengan seluruh pegawai di lingkungan KKP.
2. Pemantauan dan evaluasi capaian yang dilakukan secara berkala sehingga sebeiium periode pengukuran capaian.
3. Sosialisasi tentang penggunaan *collaboration office* yang dilakukan sehingga mempermudah pengguna aplikasi untuk berbagi informasi.
4. Adanya layanan *help desk* di aplikasi *collaboration office* sehingga apabila ada kendala dan hambatan di aplikasi dapat langsung ditanyakan.

3. **Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Hal-hal yang telah dilakukan untuk tercapainya Indikator Kinerja Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup KKP di Tahun 2024 mencakup :

1. Pembangunan *Platform Portal Collaboration Coofis* sebagai *tools* dalam implementasi Manajemen Pengetahuan di Lingkungan KKP.
2. Mengintegrasikan proses bisnis seluruh layanan yang ada di KKP agar dapat berjalan lebih efisien dan optimal, telah dilakukan pengembangan menu pada *Collaboration Office* yaitu menu kearsipan dan nilai IP ASN dari epegawai KKP;
3. Sosialisasi penggunaan Portal *Collaboration Coofis* kepada seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Melakukan koordinasi dengan PIC yang telah ditunjuk oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan KKP.
5. Melakukan monitoring keaktifan para pejabat dalam *sharing* informasi.
6. Evaluasi pemanfaatan portal *coofis* ke beberapa Unit Pelaksana Teknsi (UPT).
7. Penyampaian capaian Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup KKP paling lambat diterima oleh unit kerja sebelum tanggal 10 pada bulan setelah triwulan berakhir.

8. Menyampaikan capaian sementara nilai Manajemen Pengetahuan Lingkup KKP dan Unit Organisasi Eselon I melalui Nota Dinas dan Memorandum kepada seluruh Unit Organisasi Eselon I.
9. Telah tersedia menu publikasi pada *website* KKP untuk akuntabilitas kinerja baik pada level KKP maupun unit kerja eselon I, yang terdiri dari: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Diharapkan Pegawai lingkup KKP dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan menu tersebut, sebagai salah satu sarana *sharing session* informasi



Forum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik bidang Kelautan dan Perikanan TA 2024

Forum Monitoring Dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024

kegiatan 01 Agustus 2024

Hari ini Biro Perencanaan mengadakan acara Forum Monitoring Dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024 yang dibuka oleh Bapak Sekretaris Jenderal di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center (16/7)
 Acara ini dihadiri oleh Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si, Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal, Para Sesditjen dan atau yang mewakili; Para Narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
 Pada forum ini Bapak Sekjen meminta agar pelaksanaan DAK bidang KP dipastikan telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan di-sepakati antara KKP, Kemen-terian PPN/ Bappenas, Kemen-terian Keuangan dan Daerah. Apabila ada perbedaan antara Rencana Kerja dengan pelaksanaan di daerah, melalui forum ini akan dilakukan evaluasi, yang hasilnya akan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan DAK bidang KP tahun 2025.
 Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan efektivitas pelaksanaan DAK bidang KP, hari ini akan diluncurkan platform "Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK bidang Kelautan dan Perikanan". Dengan hadirnya platform ini, semoga memberikan manfaat bagi daerah dalam: 1) Menyusun perencanaan secara baik dan realistis sesuai dengan potensi, alokasi dan menu yang tersedia, sehingga pencapaiannya lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat; 2) Menjalankan program dan kegiatan yang dibayai oleh DAK bidang KP secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undang-an yang berlaku, agar tidak terdapat konsekuensi hukum di kemudian hari; 3) Mengintegrasikan kegiatan dengan bidang lain, misalnya irigasi, jalan akses, penum-buhan UMK, sehingga hasil pembangunan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan 4) Melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan untuk penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya.

Gambar 18. Contoh *Sharing* Informasi Manajemen Pengetahuan dalam *Portal Collaboration*

4. **Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)**

Dari pengukuran capaian IKU Manajemen Pengetahuan lingkup KKP dan Setjen dapat disimpulkan bahwa capaian sudah melebihi target. Hal ini dapat dicapai karena sebagian besar Pejabat di Level I dan II aktif dalam melakukan *sharing* informasi capaian kinerja masing-masing unit kerja. Berdasarkan hasil evaluasi di Tahun 2024, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan kedepan antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan *Portal Collaboration Office*.
2. Forum Kolaborasi Sistem Informasi.
3. Sosialisasi implemetansi Portal di beberapa UPT KKP.

5. **Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP dengan alokasi anggaran sebesar Rp136.984.000,00 dan realisasi sebesar 133.139.127,00 atau mencapai 97,19% dengan rincian kegiatan yaitu Sinkronisasi dan Koordinasi Manajemen Pengetahuan dan Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan. Sebagian besar kegiatan pendukung lainnya antara lain koordinasi, pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui penyampaian nota dinas dan memorandum kepada Unit Organisasi Eselon I, *zoom meeting*, *group whatapps* dengan kegiatan utama yaitu *sosialisasi Portal Collaboration Office Manajemen Pengetahuan kepada seluruh pejabat Eselon I dan Eselon II, serta Ketua Tim Kerja, koordinasi dengan PIC melalui whatsapp group, monitoring dengan PIC Unit Kerja Eselon I, evaluasi portal coofis, penyempurnaan pada menu-menu coofis dan penghitungan realisasi Manajemen Pengetahuan dan Monitoring Portal Collaboration Office Manajemen Pengetahuan.*

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP antara lain aplikasi collaboration office, sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak video conference.

IK 7. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Setjen

1. **Definisi Indikator Kinerja**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan

(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) Setjen merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Organisasi Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2023. Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen TA 2023 dihitung berdasarkan nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Setjen Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2023 dengan target tidak melebihi 0,5% ($\leq 0,5\%$).

2. **Analisa Capaian Kinerja**

Laporan Keuangan KKP setiap tahun selalu direview oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal dan diperiksa secara seksama oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah yaitu BPK-RI. Pengawasan dan pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan good governance agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Obyek dari capaian indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN adalah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada periode pengukuran. Penilaian capaian ini dilaksanakan setahun sekali dan diukur dari besarnya presentase nilai temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran Setjen TA 2023 dengan target $\leq 0,5$. Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen TA. 2023 dihitung dengan cara membandingkan jumlah nilai temuan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 yang disajikan pada LHP atas Kepatuhan dibandingkan dengan realisasi riil Tahun 2023.

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2023 (*audited*) tidak melebihi 0,5%. Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2023 (*audited*) dengan target $\leq 0,5$, dengan realisasi sebesar 0,09 atau telah mencapai 182% atau 120% sesuai perhitungan

dalam aplikasi kinerjajaku, karena capaian maksimal dalam aplikasi kinerjajaku sebesar 120%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019-2023, batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2023 semakin menurun dan hal ini merupakan hal positif mengingat capaian indikator ini bersifat *minimize* dimana semakin kecil semakin baik, meskipun apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 0,01 realisasi ini mengalami penurunan sebesar 0,08 poin. Perhitungan capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34 Rincian capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (Persen)

Sasaran Program 1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal												
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (Persen)												
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/KEP-SJ/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% 2023-2024	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Thdp Target 2024	
0,01	0,02	0,1	0	0,01	≤0,5	0,09	182 atau 120% dalam Aplikasi Kinerjajaku	≤0,5	≤0,5	0,09	182 atau 120% dalam Aplikasi Kinerjajaku	

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari total realisasi anggaran KKP, capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal adalah 0,0904% dari target kurang dari 5% (≤0.5). Rekapitulasi tindak lanjut temuan keuangan Laporan Keuangan Tahun 2023 Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 35. Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dengan Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP

No.	Unit Organisasi Eselon I	Target	Realisasi (%)
1	Sekretariat Jenderal	≤0,5	0.0904
2	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	≤0,5	0.0441
3	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	≤0,5	0.0999
4	Ditjen Perikanan Tangkap	≤0,5	0.0674

No.	Unit Organisasi Eselon I	Target	Realisasi (%)
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	≤0,5	0.0596
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	≤0,5	0.1365
7	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	≤0,5	0.2940
8	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	≤0,5	0.0023
9	Inspektorat Jenderal	≤0,5	0.0317
Jumlah KKP		≤0,5	0.0939

Apabila dilihat di Tingkat KKP, capaian batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK Atas LK KKP sebesar 0,0939%, Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK dengan nilai paling tinggi yaitu Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 0,0023% dan paling rendah yaitu Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 0,2940% (indikator bersifat minimize, artinya semakin kecil capaiannya semakin baik). Adapun rincian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan lingkup Unit Organisasi Eselon II Sekretariat Jenderal ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 36. Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Organisasi Eselon II

No.	Unit Organisasi Eselon II	Target	Realisasi (%)
1	Biro Perencanaan	≤0,5	-
2	Biro Keuangan dan BMN	≤0,5	-
3	Biro Hukum	≤0,5	-
4	Biro Umum dan PBJ	≤0,5	0,1912
5	Biro SDMAO	≤0,5	-
6	Biro HKLN	≤0,5	-
7	Pusdatin	≤0,5	0,0204
8	LPMUKP	≤0,5	-
9	BPISDKP	≤0,5	-
10	Satker Dekonsentrasi	≤0,5	-
Jumlah Sekretariat Jenderal		≤0,5	0,0904

Sumber. Biro Keuangan (Januari, 2025)

Ketercapaian indikator Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan realisasi anggaran SETJEN didukung beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen pimpinan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan perencanaan yang matang, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan yang berjenjang dan berkala.

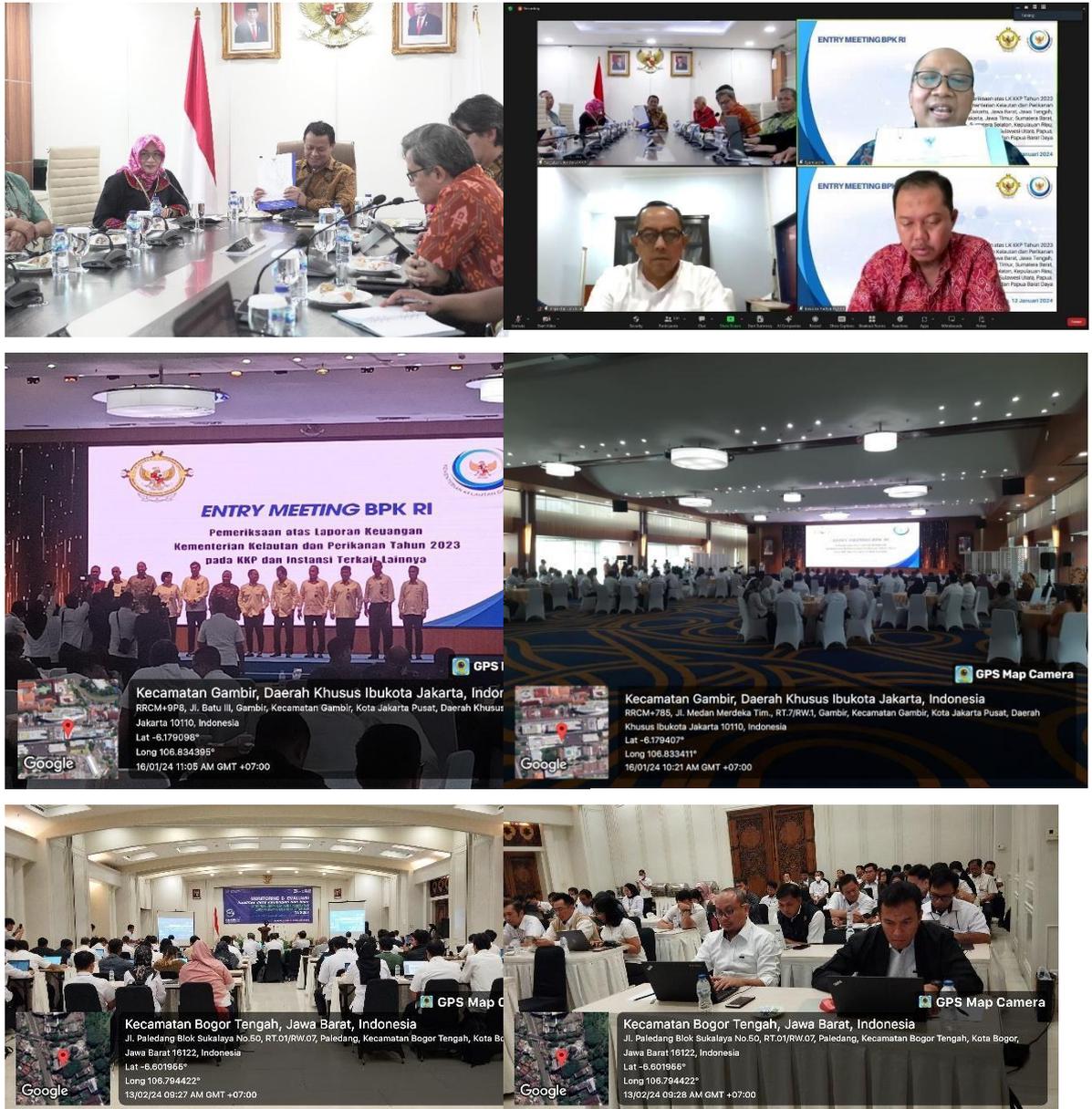
2. Seluruh Unit Organisasi telah memastikan penyajian Laporan Keuangan seluruh transaksi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Menerapkan, melakukan penilaian, serta melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.
4. Melakukan monitoring dan/atau pendampingan atas penyusunan laporan keuangan pada seluruh unit kerja sesuai kebutuhan.
5. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP.
6. Melakukan koreksi/revisi atas angka dalam komponen laporan keuangan maupun memperbaiki pengungkapan atas hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan hasil monitoring, reviu APIP maupun hasil audit BPK atas laporan keuangan *unaudited*.
7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK sesuai dengan ketentuan.
8. Memenuhi permintaan dokumen Pemeriksaan BPK RI apabila terdapat permintaan dokumen.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan realisasi anggaran SETJEN didukung dengan pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Pembahasan koreksi internal Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pemantauan penyampaian konsep temuan pemeriksaan dari Tim BPK RI atas Laporan Keuangan KKP tahun 2023.
3. Pembahasan tindak lanjut konsep Temuan Pemeriksaan BPK-RI TA 2023 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyelenggarakan pembahasan tindak lanjut konsep Temuan Pemeriksaan.
4. Pembahasan Koreksi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited* lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tim BPK RI.
5. Melakukan koordinasi atas LHP Laporan Keuangan Tahun 2023, atas temuan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai tugas belajar yang tidak sesuai ketentuan. Terhadap rekomendasi BPK telah dilakukan perbaikan mekanisme penerbitan SK Tugas Belajar,

telah disusun draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tubel di lingkungan KKP, dimana pada bulan Oktober 2024 sudah dilakukan harmonisasi untuk dibahas lebih lanjut dengan Unit Organisasi Eselon I untuk kemudian diharmonisasi dengan Kementerian Hukum oleh Biro Hukum KKP, serta telah disusun Proses Bisnis (Probis) dan SOP terkait tubel.



Gambar 19. Entry Meeting BPK RI dan Penyusunan Laporan Keuangan

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil evaluasi, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan kedepan antara lain :

1. Pendampingan Audit atas Laporan Keuangan oleh APIP/Auditor Eksternal.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Tim BPK RI, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
3. Monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan indikator kinerja ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp237.415.000 dengan realisasi Rp236.965.844 atau mencapai 99,81 persen, dengan kegiatan utama yaitu pendampingan penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI lingkup Sekretariat Jenderal dan KKP, fasilitasi penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas konsep hasil pemeriksaan BPK-RI, pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI lingkup Sekretariat Jenderal dan KKP, monitoring atas kualitas Laporan Keuangan melalui aplikasi e-rekon LK dan MonSAKTI dan proses penyusunan Laporan Keuangan.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK RI atas LK Sekretariat Jenderal antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak *video conference*.

IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal

1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal. Obyek capaian indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal adalah rekomendasi yang terbit pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi Inspektorat Jenderal. Penilaian capaian ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Eselon 2 di lingkup Sekretariat Jenderal secara tuntas dengan target capaian sebesar minimal 95% selama periode pengukuran.

2. Analisa Capaian Kinerja

Realisasi capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Tahun 2024 adalah sebesar 100% (telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 196 rekomendasi dari 196 rekomendasi). Pencapaian ini diperoleh berdasarkan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Unit Kerja Lingkup Setjen pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Setjen. Data capaian berdasarkan hasil perhitungan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Berdasarkan Nota Dinas Sekrataris Inspektorat Jenderal Nomor 51/ITJ.0/TU.140/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal capaian Persentase Jumlah Rekomendasi yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2024, rincian capaian indikator dimaksud per Unit Organisasi Eselon I adalah sebagaimana berikut:

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja" Tahun 2024 Lingkup KKP

No.	Unit Organisasi Eselon I	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Sekretariat Jenderal	196	196	100,00	0	0,00
2	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	453	434	95,81	19	4,19
3	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	126	126	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	640	542	84,69	98	15,31
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	841	790	93,94	51	6,06
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	454	451	99,34	3	0,66%

No.	Unit Organisasi Eselon I	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
	Kelautan dan Perikanan					
7	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	193	188	97,41	5	2,59
8	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	395	372	94,18	23	5,82
9	Inspektorat Jenderal	65	63	96,92	2	3,08
Jumlah		3.363	3.162	94,02	201	5,98

Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 sebesar 100 dari target sebesar 95% atau telah mencapai 105,26%. Apabila dibandingkan realisasi Tahun 2023 yaitu sebesar 99,12% realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 88,78% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekretariat Jenderal sebesar 95% telah mencapai 105,26%.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi KKP sebesar 94,02%, realisasi Sekretariat Jenderal berada diatas rata-rata KKP, dengan rincian rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti sebanyak 3.162 dari 3.363 rekomendasi. Adapun Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja" Tahun 2024 Lingkup Sekretariat Jenderal

No.	Unit Organisasi Eselon II	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas
1	Biro Perencanaan	21	21	100
2	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	36	36	100
3	Biro Hukum	66	66	100
4	Biro Umum dan Pengadaan Barang/	0	0	100

No.	Unit Organisasi Eselon II	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas
	Jasa			
5	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	7	7	100
6	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri	18	18	100
7	Pusat Data Statistik dan Informasi	11	11	100
8	LPMUKP	17	17	100
9	Badan Pengelola Informasi Sumber Daya KP	20	20	100
Jumlah		196	196	100

Pada Tahun 2024, penyelesaian rekomendasi yang telah diselesaikan antara lain:

- 1 Penyelesaian rekomendasi terkait dengan Manajemen Resiko lingkup Sekretariat Jenderal khususnya terkait dengan kurang tepat dalam penentuan faktor risiko, kelengkapan bukti formulir pemantauan Manajemen Resiko secara berkala sesuai dengan rencana pengendalian. Upaya dalam rangka penyelesaian rekomendasi terkait dengan maturitas SPIP antara lain melengkapi kekurangan dokumen untuk komponen struktur dan proses pada kertas kerja penjaminan kualitas.
- 2 Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut laporan hasil reviu atas laporan keuangan Semester I TA 2024 satuan kerja lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 3 Penyelesaian rekomendasi terkait dengan sistem perencanaan penganggaran yaitu belum seluruh dokumen dilengkapi data dukung yang memadai pada beberapa Rincian Output RO).
- 4 Penyelesaian rekomendasi terkait dengan aplikasi e-Debitur pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yaitu memastikan kembali data debitur telah sesuai antara data debitur pada aplikasi dengan data bagian keuangan.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Sasaran Program 1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal											
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal											
Realisasi					2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/KEP-SJ/2024)		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% 2023-2024	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Thdp Target 2024
82	92,78	100	97,86	99,12	95	100	105,26	0,89	95	100	105,26

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen pimpinan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan perencanaan yang matang, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan yang berjenjang dan berkala serta menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal atas hasil reuiu, audit dll.
2. Memantau penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.
3. Koordinasi dengan Inspektorat I untuk penyelesaian rekomendasi serta menyusun timeline penyelesaian rekomendasi.
4. Telah disusun rencana aksi penyelesaian rekomendasi sesuai dengan timeline yang telah disepakati.
5. Monitoring dan evaluasi terkait kendala dan kesulitan yang dihadapi dan membahas solusi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal didukung pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal secara triwulanan dengan mengidentifikasi permasalahan dalam penyelesaian tindak lanjut.
2. Monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan Inspektorat Jenderal pada Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati pada Rapat Tindak

Lanjut Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil evaluasi, untuk perbaikan dan sebagai upaya penyempurnaan agar Hasil pengawasan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh seluruh unit kerja sehingga tidak terjadi temuan berulang, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan rapat secara berkala untuk memantau penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.
2. Koordinasi dengan Inspektorat I untuk penyelesaian rekomendasi serta menyusun timeline penyelesaian rekomendasi.
3. Menyusun rencana aksi penyelesaian rekomendasi sesuai dengan timeline yang telah disepakati.
4. Monitoring dan evaluasi terkait kendala dan kesulitan yang dihadapi dan membahas solusi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan indikator kinerja ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp72.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp72.134.145,00 atau mencapai 99,96% dengan kegiatan utama yaitu asistensi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP APIP dan Eksternal Lingkup Sekretariat Jenderal (Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan rekonsiliasi perkembangan tindak lanjut LHP pengawasan internal dan eksternal lingkup Sekretariat Jenderal.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak *video conference*.

IK 9. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Sekretariat Jenderal

1. Definisi Indikator Kinerja

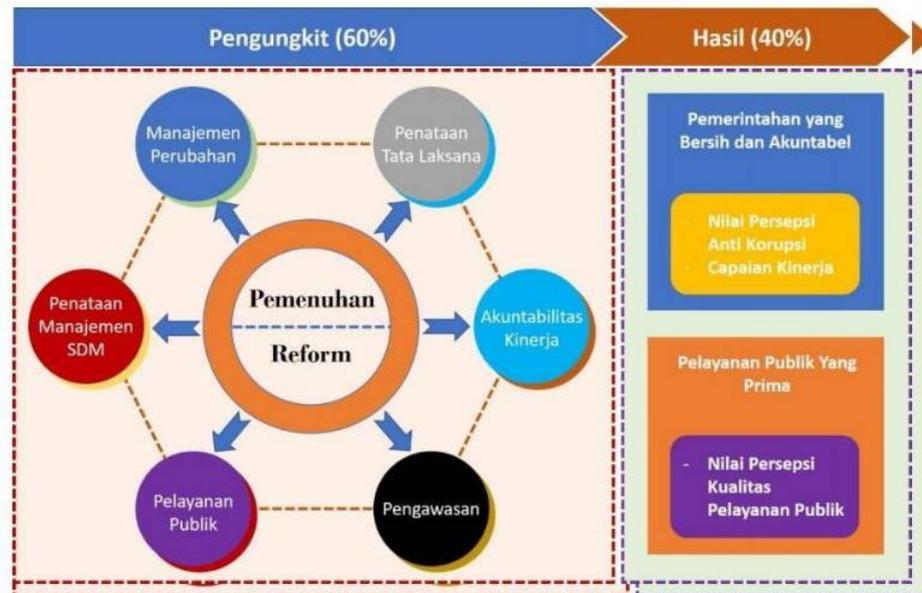
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil penilaian WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Selain itu, untuk mencapai predikat WBK suatu unit kerja juga harus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian

terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman dari Kementerian PAN dan RB. Unit yang diarahkan berpredikat WBK merupakan unit kerja yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Inspektur Jenderal KKP. Perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 dihitung dari akumulasi jumlah unit kerja yang berpredikat menuju WBK sampai dengan Tahun 2024.

Dasar hukum pelaksanaan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Gambar 20. Komponen dan Indikator Pengungkit dan Hasil pada WBK

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri dari dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Pada saat melakukan evaluasi, Tim Penilai Internal (TPI) melakukan pengisian terhadap LKE untuk mengetahui kualitas pembangunan ZI terkait komponen pengungkit dan hasil. LKE Evaluasi ZI sebagaimana berikut:

Tabel 40. Rincian Komponen Pengungkit pada Lembar Kerja Evaluasi penilaian WBK

No	Komponen Pengungkit Pemenuhan dan Reform	Bobot (60%)
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tata Laksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Dalam komponen pengungkit terbagi menjadi 2 kriteria penilaian yaitu pemenuhan berupa pertanyaan yang sifatnya pemenuhan sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan *reform* (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam area pengungkit) dengan bobot terbagi masing-masing 50 persen dari bobot per komponen pengungkit.

Tabel 41. Rincian Komponen Hasil pada Lembar Kerja Evaluasi penilaian WBK

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	22,50
1.	Survey Persepsi Anti Korupsi	17,50
2.	Capaian Kinerja	5,00
	Pelayanan Publik Yang Prima (17,50)	
1.	Survey Persepsi Pelayanan Publik	17,50

Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 42. Persyaratan Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 (telah emndapatkan Predikat Menuju WBK)
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih Akuntabel" minimal	18,25	19,50
Nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" Minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai sub komponen " Kinerja Lebih Baik" minimal	2,5	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" Minimal	14 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

2. Analisa Capaian Kinerja

Pada Tahun 2024, terdapat 3 unit kerja yang dibangun menuju Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen dan 2 unit kerja yang telah dinyatakan berpredikat menuju WBK di tahun sebelumnya (Pusdatin dan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa) sehingga target kumulatif pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 sebanyak 5 unit kerja (kumulatif).

Tiga unit kerja yang menjadi target di Tahun 2024 tersebut, telah dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal serta telah dilakukan penilaian mandiri sebagaimana Memo Kepala Biro Keuangan selaku Ketua Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal Nomor 118/SJ.2/TU.210/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan hasil penilaian sebagai berikut : 1). Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur sebesar 83,97, 2). Biro Perencanaan sebesar 82,70 dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri sebesar 81,34. Selanjutnya penilaiannya tersebut dilanjutkan dengan Penilai yang dilakukan oleh Tim Penilai Intrenal yaitu Inspektorat V, dan ketiga unit kerja tersebut dinyatakan lulus sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK Tahun 2024.

Tabel 43. Realisasi Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Setjen

SP 1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal												
Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Setjen												
Realisasi 2019-2023					2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/KEP-SJ/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	2	5	5	100.00%	150	5	5	100%	

Berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Jenderal, 3 Unit Kerja yang diusulkan berpredikat WBK tersebut telah dinyatakan lulus, sehingga realisasi indikator ini sebanyak 5 unit (kumulatif) atau telah tercapai 100 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 2 unit, realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 150 persen. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Setjen Tahun 2020-2024, realisasi di Tahun 2024 ini telah tercapai 100 persen.

Apabila dibandingkan dengan Unit Kerja Eselon I lingkup KKP capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen ditahun 2024 berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal KKP terhadap pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP ditahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024

No	Unit Organisasi Eselon I	Jumlah Unit Kerja	Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2024
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	2	1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
2.	Ditjen Perikanan Budi Daya	3	1. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang 2. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang 3. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
3.	Ditjen PDS	-	-
4.	Ditjen PSDKP	1	Direktorat Pengendalian Operasi Armada
5.	BPPSDMKP	4	1. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 2. Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang 3. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung 4. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
6.	BPPMHKP	-	-
7.	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	-	-
8.	Inspektorat Jenderal	-	-
9	Sekretariat Jenderal	3	1. Biro Perencanaan 2. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana Tabel 43 diatas dilaksanakan berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas periode 2023 sampai dengan September 2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Penilai Internal telah melaksanakan penilaian terhadap 14 unit kerja yang diusulkan Unit Organisasi Eselon I untuk memperoleh Predikat WBK dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Penilaian dilakukan melalui tahapan penilaian lapangan mulai 20 Agustus s.d. 28 September 2024 dan dilanjutkan dengan Pleno TPI KKP pada 14-18 Oktober 2024.

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah serta Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan KKP, dengan hasil sebagaimana Memorandum Inspektur Jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 154/ITJ/KP.750/XI/2024 hal Hasil Penilaian terhadap Unit Kerja yang diusulkan mendapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024 tanggal 22 November 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 13 unit kerja telah memenuhi syarat dan dapat direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK.
2. Sebanyak 1 (satu) unit kerja tidak lulus karena tidak memenuhi syarat ambang batas nilai setiap komponen pengungkit minimal 60 yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus.

Tabel 45. Rekapitulasi Hasil Pleno Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK Lingkup KKP Tahun 2024

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1.	Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	88,03	Lulus
2.	Biro Perencanaan	85,86	Lulus
3.	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	84,98	Lulus
4.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang	84,17	Lulus
5.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	83,78	Lulus
6.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan	83,05	Lulus

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
	Perikanan Bitung		
7.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	82,56	Lulus
8.	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri	82,29	Lulus
9.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	81,95	Lulus
10.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	82,56	Lulus
11.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	80,47	Lulus
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	80,46	Lulus
13.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	79,51	Lulus
14.	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	76,56	Tidak Lulus



Gambar 21. Peringatan Hakordia Tahun 2024 dan Penyampaian Penghargaan kepada Unit Kerja Predikat Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024 pada 12 Desember 2024

Keberhasilan pencapaian indikator Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen didorong oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Komitmen pimpinan
2. Internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK kepada seluruh pegawai yang dilakukan secara intensif.
3. Telah dilakukannya penandatanganan pakta integritas dan komitmen Bersama
4. Telah dilakukan internalisasi implementasi budaya kerja.

Perhitungan realisasi sebanyak 5 unit kerja (kumulatif) tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen adalah sebesar 2 unit kerja yaitu Pusdatin dan Biro Umum dan PBJ berdasarkan capaian kumulatif s.d tahun 2023 sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2021 hal Penetapan Biro Umum dan PBJ sebagai Unit Kerja yang dibangun menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan jenis layanan pada layanan Kesehatan kantor pusat (Klinik Pratama).
2. Realisasi Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen Tahun 2024 sebanyak 3 unit berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 85 Tahun 2024 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang ditetapkan pada 9 Desember 2024 yaitu Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Biro Perencanaan dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Melengkapi dokumen pendukung sebagaimana LKE pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen dan mutasi internal.
3. Memanfaatkan hasil *assessment* pegawai sebagai dasar mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai.
4. Mengupayakan peningkatan kompetensi Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja melalui bimtek atau kegiatan lainnya sejenis.

5. Menyesuaikan SOP dengan Standar Pelayanan Publik, serta mengupayakan pemenuhan komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai persyaratan sebelum dilakukan evaluasi oleh tim TPI.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen, kedepan akan dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Melakukan pemenuhan atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen pengungkit dan hasil.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penilaian mandiri atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE).
3. Membentuk Tim Kerja khusus yang ditetapkan di masing-masing unit kerja yang dibangun menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
4. Koordinasi dengan Inspektorat I mengenai mekanisme penilaian.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan indikator kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Setjen, alokasi anggarannya berada di masing-masing unit kerja yang di tahun 2024 melaksanakan pembangunan WBK yang dinilai secara mandiri oleh Tim Penilai di Lingkup Sekretariat Jenderal dengan kegiatan utama yaitu: pemenuhan atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen pengungkit dan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penilaian mandiri atas LKE, membentuk Tim Kerja khusus yang ditetapkan di masing- masing unit kerja yang dibangun menuju WBK, koordinasi dan asistensi dengan Inspektorat I mengenai mekanisme penilaian. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain : sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak video conference.

1.8 Sasaran Program 2.

PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Program ini mempunyai 2 indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut:

IK 10. Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan Badan Layaann Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase realisasi PNBP BLU merupakan pendapatan yang dikelola oleh BLU, yang berasal dari pendapatan layanan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan, dan pendapatan non layanan yang diperoleh dari hasil optimalisasi/pemanfaatan surplus kas dan/atau dana kelolaan dalam investasi jangka pendek berisiko rendah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi PNBP BLU ini dihitung untuk PNBP yang disahkan ke Kuasa Bendahara Umum Negara periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam mendukung penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, BLU dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005, yang dimasukkan sebagai pendapatan BLU.

Sebagai BLU pengelola dana, LPMUKP memiliki 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Bagian Anggaran KKP untuk anggaran operasional satker serta DIPA Bagian Anggaran BUN untuk alokasi dana kelolaan. Anggaran dana kelolaan yang bersumber dari BA BUN termasuk dalam pembiayaan investasi pemerintah, yaitu investasi kepada BLU. Investasi Pemerintah yang dimaksud merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang, baik berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Oleh karena itu, alokasi anggaran dana kelolaan LPMUKP yang bersumber dari BA BUN tersebut dikelola mengikuti pengaturan internal LPMUKP terkait pengelolaan dana bergulir serta tidak terikat dengan tahun anggaran.

Dalam pengelolaan anggaran dana bergulir tersebut, LPMUKP sebagai BLU diberikan kewenangan untuk melakukan penempatan dana untuk memperoleh pendapatan sebagai pendapatan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

Selain tarif layanan dan imbal jasa penempatan dana sebagaimana disebut diatas, pada BLU LPMUKP juga dimungkinkan untuk memperoleh

pendapatan dari sumber lain, sesuai dengan PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, yaitu sebagai berikut: Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, Hibah tidak terikat dan/atau hibah terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, Penerimaan lainnya yang sah; dan/atau Penerimaan anggaran yang berusmber dari APBN.

2. Analisa Capaian Kinerja

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU, secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yaitu pendapatan jasa layanan dan pendapatan non jasa layanan.

1. Pendapatan Jasa Layanan

Pendapatan jasa layanan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh dari layanan BLU kepada masyarakat, dalam hal ini pendapatan jasa layanan BLU diantaranya pembayaran hasil bunga pinjaman dana bergulir dan biaya provisi yang diakses oleh masyarakat.

2. Pendapatan Non Jasa Layanan

Pendapatan Non Jasa Layanan merupakan pendapatan yang diperoleh BLU yang bukan merupakan layanan langsung kepada masyarakat, contohnya untuk saat ini pendapatan non jasa layanan BLU berasal dari imbal hasil penempatan dana kelolaan BLU LPMUKP yang belum tersalurkan, LPMUKP dapat menempatkan dana kelolaan kepada mitra baik dalam bentuk giro maupun deposito. Khusus untuk penempatan dana melalui deposito, maka LPMUKP harus melakukan proses pemilihan mitra kerjasama (*beauty contest*) untuk menentukan pihak mitra mana yang dapat menghasilkan tingkat return dari kegiatan investasi jangka pendek yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan BLU.

Penilaian terhadap realisasi capaian persentase PNBP layanan BLU dilakukan melalui data penerimaan yang bersumber dari jasa layanan dan biaya provisi atas pinjaman dana bergulir yang dilakukan. Pendapatan jasa layanan tersebut bisa berasal dari *outstanding* pinjaman dana bergulir yang telah terealisasi pada tahun sebelumnya dan pinjaman dana bergulir yang disalurkan tahun berjalan.

Sesuai dengan formula perhiyungan persentase PNBP layanan BLU, meskipun pencatatan yang dilakukan adalah rutin setiap bulan, namun pengukurannya dilakukan secara triwulanan menyesuaikan dengan periode penyusunan laporan kinerja. Target persentase realisasi PNBP layanan pada Tahun 2024 adalah sebesar 97%, sedangkan untuk realisasi PNBP layanan secara nominal targetnya

adalah sebesar Rp30.000.000.000,00. Realisasi PNBP layanan BLU dihitung menggunakan menambahkan realisasi Pendapatan Jasa Layanan dan Pendapatan Provisi.

Tabel 46 Rincian capaian dan target IKU-10

SP.02. PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat												
Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan Badan Layaann Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)												
Realisasi 2019-2023					Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/KEP-SJ/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022- 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian thd Target 2024	
100,39	130,49	131,29	43,63	73,4	97	107,73	111,06%	46,77	97	107,73	111,06%	

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dihitung berdasarkan pencatatan atas pendapatan yang bersumber dari pembayaran jasa layanan dan pembayaran biaya provisi atas pinjaman yang telah dicairkan. Pencatatan tersebut kemudian divalidasi dan disahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara melalui KPPN mitra LPMUKP. Capaian dari indikator kinerja ini dihitung secara *maximize* dimana semakin tinggi realisasi PNBP yang tercatat dan disahkan maka semakin baik. Sumber data untuk mengukur validitas capaian realisasi PNBP menggunakan laporan realisasi PNBP yang dimuat dalam memorandum Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan kepada Sekretariat Jenderal KKP. Selanjutnya, realisasi capaian PNBP secara umum pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Realisasi PNBP BLU Layanan Tahun 2024

Uraian	Target	Realisasi
Persentase PNBP Layanan BLU Kumulatif	97,00%	107,92%
PNBP Layanan BLU Kumulatif (dalam Rp000)	30.000.000	32.376.330

Sesuai dengan manual indikator kinerja yang telah ditetapkan, perhitungan realisasi PNBP layanan BLU hanya menghitung Akun penerimaan yang merupakan jasa layanan yaitu akun 424134 (pendapatan program dana bergulir sektoral) dan 424139 (pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya). Selain dari kedua akun tersebut merupakan pendapatan non jasa layanan, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan realisasi PNBP layanan BLU. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 2 akun layanan PNBP BLU tersebut, didapatkan sebesar Rp32.317.508.825,00, yang kemudian dibagi terhadap

target Tahun 2024 yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 atau telah tercapai sebesar 107,73% dari target 97%.

Tabel 48 Realisasi PNBP BLU Layanan Tahun 2024

Bulan	424134	424139	Jumlah Realisasi PNBP Layanan BLU
	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	
Januari	1.686.790.041,00	171.992.250,00	1.858.782.291,00
Februari	1.589.923.866,00	188.272.500,00	1.778.196.366,00
Maret	1.363.379.807,00	245.319.600,00	1.608.699.407,00
April	2.240.140.409,00	511.574.100,00	2.751.714.509,00
Mei	2.542.482.090,00	542.586.750,00	3.085.068.840,00
Juni	2.405.740.650,00	598.992.900,00	3.004.733.550,00
Juli	824.908.481,00	363.822.315,00	1.188.730.796,00
Agustus	2.348.177.720,00	658.410.125,50	3.006.587.845,50
September	1.809.240.873,00	552.279.900,00	2.361.520.773,00
Oktober	2.799.727.527,00	311.172.117,00	3.110.899.644,00
November	2.231.147.928,00	1.234.488.112,00	3.465.636.040,00
Desember	2.966.952.791,00	2.188.807.513,00	5.155.760.304,00
Jumlah	24.808.612.183,00	7.567.718.182,50	32.376.330.365,50

Sumber. LPMUKP

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu 73,40 persen terjadi kenaikan sebesar 46,77% pada Tahun 2024. Kenaikan atau peningkatan capaian pada realisasi PNBP Layanan BLU dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah tercapainya target realisasi penyaluran dana bergulir sebesar Rp509 miliar sehingga atas pencairan tersebut terdapat penerimaan atas jasa provisi sebesar Rp7.567.718.182,00. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2023 dimana realisasi jasa provisi adalah sebesar Rp5.007.422.226,00 dikarenakan realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP tidak dapat tercapai secara optimal. Realisasi penerimaan jasa layanan Tahun 2024 dipengaruhi oleh jumlah penerimaan pendapatan jasa layanan atau pendapatan dana bergulir sektoral (akun 424134).

Besar kecilnya penyaluran dana bergulir akan berkontribusi pada penerimaan jasa provisi yang berdampak pada jumlah realisasi penerimaan jasa layanan secara total. Kemudian pada Tahun 2024, kegiatan penagihan atas piutang juga terus dilakukan dalam mengupayakan pengembalian jasa layanan yang tertunggak sehingga dapat meningkatkan jumlah realisasi

penerimaan yang bersumber dari jasa layanan atau pendapatan dana bergulir sektoral (akun 424134).

Faktor keberhasilan pencapaian target realisasi PNBP layanan BLU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2024, sehingga atas pencairan dana bergulir tersebut LPMUKP memperoleh realisasi jasa provisi sebesar Rp7.567.718.182,00.
- b. Pelaksanaan kegiatan penagihan jasa layanan yang tertunggak dengan melaksanakan penagihan secara langsung kepada debitur yang menunggak jasa layanan, sehingga mampu untuk meningkatkan realisasi penerimaan jasa layanan.
- c. Pengiriman SMS *blast* secara rutin setiap bulan kepada para debitur LPMUKP.

Apabila dibandingkan dengan kinerja realisasi PNBP lainnya di tingkat KKP, target PNBP BLU secara total di KKP sebesar Rp94.921.264.000 dengan realisasi mencapai Rp182.656.387.734 atau tercapai 192,43%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 . Perbandingan Realisasi PNBP BLU LPMUKP dengan PNBP KKP Tahun 2024

No	Uraian	Target PNBP 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	PNBP Pemanfaatan SDA	3.500.000.000.000	951.819.466.723	27,19%
2.	PNBP Lainnya (pelayanan, pengelolaan BMN dan hak Negara Lainnya)	871.068.491.000	1.073.849.165.581	123,28%
3.	PNBP BLU	94.921.264.000	182.656.387.734	192,43%
	Jumlah	4.084.897.446	1.699.040.997	49,45%

3. **Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Kegiatan dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja antara lain :

1. Telah dilakukan penagihan atas jasa layanan BLU secara berkala
2. Telah mengoptimalkan penyaluran dana bergulir untuk mendukung program prioritas KKP berupa penangkapan ikan terukur dan kampung perikanan budidaya.
3. Pelaksanaan kegiatan penagihan jasa layanan yang tertunggak dengan melaksanakan penagihan secara langsung kepada debitur yang menunggak jasa layanan, sehingga mampu untuk meningkatkan realisasi penerimaan jasa layanan.
4. Pengiriman SMS *blast* secara rutin setiap bulan kepada para debitur LPMUKP.

4. **Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)**

Berdasarkan hasil evaluasi serta memperhatikan permasalahan yang dihadapi beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan antara lain :

1. Mengirimkan SMS *blast* kepada debitur LPMUKP untuk mengingatkan terkait dengan pembayaran pokok dan jasa layanan dengan tujuan agar debitur yang menerima pesan tersebut terbantu terkait dengan jumlah yang harus dibayarkan serta sebagai pengingat bagi debitur LPMUKP dimaksud.
2. Melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelamatan piutang tertunggak baik melalui kunjungan langsung ke debitur di daerah maupun secara daring (WA, telpon, zoom, dsb.).
3. Melanjutkan program penyaluran dana bergulir yang mendukung kebijakan ekonomi biru berupa program penangkapan ikan terukur dan program kampung budi daya dikarenakan program ini berhasil mendorong LPMUKP untuk mencapai target penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024 dan memudahkan dalam rangka monitoring debitur di daerah karena pemanfaat-pemanfaat yang difasilitasi permodalan LPMUKP sudah tergabung dalam suatu organisasi yang menjalankan usaha perikanan.

5. **Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase pencapaian target PNPB BLU LPMUKP, alokasi anggaran digunakan untuk kegiatan utama diantaranya penagihan atas penerimaan jasa layanan Badan Layanan Umum (BLU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp408.160.000 dan realisasi sebesar Rp235.249.213 atau mencapai 57,64%. Kegiatan utama lainnya yang dilakukan di tahun 2024 antara lain layanan pengelolaan dan pengendalian risiko modal usaha, layanan pengelolaan jaminan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain: sarana

perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak *video conference*.

IK 11. Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Penyaluran Dana Bergulir Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan program pembiayaan kepada pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan yang pada Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses pengajuan pinjaman dana bergulir dilakukan melalui beberapa proses tahapan seperti verifikasi kelayakan usulan pinjaman, komite pinjaman, persetujuan, akad, dan pencairan. Pelaksanaan pencairan dana bergulir pada program prioritas KKP dilakukan secara bertahap dengan melihat kesiapan kondisi debitur untuk mengelola dana bergulir yang akan diberikan.

Pada Tahun Anggaran 2024 BLU LPMUKP tidak mendapatkan penambahan dana bergulir yang akan dikelola, sehingga total dana yang dikelola oleh BLU LPMUKP masih berjumlah sama dengan penerimaan pada Tahun 2017 sebesar Rp500 miliar dan Tahun 2018 sebesar Rp.850 miliar sehingga total dana kelolaan BLU LPMUKP sebesar Rp1,35 triliun.

Dalam rangka percepatan penyaluran dana bergulir, LPMUKP melaksanakan sinergi program dengan Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP dalam rangka mendukung program prioritas KKP yang dikoordinasikan oleh Unit Organisasi Eselon I Lingkup KKP. LPMUKP berperan sebagai lembaga yang memberikan stimulus berupa modal usaha agar program prioritas yang dicanangkan dapat berkelanjutan. Sinergi tersebut dilakukan dengan menyiapkan skema penyaluran dana bergulir yang difokuskan kepada koperasi yang memiliki usaha di sektor kelautan dan perikanan agar dapat meneruskan program prioritas KKP dengan memanfaatkan pembiayaan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha yang dilakukan. Program prioritas KKP yang akan menjadi fokus LPMUKP adalah penangkapan ikan terukur, dan kampung budidaya.

Selain itu, sinergi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan penyaluran dana bergulir adalah dengan mengikutsertakan Unit Organisasi Eselon I sebagai pengambil keputusan dalam rapat komite pinjaman dana bergulir dikarenakan secara teknis Unit Organisasi Eselon I lebih memiliki pemahaman yang baik dan mengetahui karakteristik serta kemampuan dari debitur yang mengajukan pinjaman dikarenakan beberapa debitur LPMUKP merupakan binaan dari KKP sendiri. Pola penyaluran yang dilakukan pada Tahun 2024 menggunakan pola kombinasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pola Lama (Pasif)

Pola pasif adalah pola penyaluran dana bergulir LPMUKP yang hanya mengandalkan pendamping untuk memperoleh proposal, sehingga apabila pendamping tidak produktif, maka LPMUKP tidak bisa menyalurkan dana bergulir secara optimal. Proses yang dilakukan adalah dari pendamping yang mencari potensi debitur yang dapat dibiayai kemudian para pendamping tersebut melakukan pendampingan berupa penyusunan proposal pengajuan usulan pinjaman dana bergulir kepada LPMUKP. Pemanfaat program pada pola ini rata-rata adalah pola retail dimana pemanfaatnya lebih didominasi oleh perorangan dan memiliki nilai pengajuan yang biasa diajukan oleh perorangan dengan pembatasan nilai maksimum plafon sebesar Rp500 Juta dengan persyaratan agunan sebesar 125%.

2. Pola Baru (Aktif)

Pola aktif dilaksanakan dengan membentuk tim program prioritas yang mendukung penyaluran dana bergulir LPMUKP melalui dukungan pembiayaan pada program prioritas KKP berupa program penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dan program kampung budidaya. Pada pola penyaluran ini, LPMUKP tidak hanya mengandalkan pendamping di daerah, namun melalui tim yang dibentuk akan mencari calon debitur yang potensial berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (kolaborasi antar Unit Organisasi Lingkup KKP), serta data-data dari sumber yang lain terkait dengan potensi masyarakat pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam suatu korporasi maupun kelompok, sehingga bila pendamping sekalipun tidak produktif, LPMUKP masih mampu untuk menyalurkan dana bergulir melalui pola aktif dimaksud.

Perhitungan realisasi capaian persentase Penyaluran Dana Bergulir dilakukan melalui data akad kredit yang dilakukan oleh LPMUKP sepanjang Tahun 2024.

Sesuai dengan formula perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP, penilaian dilakukan per Triwulan yang kemudian nilai realisasi persentase tersebut dihitung berdasarkan capaian pada akhir tahun. Target realisasi persentase penyaluran dana bergulir adalah 90%.

Berdasarkan histori penyaluran dana bergulir LPMUKP dari Tahun 2017 hingga Tahun 2023, LPMUKP telah menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat yang mempunyai usaha di sektor kelautan dan perikanan dengan total dana bergulir yang tersalurkan sebesar Rp1.334.359.061.390,00 dengan penerima pemanfaat sebesar 31.280 Orang, pengembalian dana bergulir sebesar

Rp459.810.498.554,54,00 dan jumlah *outstanding* pinjaman dana bergulir sebesar Rp874.548.562.835,46,00 maka sisa dana kelolaan yang belum tersalurkan pada akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp475.451.437.164,54,00. Target penyaluran dana bergulir Tahun 2024 sebesar Rp470 miliar. Dana bergulir tersebut akan disalurkan secara langsung kepada UMKM-KP yang nantinya dana bergulir tersebut dapat mendukung pembiayaan kebijakan ekonomi biru KKP serta membiayai bidang usaha KP seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, usaha garam rakyat, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta usaha masyarakat pesisir lainnya.

2. Analisa Capaian Kinerja

Realisasi penyaluran dana bergulir adalah jumlah nilai rupiah atas dana kelolaan yang disalurkan sampai ke debitur (end user) selama Tahun 2024 (terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024) baik untuk penerima baru maupun penerima lama. Capaian ini dihitung dengan polarisasi indikator kinerja *maximize* dimana semakin tinggi realisasi penyaluran dana bergulir maka nilainya semakin baik. Sumber data yang digunakan untuk mengukur validitas capaian ini adalah menggunakan Laporan Keuangan BLU LPMUKP. Target penyaluran dana bergulir Tahun 2024 sebesar Rp470 miliar, dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yaitu sebesar 90 persen, dengan realisasi sebesar Rp509.820.431.125,00 disalurkan kepada 149 debitur dengan pemanfaat sebesar 5.697 orang. Rincian realisasi capaian penyaluran dana bergulir LPMUKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 . Rincian Realisasi Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Tahun 2024

No	Program/Sub Sektor Usaha	Pencairan	Jumlah Debitur	Pemanfaat
1	Penangkapan Ikan Terukur	322.103.040.425	21	4.305
	Perikanan Tangkap	322.103.040.425	21	4.305
2	Kampung Budi Daya	76.915.990.700	11	587
	Perikanan Budi Daya	76.915.990.700	11	587
3	Retail	110.811.150.000	114	805
	Perikanan Budi Daya	48.832.400.000	62	183
	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	31.019.000.000	30	425
	Perikanan Tangkap	21.868.750.000	17	120
	Usaha Garam Rakyat	4.045.000.000	3	4
	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	5.046.000.000	2	73
	Jumlah	509.830.181.125	146	5.697

Apabila dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 90%, realisasi penyaluran dana bergulir sebesar Rp509.830.181.125,00 dengan

target sebesar Rp470.000.000.000,00, maka realisasinya sebesar 108,47%, atau telah mencapai 120,53% dan sebesar 120% pada aplikasi kinerja (normalisasi capaian pada aplikasi kinerja sebesar 120%). Hal ini disebabkan pada aplikasi kinerja seluruh capaian maksimal adalah 120%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi penyaluran dana bergulir di Tahun 2023 yaitu sebesar Rp328.512.512.900,00 realisasi penyaluran dana bergulir di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 55,19%.

Pada tahun 2024 jumlah target realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP relatif mengalami penurunan sehingga menjadi Rp470.000.000.000,00 sedangkan pada tahun 2023 target penyaluran dana bergulir adalah sebesar Rp.660.000.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2024 LPMUKP tidak menerima dana kelolaan tambahan, dan kondisi dana kelolaan LPMUKP terus berkurang sehingga jumlah target tersebut merupakan sisa dana kelolaan LPMUKP yang dapat disalurkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi penyaluran dana bergulir pada periode Tahun 2023, maka penyaluran dana bergulir Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 55,19%. Kenaikan realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 memiliki beberapa faktor, yaitu:

- a. Target penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024 tercapai, bahkan terelisasikan hingga di atas 100%, tepatnya 108,74%. Sedangkan pada Tahun 2023 capainnya hanya sebesar 49,77%, masih berada dibawah 50%.
- b. Adanya perbedaan pada besaran target penyaluran dana bergulir yang juga mempengaruhi nilai capaian. Pada Tahun 2024, target penyaluran dana bergulir adalah sebesar Rp470 Miliar, sedangkan pada Tahun 2023 targetnya adalah sebesar Rp660 Miliar. Hal ini dikarenakan jumlah dana kelolaan LPMUKP terus berkurang seiring berjalannya waktu, terlebih lagi pada Tahun 2023 maupun 2024 sebetulnya LPMUKP hanya menggunakan dana kelolaan yang masih tersedia tanpa adanya tambahan dana kelolaan.

Faktor keberhasilan dalam penyaluran dana bergulir Tahun 2024 disebabkan oleh suksesnya dukungan pembiayaan kebijakan ekonomi biru KKP, dimana pembiayaan yang diberikan relatif lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan kepada perorangan atau retail. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha kelautan dan perikanan mampu untuk meningkatkan skala usaha menjadi lebih besar dan akhirnya akan mampu untuk bersaing dengan skala industri. Contohnya pada bidang usaha perikanan tangkap dimana para nelayan dibiayai melalui koperasi perikanan untuk pembangunan kapal agar nelayan mampu berlayar di atas 12 mil untuk mendapatkan tangkapan yang lebih banyak dibandingkan jika melaut dibawah 12 mil.

Pada Tahun 2024, seperti yang telah dijabarkan bahwa melalui dukungan pembiayaan pada kebijakan ekonomi biru KKP yang memiliki porsi penyaluran lebih besar membuat LPMUKP dapat mencapai target penyaluran dana bergulir. Disisi lain, memberikan pembiayaan kepada koperasi atau organisasi yang memiliki banyak anggota atau pemanfaat akan lebih memudahkan LPMUKP dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan yang telah dilakukan. Berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan kepada perorangan dengan jumlah pencairan yang lebih kecil, memerlukan ribuan debitur agar target penyaluran dana bergulir LPMUKP sebesar Rp470 miliar dapat tercapai. Idealnya jika rata-rata pinjaman yang diakses oleh para pelaku usaha perorangan adalah sebesar Rp50 juta maka diperlukan sekitar 9.400 debitur perorangan. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap debitur dengan jumlah yang sangat banyak tentunya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit mengingat LPMUKP tidak memiliki kantor cabang di daerah, sehingga pemilihan strategi untuk membiayai para pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam koperasi adalah salah satu langkah yang tepat. Terbukti dengan strategi tersebut LPMUKP dapat menyalurkan dana bergulir sebesar Rp325 Miliar pada Tahun 2023 dan sebesar Rp509 miliar pada Tahun 2024 dengan total pemanfaat sebanyak 5.697 orang.

Tabel 51 Rincian capaian dan target IK-11

SP.02. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal												
IK-11. Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (%)												
Realisasi 2019-2023					2024				Renstra Setjen 2020-2024 (Kep Sekjen 11/KEP-SJ/2024)			
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2024	Realisasi Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
28,52	26,58	45,09	22,20	49,77	90	108,47	120,52	117,93	90	108,47	120,52	

Realisasi Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP Tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi disepanjang Tahun 2019-2024, yaitu sebesar 28,52% di tahun 2019, sebesar 26,58% di Tahun 2020, sebesar 45,09% di Tahun 2021, sebesar 22,20% di Tahun 2022, sebesar 49,77% di Tahun 2023 dan sebesar 108,47% di Tahun 2024. Rincian realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP Tahun 2010-2024 sebagai berikut:

Tabel 52 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2019-2024

Tahun	Target Penyaluran (Rp)	Realisasi Penyaluran (Rp)	Jumlah Debitur	Jumlah Pemanfaat (orang)	Jumlah Kab/kota
2019	640.000.000.000	182.530.860.000	403	3.948	155
2020	725.000.000.000	192.674.433.490	389	4.288	120
2021	600.000.000.000	270.553.725.000	1.074	7.089	244
2022	600.000.000.000	133.229.750.000	626	1.879	191
2023	660.000.000.000	328.512.900.000	243	4.982	117
2024	470.000.000.000	509.830.181.125	146	5.697	95

Apabila dibandingkan dengan realisasi penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang diakses melalui tautan <https://www.lpdb.go.id/> pada 12 Februari 2025, realisasi penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM Tahun 2024 sebesar Rp19,2 triliun kepada 3.838 mitra. LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai persyaratan dan kriteria KUMKM penerima dana bergulir ditetapkan oleh LPDB-KUMKM.



Gambar 22. Penyaluran Dana Bergulir LPDB KUMKM
(sumber <https://www.lpdb.go.id/>)



Gambar 23. LPMUKP Hadirkan Pembiayaan Kapal untuk Koperasi Biak Jaya Lestari Membangun Kesejahteraan Nelayan Biak



Gambar 24. Peresmian *soft launching* pabrik es balok milik Koperasi Mattoangin Samudera Niaga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang mendapatkan dana bergulir dari LPMUKP

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendampingan serta penilaian kelayakan usulan pinjaman.
2. Koordinasi dengan calon debitur.

3. Pelaksanaan kegiatan temu teknis untuk menumbuhkan pemahaman stakeholder kelautan dan perikanan terkait dana bergulir.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Meski penyaluran dana bergulir pada Tahun 2024 telah mencapai target, namun LPMUKP mengalami kekurangan dana kelolaan dikarenakan pada 31 Desember 2024 jumlah dana kelolaan LPMUKP hanya tersisa sebesar Rp59 miliar yang tentunya sangat tidak ideal untuk melakukan pembiayaan dengan jumlah dana tersebut. Maka dalam rangka pencapaian target penyaluran dana bergulir tahun selanjutnya, LPMUKP akan melaksanakan rencana aksi berikut:

1. Menyusun target penyaluran dana bergulir yang sesuai dengan kondisi LPMUKP dimana pastinya target tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan target Tahun 2024 jika pada Tahun 2025 LPMUKP tidak mendapatkan tambahan dana kelolaan yang memadai.
2. Memproses pemindahan saldo kas menjadi dana kelolaan yang dapat digulirkan sebagai tambahan modal LPMUKP dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir pada Tahun 2025.
3. Meneruskan strategi penyaluran yang mendukung kebijakan ekonomi biru berupa penangkapan ikan terukur, dan kampung budi daya.

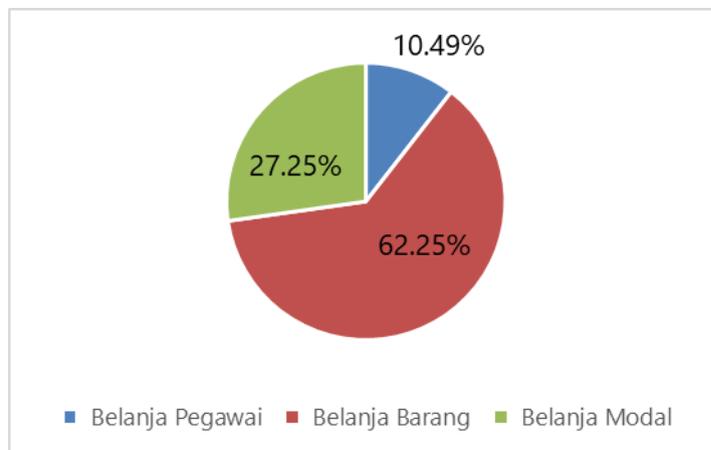
5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP, alokasi anggaran yang digunakan sebesar Rp1.004.530.000,00 dengan realisasi sebesar Rp528.320.811 atau mencapai 52,59% dengan kegiatan utama yaitu identifikasi dan pendampingan usulan pembiayaan dana bergulir, layanan operasional penyaluran dana bergulir LPMUKP, temu teknis akses permodalan LPMUKP mendukung program prioritas KKP, layanan kemitraan dan kerjasama LPMUKP dengan lembaga/instansi lain, rapat kerja teknis pendampingan LPMUKP, fasilitasi pembentukan kelembagaan konsorsium koperasi mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT), dukungan penyaluran modal melalui Program Penangkapan Terukur berbasis kuota. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain : sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak *video conference*.

3.2 Kinerja Anggaran

Anggaran KKP Tahun 2024 sebesar Rp7.248.311.610.000 dengan realisasi sebesar Rp6.299.993.473.781. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp770.310.315.000, sehingga persentase realisasi anggaran KKP Tahun 2024

mencapai 97,25%. Sedangkan anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 sebesar Rp902.569.227.000 dengan blokir sebesar Rp57.931.082.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp822.863.865.685.



Gambar 25. Porsi Anggaran Efektif Sekretariat Jenderal Per Jenis Belanja

Anggaran efektif Sekretariat Jenderal sebesar Rp844.638.145.000, sehingga realisasi anggaran mencapai 97,42% terhadap anggaran efektif. Apabila dilihat per jenis belanja, porsi anggaran efektif belanja barang mencapai 62,25%, belanja modal sebesar 27,25% dan belanja pegawai mencapai 10,49%.

Tabel 53. Pagu dan Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Belanja Pegawai	88.615.123.000		88.615.123.000	88.003.866.196	99,31%
Belanja Barang	577.216.135.000	51.391.263.000	525.824.872.000	505.487.028.941	96,13%
Belanja Modal	236.737.969.000	6.539.819.000	230.198.150.000	229.372.970.548	99,64%
Jumlah	902.569.227.000	57.931.082.000	844.638.145.000	822.863.865.685	97,42%

Sumber Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan, 28 Januari 2025

Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 sebesar Rp902.569.227.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp57.931.082.000 terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu :

1. Belanja Pegawai, anggaran efektif sebesar Rp88.615.123.000 dengan realisasi sebesar Rp88.003.866.196 atau mencapai 99,31%.
2. Belanja Barang, anggaran efektif sebesar Rp577.216.135.000 dengan blokir sebesar Rp51.391.263.000. sehingga anggaran efektif sebesar Rp525.824.872.000 dengan realisasi sebesar Rp505.487.028.941 atau mencapai 96,13%.
3. Belanja Modal, anggaran efektif sebesar Rp236.737.969.000 dengan blokir sebesar Rp6.539.819.000 sehingga anggaran efektif sebesar

Rp230.198.150.000 dengan realisasi sebesar Rp229.372.970.548 atau mencapai 99,64%.

Tabel 54. Anggaran dan Realisasi KKP Berdasarkan Unit Organisasi Eselon I Tahun 2024

No	Unit Organisasi Eselon I	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	% Realisasi thd Anggaran Efektif
1	SEKRETARIAT JENDERAL	902.569.227.000	844.638.145.000	822.863.865.685	57.931.082.000	97,42%
2	INSPEKTORAT JENDERAL	86.789.911.000	84.496.201.000	84.427.641.894	2.293.710.000	99,92%
3	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	984.561.316.000	894.445.253.000	860.624.733.236	90.116.063.000	96,22%
4	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1.227.143.203.000	1.004.118.709.000	992.008.206.671	223.024.494.000	98,79%
5	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.142.452.116.000	1.066.015.422.000	995.498.070.995	76.436.694.000	93,38%
6	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	386.899.151.000	327.602.550.000	324.896.904.773	59.296.601.000	99,17%
7	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	684.053.244.000	484.047.422.000	471.153.398.532	200.005.822.000	97,34%
8	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	1.489.964.596.000	1.439.858.703.000	1.423.646.688.907	50.105.893.000	98,87%
9	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN	343.878.846.000	332.778.890.000	324.873.963.088	11.099.956.000	97,62%
	JUMLAH	7.248.311.610.000	6.478.001.295.000	6.299.993.473.781	770.310.315.000	97,25%

Sumber Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan, 28 Januari 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi di tingkat Unit Organisasi Eselon I, persentase realisasi Sekretariat Jenderal menempati urutan ke-tujuh tertinggi, dengan persentase realisasi anggaran tertinggi yaitu Inspektorat Jenderal sebesar 99,92% dan paling rendah yaitu Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar 93,38%. Namun demikian apabila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran di tingkat KKP, realisasi anggaran Sekretariat Jenderal masih berada diatas rata-rata persentase realisasi anggaran KKP yaitu sebesar 97,25%.

Alokasi anggaran Sekretariat Jenderal terdiri dari 2 (dua) Satker Pusat yaitu Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dan BLU-LPMUKP, 1 (satu) satker Kantor Daerah yaitu Badan Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan 34 Provinsi satker Tugas Pembantuan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 37 satuan kerja lingkup Sekretariat Jenderal realisasi tertinggi berada pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jambi masing-masing 100% dan realisasi terendah yaitu Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar 78,04%.

Tabel 55. Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2024

No	Nama Satker	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran thd Anggaran Efektif
1	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	820.959.787.000	769.410.836.000	757.493.203.548	98,45%
2	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.570.346.000	26.388.215.000	25.821.165.425	97,85%
3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	41.739.094.000	41.739.094.000	32.574.720.284	78,04%
4	DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	150.000.000	86.569.000	83.538.500	96,50%
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	374.000.000	215.887.000	210.869.000	97,68%
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	402.000.000	232.049.000	229.813.950	99,04%
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	264.000.000	152.391.000	151.259.500	99,26%
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	392.000.000	226.277.000	221.935.715	98,08%
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	346.000.000	199.724.000	197.698.374	98,99%
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	346.000.000	199.724.000	180.077.916	90,16%
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	346.000.000	199.724.000	185.208.642	92,73%
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	378.000.000	218.196.000	216.367.335	99,16%
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	289.000.000	166.822.000	166.822.000	100,00%
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	338.000.000	195.106.000	194.328.919	99,60%
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	321.000.000	185.293.000	184.681.400	99,67%
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	341.000.000	196.838.000	196.814.489	99,99%

No	Nama Satker	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran thd Anggaran Efektif
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	328.000.000	189.334.000	185.510.435	97,98%
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	328.000.000	189.334.000	178.243.540	94,14%
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	314.000.000	181.253.000	164.861.321	90,96%
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	380.000.000	219.350.000	219.229.720	99,95%
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	328.000.000	189.334.000	189.313.143	99,99%
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	328.000.000	189.334.000	188.026.700	99,31%
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	360.000.000	207.805.000	207.688.800	99,94%
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	512.000.000	295.545.000	294.228.581	99,55%
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	296.000.000	170.862.000	155.952.100	91,27%
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	360.000.000	207.805.000	207.799.070	100,00%
27	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	424.000.000	244.748.000	242.939.000	99,26%
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	574.000.000	331.334.000	329.334.000	99,40%
29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	346.000.000	199.724.000	188.796.464	94,53%
30	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	574.000.000	331.334.000	330.185.842	99,65%
31	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	284.000.000	163.935.000	163.532.800	99,75%
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	396.000.000	228.586.000	228.508.240	99,97%

No	Nama Satker	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran thd Anggaran Efektif
33	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	321.000.000	185.293.000	185.273.500	99,99%
34	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	403.000.000	232.627.000	231.942.436	99,71%
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	515.000.000	297.277.000	294.277.000	98,99%
36	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	321.000.000	185.293.000	185.282.000	99,99%
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	321.000.000	185.293.000	184.435.996	99,54%
	JUMLAH	902.569.227.000	844.638.145.000	822.863.865.685	97,42%

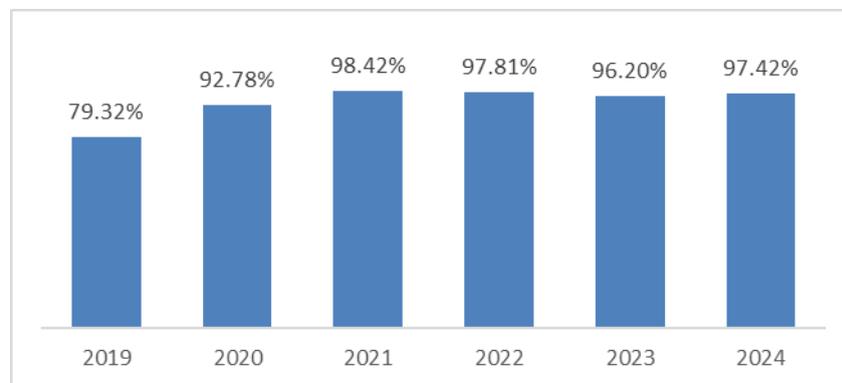
Sumber Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan, 28 Januari 2025

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, persentase realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,23 poin yaitu 96,20% di Tahun 2023 menjadi sebesar 97,42% di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja salah satunya terkait kinerja anggaran, dengan tetap mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*).

Tabel 56. Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi
2019	528.228.939.000	419.012.813.148	79,32%
2020	400.700.274.000	371.774.244.798	92,78%
2021	390.019.429.000	383.839.736.923	98,42%
2022	534.535.057.000	522.851.228.283	97,81%
2023	656.780.605.000	631.793.931.033	96,20%
2024	844.638.145.000	822.863.865.685	97,42%

Sumber Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan, 28 Januari 2025



Gambar 26. Grafik Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2024

Berdasarkan Grafik 28, persentase realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 konsisten di atas 90% dengan persentase realisasi tertinggi yaitu di Tahun 2021 sebesar 98,42% dan terendah di Tahun 2020 yaitu 92,78%.

Tabel 57. Pergerakan Pagu Anggaran Per Bulan Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Bulan	Perubahan Pagu Per Bulan (Rp)
1	Januari	659.661.999.000
2	Februari	659.661.999.000
3	Maret	659.661.999.000
4	April	659.661.999.000
5	Mei	659.661.999.000
6	Juni	753.290.469.000
7	Juli	753.290.469.000
8	Agustus	753.290.469.000
9	September	753.290.469.000
10	Oktober	903.150.701.000
11	November	902.569.227.000
12	Desember	902.569.227.000

Pergerakan Pagu Anggaran Per Bulan Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yaitu sebesar Rp659.661.999.000,00 sebagaimana Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) induk Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-032.01-0/2024 yang ditetapkan pada 30 November 2023. Selanjutnya diakhir Tahun 2024 anggaran Sekretariat Jenderal menjadi sebesar Rp902.569.227.000,00 dengan masuknya anggaran hibah JICA Jepang dengan rincian :

1. Hibah JICA Jepang Fase 2 sebesar Rp93.681.584.000,00
2. Hibah JICA Jepang Fase 2 sebesar Rp149.807.118.000,00

Selama tahun 2024 telah dilakukan langkah langkah strategis pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

1. Reviu terhadap RKAKL TA 2024, dan dalam hal diperlukan penyesuaian segera mengajukan usulan revisi.
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, dengan melakukan
 - a. Memastikan Halaman III DIPA menjadi instrumen untuk pemantauan.
 - b. Monitoring pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker.
 - c. Penyelarasan pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana/ pertanggungjawaban UP (Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) sesuai dengan Halaman III DIPA.

- d. Percepatan dan akselerasi pelaksanaan kegiatan meliputi: Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara.
- e. Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal.
- f. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- g. Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
- h. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
- i. Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran terutama untuk kegiatan yang bersifat rutin.
- j. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024.
- k. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*).
- l. Monitoring dan evaluasi termasuk monitoring kegiatan/belanja yang mempunyai risiko tinggi.

Dalam rangka peningkatan penyerapan realisasi anggaran kedepan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja anggaran, berapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

1. Penyusunan rencana kegiatan yang kemudian akan menjadi kalender kegiatan dan dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu.
2. Monitoring dan Pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disiplin. Target penyerapan anggaran ditetapkan dari tingkat kementerian/lembaga yang kemudian diturunkan menjadi target setiap unit organisasi eselon I. Unit eselon I menurunkannya menjadi target penyerapan anggaran unit eselon II atau satuan kerjanya. Rencana Penarikan Dana Bulanan atau RPD Bulanan, di satuan kerja dituangkan dalam dokumen Halaman III DIPA, yang merupakan bagian dari dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk mencapai target RPD Bulanan tersebut satker harus menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan karakteristik kegiatan.
3. Identifikasi kegiatan yang dapat dilaksanakan di awal tahun sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
4. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh unit organisasi di atasnya, untuk mengetahui sejauh mana satker dapat melaksanakan rencana kegiatan dan RPD.

5. Pengendalian intern yang memadai untuk mengawal proses pelaksanaan kegiatan dan mengantisipasi hal-hal yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.
6. Koordinasi dan sinergi yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dan sinergi akan mudah terlaksana dengan adanya komunikasi yang baik.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Reformasi birokrasi mengacu pada upaya pembaharuan dan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan beberapa karakteristik diantaranya yaitu adaptif, inovatif, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

Salah satu upaya KKP dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dalam bentuk pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan pola kerja baru, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, penerapan teknologi dan informasi yang andal, efisiensi anggaran, mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan berfokus pada sinergi lintas sektor, memperkuat infrastruktur digital untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif serta mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi antar-instansi.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi : data capaian nilai kinerja sasaran program, data alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran 2 sasaran program yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 adalah sebesar 10,16%. Efisiensi tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui koordinasi dan integrasi antar Unit Organisasi Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dan komitmen bersama seluruh jajaran untuk terus berbenah diri dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 58. Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS)	nggaran Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran(%)	% NPSS x Anggaran Per Sasaran	Efisiensi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3 x 4	8=7-5
1.	SP 1Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Jenderal	107,17%	802.899.051.000	790.289.145.401	98,43%	860.466.912.957	70.177.767.556
2.	SP2. PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	115,53%	41.739.094.000	32.574.720.284	78,04%	48.221.175.298	15.646.455.014
Jumlah			844.638.145.000	822.863.865.685	97,42%	908.688.088.255	85.824.222.570
						% Efisiensi Anggaran	10,16%

3.4 Evaluasi Internal atas Capaian Kinerja Tahun 2024

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab.3 Akuntabilitas Kinerja 11 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2024 seluruhnya telah tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut, telah disusun rencana aksi dan upaya perbaikan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025 sebagai bagian dari penyempurnaan kinerja organisasi yang telah diraih. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024, Sekretariat Jenderal telah menetapkan konsep target kinerja Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pemanfaatan informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai *feedback* bagi perencanaan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

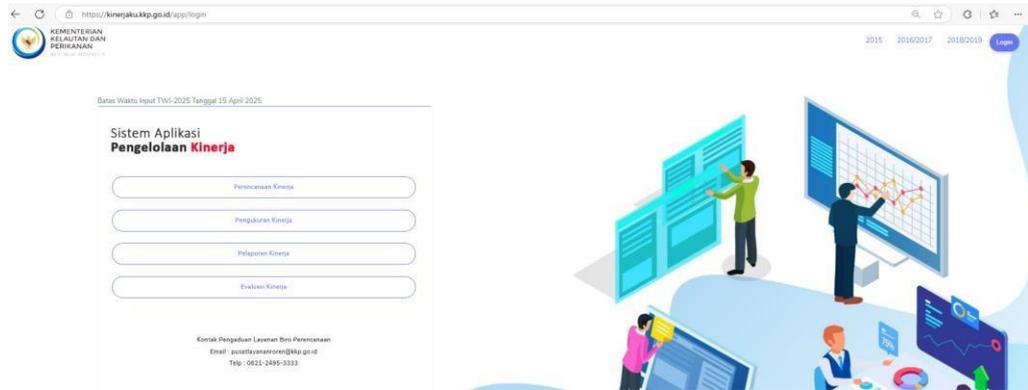
Tabel 59. Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran/Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
SP1	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi di Lingkungan KKP</i>			
IK 1	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (indeks)	85,40	90,05	
IK 2	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	88,84	88	
IK 3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	-	94	Indikator baru di tahun 2025
IK 4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP (nilai)	87,18	85	
IK 5	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	80,78	76	
IK 6	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan	0,09	≤0,5	

No.	Sasaran/Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
	Keuangan KKP (persen)			
IK 7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	100	85	
IK 8	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal (unit)	5	7	
SP2	PNBP BLU sektor KP meningkat			
IK 9	Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP (persen)	107,73	97	
IK 10	Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (persen)	108,47	90	

Evaluasi internal dan proses monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dilaksanakan secara periodik setiap triwulan sekali. Pelaksanaan monitoring-evaluasi kinerja secara berkala ini berjalan cukup efektif dengan pelaporan progres pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi terpantau dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang serta capaian indikator kinerja dilakukan verifikasi secara berjenjang berdasarkan bukti dukung yang memadai sehingga kehandalan data capaian kinerja terjaga.

Monitoring dan evaluasi kinerja secara triwulanan ini memungkinkan progress capaian kinerja untuk dapat dilihat dan diukur secara lebih komprehensif, termasuk untuk beberapa unit yang memiliki indikator kinerja yang bersifat kolaboratif dan *mandatory*. Untuk membantu proses monitoring dan evaluasi kinerja agar dapat berjalan efektif dan kolaboratif, salah satu instrument yang digunakan adalah dengan memanfaatkan aplikasi kinerjaku dimana seluruh dokumen tersimpan didalam aplikasi tersebut.



Gambar 27. Tampilan Aplikasi Kinerjaku

Selain itu untuk memacu dan menumbuhkan komitmen kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal, setiap triwulan Unit Kerja Organisasi Eselon II yang memiliki Nilai Kinerja Organisasi terbaik akan diberikan penghargaan dari Sekretaris Jenderal. Hal ini merupakan bentuk keterlibatan pimpinan dalam memantau kinerja organisasi unit kerja dibawah kewenangannya.



Gambar 28. Penghargaan atas Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tertinggi Unit Organisasi Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan kinerja organisasi di Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025 antara lain :

- a. Perlu dilakukan validasi atas penentuan target secara cermat untuk menghindari deviasi yang lebar antara target indikator kinerja dengan realisasi. Validasi perencanaan kinerja bertujuan untuk harmonisasi dokumen perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil kinerja sebelumnya.
- b. Indikator kinerja yang memiliki capaian lebih dari 100% di Tahun 2024 agar dapat didorong dilakukan peningkatan target indikator di Tahun 2025.
- c. Perumusan Indikator Kinerja mandatori perlu memperhatikan kesesuaian dengan manual indikator kinerja.
- d. Setiap Penanggung Jawab Indikator Kinerja *Mandatori* melakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Organisasi Eselon I dan menyampaikan Nota Dinas Acuan Indikator Kinerja Tahun 2025 (target, pola cascading, manual Indikator Kinerja, rincian target Indikator Kinerja) ke seluruh Unit Organisasi Eselon I.
- e. Untuk target yang bersifat tahunan, perlu dilakukan pemantauan terhadap faktor pengungkkit capaian sehingga daapt diantisipasi ketercapaian target.
- f. Dalam Menyusun rencana aksi perlu dicermati kembali, pemilihan kegiatan harus mempunya katerkaitan dan dampak terhadap ketercapaian indikator kinerja.

3.5 Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal c.q Inspektorat I selaku APIP (Aparat Pengawasan Intren Pemerintah) telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP di Sekretariat Jenderal Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan KKP. Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024 memperoleh nilai 87,98 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Interpretasi Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada

Tabel 60. Hasil Penilaian AKIP Pada Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Komponen Yanag Dinilai	Bobot	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,55	27,04
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,38	26,55
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,79	13,56
4.	Evaluasi Internal	25	21	20,81
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,71	87,98
	Predikat Penilaian		A	A

Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 berupa Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (diformalkan) serta dipublikasikan tepat waktu melalui website kkp.go.id. Indikator kinerja yang ditetapkan telah memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART dan dilakukan cascading level atas dengan level di bawahnya.

Upaya Sekretariat Jenderal yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu melakukan rekonsiliasi secara berkala (setiap tahun) atas perencanaan kinerja seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang setiap triwulan melalui system aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id). Pengukuran kinerja dilakukan sesuai Manual IKU serta dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Jenderal Tahun 2023. Beberapa upaya inovatif yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam melakukan pengukuran kinerja yang efektif, yaitu: menyelenggarakan *workshop* pengelolaan kinerja bagi Tim Pengelola Kinerja setiap tahun; 3) Pembuatan *dashboard* capaian realiasi penyaluran dana bergulir pada *lookerstudio.google.com* untuk monitoring capaian indikator kinerja penyaluran dana bergulir secara *real time* sampai dengan tingkat pemanfaat dan sebaran kabupaten/kota.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tepat waktu. Substansi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 telah sesuai standar, yaitu mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut: Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Upaya inovatif yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam pelaporan kinerja adalah melengkapi Laporan Kinerja Tahunan dengan *International Standard Book Number* (ISBN) sebagai pemberi identifikasi secara internasional yang diakui oleh Perpustakaan Nasional.

d. Evaluasi Internal

Sekretariat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui kegiatan Penilaian Mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri yang ditetapkan. Upaya inovatif Sekretariat Jenderal adalah menginisiasi pelaksanaan Penilaian Mandiri menggunakan aplikasi kinerja dan telah menjadi percontohan untuk K/L lain yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR BPN). Namun demikian, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan capaian atas seluruh indikator kinerja, yaitu sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja capaiannya tetap dan 1 (satu) indikator kinerja mengalami penurunan tingkat capaian pada hasil perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja tahun 2022.

Tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya, terhadap 4 (empat) saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Sekretariat Jenderal KKP sesuai LHP Itjen KKP Nomor T.134/ITJ.1/HP.440/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti berdasarkan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor : 18.08.06/ITJ.1/HP.510/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, direkomendasikan agar menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Biro Perencanaan untuk mengupayakan peningkatan capaian seluruh indikator kinerja Tahun 2024 dari capaian Tahun 2023. Tindak Lanjut atas rekomendasi tersebut tersebut telah ditindaklanjuti melalui Surat Sekretaris Jenderal Kepala Birp/Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Nomor B.1015/SJ/RC.510/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 hal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal yang menginstruksikan untuk mengupayakan peningkatan capaian seluruh Indikator Kinerja Tahun 2024 dari Capaian Tahun 2023. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, capaian tahun 2024 lebih tinggi dari capaian Tahun 2024.

3.6 Penghargaan dan Kinerja Lainnya

Tahun 2024, KKP dengan dukungan Sekretariat Jenderal sebagai *support system* yang memiliki fungsi koordinasi telah menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Prestasi dan capaian kinerja tersebut terdiri atas:

1. Nilai Sistem Merit

KKP telah dua kali mendapatkan anugerah metokrasi dengan predikat sangat baik. Pertama pada Tahun 2019 pertama kali anugerah diselenggarakan KKP mendapatkan nilai 361, Indeks 0,8 melalui Keputusan KASN Nomor 04 Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2021, KKP juga mendapatkan anugerah meritokrasi dengan sangat baik dengan nilai 390,5 dan Indeks 0,95 melalui Keputusan KASN Nomor 99 Tahun 2021 dan pada tahun 2023 KKP juga mendapatkan anugerah Katagori IV (Sangat Baik) dengan nilai 393 dan Indeks 0,96 melalui Keputusan KASN Nomor 162 Tahun 2023.

Peningkatan rerata nilai sistem merit menunjukkan komitmen KKP secara secara keberlanjutan menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Penilaian sistem merit ini dilakukan setiap dua tahun sekali. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didorong dengan adanya penyempurnaan dan perbaikan dari aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karis, promosi dan mutase pegawai, serta manajemen kinerja.



Gambar 29. Nilai Sistem Merit Tertinggi di Tingkat KL

2. KKP Hat-Trick Raih Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021, 2022 dan 2023

Opini WTP dapat KKP pertahankan sejak Tahun 2021 s.d Tahun 2023. KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit kerja untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Termasuk dalam pelaksanaan program-program ekonomi biru yang menjadi andalan KKP dalam mentransformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional.



Gambar 30. KKP kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang diserahkan pada 19 Juli 2024

3. Bhumandala Award

KKP memastikan penyelenggaraan informasi geospasial sektor kelautan dan perikanan selalu konsisten dan sesuai dengan standar baku. Keseriusan itu ditunjukkan KKP dengan keberhasilannya mendapatkan tiga penghargaan pada acara Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial pada 4 November 2024. KKP memastikan penyelenggaraan informasi geospasial sektor kelautan dan perikanan telah sesuai dengan standar baku. KKP mendapatkan 3 penghargaan sekaligus dalam 3 kategori Bhumandala Award 2024, yaitu medali emas atau Kanaka untuk kategori Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan, serta dua medali perunggu atau Ariti untuk Bhumandala Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik atau IGT, dan Bhumandala Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

KKP terus melakukan inovasi dan penyesuaian serta memperbarui data dan informasi geospasial di bidang kelautan dan perikanan, termasuk untuk penamaan beberapa pulau kecil, wilayah kelola masyarakat hukum adat, hingga kawasan konservasi perairan. Inovasi tersebut juga mendukung berlangsungnya kebijakan dan program prioritas.

Keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi antar Unit Organisasi Eselon I sehingga dapat mengimplementasikan perbaruan data dan informasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Untuk Bhumandala Penyelenggaraan Nama Rupabumi, KKP telah melakukan penamaan pulau-pulau kecil, wilayah kelola masyarakat hukum adat, hingga kawasan konservasi perairan yang evaluasinya dilakukan oleh BIG meliputi kelengkapan berkas, kesesuaian penamaan dengan kaidah kartografis dan kesesuaian pengisian pada aplikasi SINAR. Aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Indonesia.



Gambar 31. Bhumandala Award Tahun 2024

4. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 dari Kementerian Keuangan

Pada Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih peringkat Juara Kedua dalam Anugerah Reksa Bandha 2024 yang diselenggarakan oleh Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dengan Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan.



Gambar 32. Penyerahan Anugerah Reksa Bandha 2024

5. Peringkat ke-1 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Tahun 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan menempati Peringkat 1 dari total 67 Kementerian/Lembaga untuk Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024, dengan nilai Dimensi Input 99,91 (Sangat Baik) dan Dimensi Proses 94,36 (Sangat Baik). Pengukuran indeks PIKP ini dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengelolaan

informasi dan komunikasi publik, yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

No	Kementerian	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	99,63	100,00	100,00	99,91	Sangat Baik
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100	97,07	100,00	100,00	99,27	Sangat Baik
3	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100	94,69	100,00	100,00	98,67	Sangat Baik
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	87,50	87,18	100,00	100,00	93,67	Sangat Baik
5	Kementerian Pertanian	100	83,42	100,00	90,91	93,58	Sangat Baik
6	Kementerian Sekretariat Negara	100	88,37	94,44	90,91	93,43	Sangat Baik
7	Komisi Pemberantasan Korupsi	100,00	73,63	100,00	100,00	93,41	Sangat Baik
8	Lembaga Administrasi Negara	100,00	88,00	94,44	90,91	93,34	Sangat Baik
9	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	100,00	72,44	100,00	100,00	93,11	Sangat Baik
10	Badan Pengawas Obat dan Makanan	100,00	88,55	100,00	81,82	92,59	Sangat Baik
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100,00	90,38	94,44	81,82	91,66	Sangat Baik
12	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100,00	83,70	88,89	90,91	90,87	Sangat Baik

Gambar 33. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Tahun 2024

6. Indeks Kualitas Kebijakan KKP Tahun 2024 dengan Predikat Sangat Baik

Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Tujuan Indeks Kualitas Kebijakan adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Adapun Manfaat Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yaitu instrumen menilai kualitas kebijakan secara mudah dan cepat, mengungkapkan profil kualitas kebijakan publik nasional, media apresiasi dan advokasi kepada instansi Pemerintah sebagai pembelajaran baik dalam tata kelola kebijakan, peningkatan kualitas pembinaan analisis kebijakan, dan tersedianya sarana sharing pembelajaran (best practice) antar instansi Pemerintah.

Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dilaksanakan dalam dua tahun, berdasarkan informasi pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks kualitas kebijakan sebesar 83,34 dengan kategori sangat baik.

7. Penghargaan Terbaik II Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas 4 (empat) variabel, yaitu

- 1) Variabel I, Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25).
- 2) Variabel II, kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas dengan (bobot 25).
- 3) Variabel III, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu dengan (bobot 35).
- 4) Variabel IV, penataan database peraturan perundang-undangan (bobot 15)

Berdasarkan surat dinas a.n Menteri Hukum dan HAM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Nomor PPH-OT.03.03-74, tanggal 11 November 2024, hal Hasil Penilaian atas IRH Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks reformasi hukum sebesar 100 dengan kategori AA (Istimewa). KKP berhasil menerima penghargaan Terbaik II Kategori Tingkat Kementerian Hasil Penilaian Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.



Gambar 34. Penghargaan Terbaik II Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

8. Predikat A atas Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Nomor B/641/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Hasil capaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja KKP Tahun 2024 sebesar 84,01 dengan predikat A atau mengalami kenaikan 0,36 poin dibandingkan Tahun 2023 sebesar 83,64. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja KKP memuaskan yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Terdapat 4 (empat) komponen yang dinilai yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61. Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		Kenaikan
			2023	2024	
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,03	27,12	0,09
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,39	25,47	0,08
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,69	12,76	0,07
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,54	18,66	0,12
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,65	84,01	0,36
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A	

9. Peringkat Terbaik IV untuk Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KKP dengan kategori Eka Acalapati

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2023, JDIH KKP memperoleh nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dengan kategori Eka Acalapati sehingga menjadi Terbaik IV tingkat Kementerian dari 32 (tiga puluh dua) kementerian. Dengan hasil yang diperoleh tersebut, JDIH KKP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 98 (sembilan puluh delapan) dan berada pada peringkat ke-5 (lima).



Gambar 35. Peringkat Terbaik IV untuk Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KKP dengan kategori Eka Acalapati

10. **Penghargaan dari ANRI sebagai Peringkat IX Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"** Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh penghargaan dari ANRI sebagai Peringkat IX Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dengan kategori AA "Sangat Memuaskan".



Gambar 36. Peringkat Terbaik IX dengan Kategori AA Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023

11. **Penghargaan Penyelamatan Arsip Statis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)**

Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menerima penghargaan penyelamatan arsip statis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sedikitnya ada tiga Piagam Penghargaan dalam rangka Penyelamatan Arsip tersebut. Penghargaan pertama yaitu, Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No B-KN.00.02/4964/2023

tanggal 1 November 2023, perihal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diserahkan sebanyak 55 berkas arsip. Penghargaan ke dua yaitu Arsip Statis Hasil Penelitian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/4658/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis yang telah diserahkan sebanyak 769 berkas arsip. Ke tiga penghargaan atas penyerahan 13 berkas Arsip Statis Eks Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia B-KN.00.02/5579/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis.



Gambar 37. Selamatkan Arsip Kemaritiman, KKP Terima Tiga Penghargaan dari ANRI

Penyelamatan Arsip ini merupakan wujud KKP dalam menjaga kemaritiman dan sebagai pertanggungjawaban menjaga nilai kesejarahan. Kriteria arsip kemaritiman yang diselamatkan berdasarkan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelamatan Arsip Kemaritiman Untuk Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim itu memiliki sejumlah kriteria. Di antaranya yaitu, arsip yang tercipta dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, arsip yang tercipta dalam rangka pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, arsip yang tercipta dalam rangka tata kelola dan kelembagaan laut, arsip yang tercipta terkait ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, arsip yang tercipta dalam rangka pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; arsip yang

tercipta terkait budaya Bahari, arsip yang tercipta dalam rangka diplomasi maritim. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terlibat dalam kegiatan penyelamatan arsip kemaritiman sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

12. Indeks SPBE KKP dengan Predikat Sangat Baik

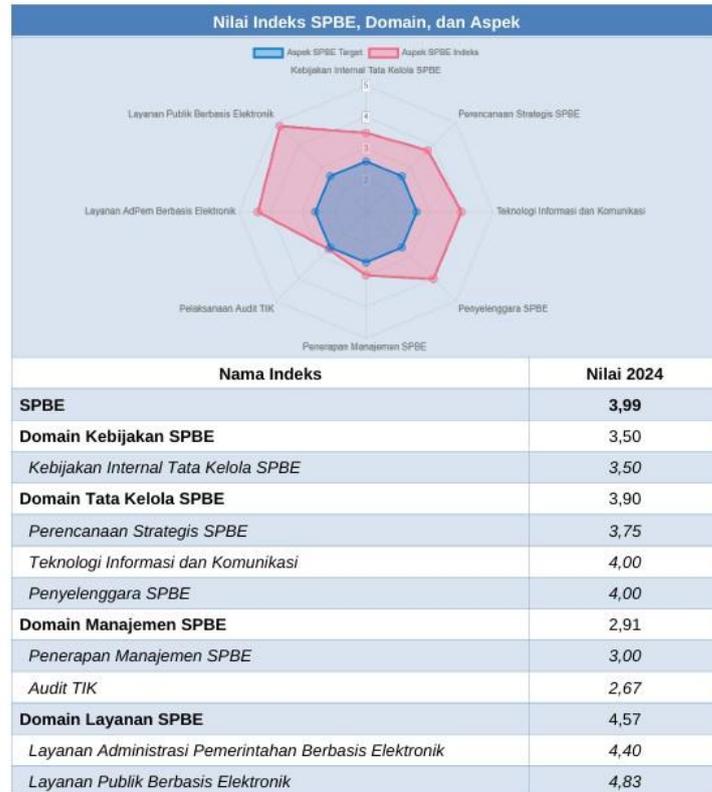
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Predikat SPBE terdiri dari 5 yaitu :

- a. Memuaskan : Nilai Indeks 4,2-5,0
- b. Sangat Baik : Nilai Indeks 3,5-4,0
- c. Baik : Nilai Indeks 3,2-3,5
- d. Cukup : 1,8-<2,6
- e. Kurang : <1,8

INDEKS SPBE – KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

3,99
(Sangat Baik)



Gambar 38. Hasil Penilaian Indeks SPBE KKP Tahun 2024 oleh Kmeenterian PAN dan RB

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, Indeks SPBE KKP Tahun 2024 sebesar 3,99 dengan predikat Sangat Baik mengalami peningkatan sebesar 11,45% dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 3,58. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh KKP adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Pelaksanaan Audit TIK, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Layanan Data Terbuka telah memiliki aplikasi yang mendukung Layanan Satu Data Berbasis Elektronik, yaitu aplikasi Satu Data KKP, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH, Layanan Publik Sektor 1 berupa Layanan Perizinan Usaha Perikanan dan Kapal Penangkapan/Pengangkutan Ikan Berbasis Elektronik juga telah berkolaborasi, Layanan Publik Sektor 2 berupa aplikasi Neraca Komoditas Perikanan yang memberikan layanan dalam hal menerima, memverifikasi, dan menetapkan rencana usulan kebutuhan impor

komoditas perikanan oleh pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, Layanan Publik Sektor 3 berupa aplikasi yang mendukung Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yaitu Aplikasi SKP-Online yang merupakan aplikasi untuk pembuatan sertifikasi Good Manufacturing Practice pada penerapan Aspek Layanan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

13. Klinik Pratama KKP mendapatkan Hasil Akreditasi dan dinyatakan lulus secara “Paripurna”



Gambar 39. Sertifikasi Akreditasi Klinik Pratama KKP

Klinik Pratama Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan akreditasi, dan mendapatkan hasil “Paripurna” dari Kementerian Kesehatan dengan masa berlaku yaitu 2 Agustus 2024 sd 2 Agustus 2029. Akreditasi paripurna adalah pengakuan tertinggi yang dapat diperoleh oleh Rumah Sakit/Klinik di Indonesia sebagai bukti bahwa telah memenuhi seluruh standar mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.

Akreditasi klinik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Melalui proses akreditasi, klinik-klinik diharapkan mampu mematuhi standar-standar tertentu yang menjamin kualitas layanan dan keselamatan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan lainnya, yang menegaskan bahwa setiap klinik di Indonesia wajib menjalani proses akreditasi.

14. **Tingkat Digitalisasi Arsip KKP**

Tingkat digitalisasi arsip merupakan salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi yang dipergunakan dalam mengukur tingkat pengelolaan arsip secara digital pada K/L/D. Dewasa ini, perkembangan ekosistem digital mendorong pengelolaan arsip berjalan secara lebih efektif dan efisien melalui peningkatan pengelolaan arsip secara digital. Adapun komponen yang menjadi pengukuran tingkat digitalisasi arsip adalah penerapan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang meliputi proses bisnis dan jumlah penggunaan serta sumber daya pendukung berupa infrastruktur dan helpdesk.

Nilai tingkat digitalisasi arsip didapatkan melalui hasil Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE) yang dikeluarkan oleh ANRI pada akhir tahun. Adapun indikator penilaian dalam APAE tersebut antara lain digitalisasi arsip, implementasi Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD), sumberdaya Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD), serta jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN).

Capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari Tahun 2023, dengan capaian di Tahun 2024 sebesar 88,69. Beberapa capaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain Pelaksanaan Alih Media Arsip Bekerja Sama dengan ANRI dengan hasil alih media arsip sebanyak 2100 lembar, Pengelolaan SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional)/JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional), Penggunaan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan melalui aplikasi Portal KKP.

15. **Indeks Tata Kelola Pengadaan (indeks)**

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit kerja terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan mencakup Pemanfaatan Sistem Pengadaan (30%), Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (30%), dan Tingkat Kematangan UKPBJ (40%).

Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (indeks) KKP Tahun 2024 sebesar 85,10, capaian ini lebih besar dari rata-rata capaian K/L/P/D sebesar 65,82. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian nilai ITKP KKP adalah sebagai berikut: pembahasan usulan penggunaan produk impor lingkup KKP, raker Pokja Pemantauan Tim Nasional P3DN, pelatihan & sertifikasi pengadaan barang/jasa Level I, Uji Kompetensi Pengangkatan Jabatan Fungsional (JF) Pengadaan Barang/Jasa melalui perpindahan dari jabatan lain,

FGD PBJ, Penjenjangan JF PPBJ Ahli Pertama, pemutakhiran data dukung kematangan UKPBJ (Penyiapan data dukung Pusat Keunggulan PBJ Proaktif), pelatihan dan sertifikasi PPK Tipe B dan monitoring realisasi capaian pengadaan barang/jasa satker lingkup KKP terkait pemanfaatan sistem pengadaan.



Gambar 40. Capaian ITKP Nasional Tahun 2024

16. Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Ketentuan (NSPK) Manajemen ASN dengan Kategori A Predikat Unggul

Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan indikator yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dapat menggunakan sistem aplikasi. Sistem aplikasi dikelola dan dikembangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengolahan hasil penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN.

Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertujuan sebagai instrumen untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, Sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen ASN sudah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN di lingkungan instansi masing-masing dan sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawiaan Negara Nomor 9436/B-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 19 November 2024 hal Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN sebesar 89,71 dengan Kategori A Predikat Unggul lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 85.

17. Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi

Penilaian dan Pengukuran Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN menggunakan formulasi penghitungan Nilai Akreditasi (Penilaian dan Pengukuran Kelayakan) Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawiaan Negara Nomor 26 Tahun 2019. Setelah dilakukan penghitungan maka ditetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Nilai Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi,. Nilai merupakan pengakuan kelayakan yang dilakukan melalui penetapan kategori kelayakan berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian, dengan kategori ditetapkan sebagai berikut:

1. Kategori A (nilai antara 88,1 sampai dengan 100)
2. Kategori B (nilai antara 62,0 sampai dengan 88)
3. Kategori C (nilai antara 41,9 sampai dengan 61,9)
4. Kategori D (nilai di bawah 41,9)

Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2023 bertugas sebagai unit penyelenggara penilaian kompetensi. Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi dipimpin oleh kepala. Kepala merupakan ex-officio JPT Pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala badan Kepegawiaan Negara Nomor 435 tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024, tentang Penetapan Kategori Pengakuan Kelayakan/Akreditasi Unit Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Biro SDM Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi KKP telah diakreditasi oleh instansi pembina BKN dengan predikat Baik (B) dengan nilai 84,86 atau mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 80,01.

Pelaksanaan penilaian kompetensi lingkup pegawai KKP telah optimal, dari aspek pelayanan terdapat kemudahan fasilitasi mengikuti penilaian kompetensi secara mandiri tanpa harus mengikuti penilaian kompetensi mansoskul di tempat lain. Pada aspek pemanfaatan

anggaran sudah mampu memberikan pengembalian investasi yang dikeluarkan dengan keberhasilan penilaian kompetensi terhadap 432 pegawai jalur pengangkatan jabatan fungsional, 1.895 pegawai jalur penilaian kompetensi tugas dan ijin belajar, 24 penilaian kompetensi mutasi alih tugas. Pemanfaatan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan penilaian kompetensi telah berdampak pada manajemen SDM antara lain peningkatan karir dan kinerja organisasi unit yang mengusulkan penilaian kompetensi, kesejahteraan pegawai, pencapaian kinerja organisasi Biro SDMAO, dan mendukung implementasi Human Capital Development Plan.



Gambar 41. Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi ASN dengan Predikat B

18. Indeks BerAKHLAK dengan Predikat A (Kategori Sehat)

Dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) di KKP sebagai pelayan masyarakat publik khususnya Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta untuk menuju Aparatur Sipil Negara kelas dunia Tahun 2024, dibutuhkan transformasi sumber daya manusia dimana salah satunya adalah menggunakan Nilai Utama (Core Values) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mencapai penerapan indeks berAKHLAK.

Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding menjadi pedoman dalam mengetahui, memahami, mengimplementasikan,

menginternalisasikan dan melaksanakan Perwujudan Perilaku ASN KKP. Dengan Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dapat membentuk budaya kerja, mengubah pola pikir pegawai dan menjadikan perilaku keseharian ASN KKP untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan Organisasi.

Berdasarkan hasil penilaian indeks BerAKHLAK, KKP Tahun 2024 memperoleh kategori Sehat dengan range indeks 78,9% dan rata-rata nasional sebesar 68,1%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan dua kategori penilaian yaitu Survei BerAKHLAK dan evaluasi organisasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil survei BerAKHLAK

Total responden survei BerAKHLAK di lingkungan KKP sebanyak 593 responden. Nilai per dimensi BerAKHLAK yang diperoleh berdasarkan hasil survei yang telah diisi oleh responden untuk dimensi Berorientasi pelayanan bernilai 72%, Akuntabel 79%, Kompeten 76%, Harmonis 77%, Loyal 87%, Adaptif 73%, Kolaboratif 75%. Nilai akhir survei yang diperoleh yaitu 76% dengan bobot survei BerAKHLAK 80% maka formulasi perhitungan penilaian mendapatkan nilai 60,8%.

2. Hasil Evaluasi Organisasi

Hasil evaluasi organisasi merupakan nilai yang didapatkan berdasarkan 16 komponen penilaian dengan skala penilaian validasi 0 sampai dengan 2 dan nilai maksimal seluruh komponen adalah 32. Berdasarkan hasil Evaluasi organisasi KKP mendapatkan nilai 29/32 dengan bobot penilaian 20% maka formulasi penilaian evaluasi organisasi mendapatkan nilai 18,1%.

Tabel 62. Perbandingan Nilai hasil Indeks BerAKHLAK dengan Kementerian/Lembaga Terkait

No.	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1.	Kemenko Marves	83,2 %	Sehat
2.	Kementerian Parekraf	79,9 %	Sehat
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	78,9 %	Sehat
4.	Kementerian PUPR	77,7 %	Sehat
5.	Kementerian Perhubungan	69,6%	Cukup Sehat
6.	Kementerian LHK	68,9%	Cukup Sehat
7.	Kementerian Investasi/BKPM	68,6%	Cukup Sehat

HASIL PENILAIAN INDEKS BerAKHLAK 2024

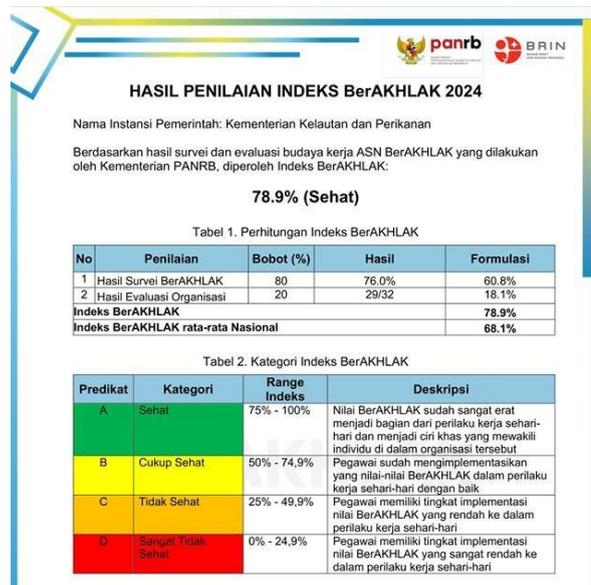
Nama Instansi Pemerintah: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK:

78.9% (Sehat)

Tabel 1. Perhitungan Indeks BerAKHLAK

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	76.0%	60.8%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	29/32	18.1%
Indeks BerAKHLAK				78.9%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68.1%



The screenshot shows the same information as the previous block, but includes an additional table (Tabel 2) that defines the index categories. The text and Tabel 1 are identical to the previous block.

Tabel 2. Kategori Indeks BerAKHLAK

Predikat	Kategori	Range Indeks	Deskripsi
A	Sehat	75% - 100%	Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut
B	Cukup Sehat	50% - 74.9%	Pegawai sudah mengimplementasikan yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik
C	Tidak Sehat	25% - 49.9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari
D	Sangat Tidak Sehat	0% - 24.9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari

Gambar 42. Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK KKP Tahun 2024

19. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor KKP dengan Predikat Baik

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data Indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka

penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektoral. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS). EPSS sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Penilaian Indeks Statistik Sektoral mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Nilai Statistik Sektoral KKP Tahun 2024 adalah 2,73 dengan predikat 'Baik". Kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah Pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dan Pendataan Produksi kelautan dan Perikanan. Predikat Penilaian Tingkat Kematangan Nilai Indeks Statistik Sektoral terdiri dari 5 kategori yaitu:

1. Memuaskan : nilai indeks 4,2 - 5,0
2. Sangat Baik : nilai indeks : 3,5 - < 4,2
3. Baik : nilai indeks : 2,6 - < 3,5
4. Cukup : nilai indeks 1,8 – < 2,6
5. Kurang : nilai indeks < 1,8

Tabel 63. Daftar Instansi Pusat Menurut Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024

No	Kementerian/Lembaga	IPS	EPSS
1.	Kemenko Marves	2,57	Cukup

No	Kementerian/Lembaga	IPS	EPSS
2.	Kementerian Parekraf	3,42	Baik
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2,73	Baik
4.	Kementerian PUPR	3,49	Baik
5.	Kementerian Perhubungan	2,98	Baik
6.	Kementerian LHK	2,68	Baik
7.	Kementerian Investasi/BKPM	2,28	Cukup

20. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP dengan Kategori A (Kualitas Tertinggi berdasarkan Penilaian Ombudsman RI)

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai Tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Maksud dari penilaian ini yaitu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Perubahan ini diharapkan menjadi lebih komprehensif lagi dalam menakar mutu pelayanan publik: dimensi input dan proses (*service manufacturing*) hingga output dan dampak (*impactful public service*).

Kemudian pada Tahun 2023 kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Kementerian dan Lembaga ditambahkan variabel Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan Minimal. Dimana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

Berdasarkan Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor R/3667/PC.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024, hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai 90,15 (Zona Hijau) dengan kategori A (Kualitas Tertinggi).

Tabel 64. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Tahun 2024

No.	Unit Pelayanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21,85%)	Proses (32,37%)	Output (24,24%)	Pengaduan (21,54%)	
1.	Direktorat Penataan Ruang Laut	18,13	27,70	23,27	21,01	90,10
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	18,18	29,44	23,27	21,01	91,90
3.	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	18,92	27,11	23,27	21,01	90,32
4.	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	18,20	27,70	23,27	21,01	90,17
5.	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen	17,62	27,18	22,46	21,01	88,27
Nilai Akhir dan Zona		90,15				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

BAB 4

PENUTUP



BAB 4

PENUTUP

Kesimpulan

Sekretariat Jenderal sebagai lokomotif dukungan manajemen terus berupaya maksimal sebagai *support system* dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan. Berbagai inovasi dan terobosan telah dilakukan demi lancarnya pencapaian target kinerja utama KKP. Sebagai perwujudan visi Sekretariat Jenderal tahun 2020- 2024 yaitu "Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 terdiri dari 2 Sasaran Program dan 11 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi seluruh Indikator Kinerja Tahun 2024 telah mencapai target atau bahkan melampaui. Hal ini tentu saja patut dipertahankan kedepannya dengan melakukan upaya perbaikan yang tiada henti. Seluruh apresiasi di atas, merupakan berkah dan penghargaan publik atas tekad Sekretariat Jenderal untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan dan merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2024

A. Pengarah

Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Sekretaris Jenderal

B. Penanggung Jawab

1. Andy Artha Donny Oktopura, Kepala Biro Perencanaan
2. Riza Trianzah, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Sofiyanto, Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
4. Ari Prabowo, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
5. Setyawati, Kepala Biro Keuangan
6. Effin Martiana, Kepala Biro Hukum
7. Aulia Riza Farhan, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
8. I Nengah Putra Winata, Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

C. Ketua Tim Penyusun

Ali Rahmat Iman Santoso, Ketua Tim Kerja Analisis Pengelolaan Kinerja, Biro Perencanaan

D. Kontributor

1. Ade Wiguna Nur Yasin, Ketua Tim Kerja Analisis Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor, Biro Perencanaan
2. Muhammad Ramli, Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan APBN, Biro Perencanaan
3. Benny Khaeruddin, Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Luar Negeri, Biro Perencanaan
4. Siddiq Pratomo, Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif
5. Agus Haryanto, Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, Biro Perencanaan
6. Munawar, Biro Perencanaan
7. Meirina Anggraeni, Biro Perencanaan
8. Ika Yusnita, Biro Perencanaan
9. Iksan Zuhry, Biro Perencanaan
10. Yusmansyah, Biro Perencanaan
11. Sigit Rachmad Admojarso, Biro Perencanaan
12. Achmat Marsito, Biro Perencanaan
13. Aldwin Valdemar Fuadi, Biro Perencanaan
14. Theresia Aldies Oktavianti, Biro Perencanaan
15. Dana Alya, Biro Perencanaan
16. Sundariyati, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
17. Mareta Nirmala, Pusat Data Statistik dan Informasi
18. Elimawati Birro, Biro Perencanaan
19. Satriani Situmorang, Biro Keuangan

20. Juniyanti Romauli Hutahean, Biro Perencanaan
21. Annastasyia Vera Yanti, Biro Perencanaan
22. Dading Surya Al Majid, Biro Keuangan
23. Harjo Santoso, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
24. Iqbal Bukhori, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
25. Trissa Restiyasputi Elsafira, Biro Hukum
26. Deny Sukmana, Biro Hukum
27. Anton Ojak Panjaitan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
28. Sri Rahayu, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
29. Denanda Febry Kurniavandi, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
30. Iko Prasetyo, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
31. Rahmawati, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
32. Berta Berlian Borneo, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

LAMPIRAN

The image features a blue-tinted city skyline in the background, with several skyscrapers and a bridge. A large, stylized wave graphic in shades of blue and yellow is overlaid on the scene, curving across the bottom. The word "LAMPIRAN" is written in a bold, yellow, sans-serif font in the upper center of the image.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (indeks)	80
		2	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	85
		3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	95
		4	Nilai Kinerja Anggaran KKP (nilai)	86
		5	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	76
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar lingkup KKP (persen)	94
		7	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (persen)	≤0,5
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	95
		9	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal (unit)	5
2	PNBP BLU Sektor KP Meningkat	10	Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP (persen)	97
		11	Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (persen)	90

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya		
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	22.003.481.000
2	Pengelolaan Organisasi dan SDM	15.390.932.000
3	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	50.887.007.000
4	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	454.754.605.000
5	Pengelolaan Data dan Informasi	74.886.880.000
6	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	41.739.094.000
Total Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024		659.661.999.000

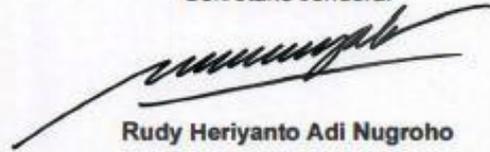
Jakarta, 18 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT JENDERAL**

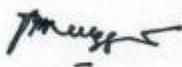
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	80
		2	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	85
		3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	95
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP (nilai)	82
		5	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	76
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar lingkup KKP (persen)	94
		7	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (persen)	≤0,5
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	95
		9	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal (unit)	5
2	PNBP BLU Sektor KP Meningkat	10	Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan BLU LPMUKP (persen)	97
		11	Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (persen)	90

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya		
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	22.003.481.000
2	Pengelolaan Organisasi dan SDM	15.390.932.000
3	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	130.827.269.000
4	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	465.711.206.000
5	Pengelolaan Data dan Informasi	77.618.487.000
6	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	41.739.094.000
Total Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2024		753.290.469.000

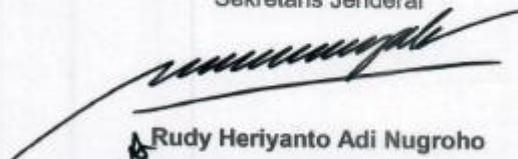
Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Lampiran 2. Target Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

Tabel 65. Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 (semula)

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal	1	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34
		2	Nilai SAKIP KKP (nilai)	A (82,5)	A (83)	A (83,5)	A (84)	A (85)
		3	Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75
		4	Nilai SPBE KKP (nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4
		5	Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		7	Level maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (level)	3	3	3	3	3
		8	Indeks kematangan unit kerja pengadaan barang/ jasa (UKPBJ) KKP (indeks)	7	9	9	9	9
		9	Nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (nilai)	83	83,5	84	84,5	85
		10	Indeks sistem merit KKP (indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85
		11	IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal (indeks)	72	73	74	75	76
		12	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	1	1	2	2	2
		13	Persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP (%)	100	100	100	100	100
		14	Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan	<15	<14	<13	<12	<11

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
			perikanan (%)					
		15	Unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1
		16	Unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		17	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	60	65	70	75	80
		18	Indeks pengelolaan aset KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		19	Indeks pengelolaan keuangan KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		20	Indeks perencanaan KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		21	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal (nilai)	88	89	89	90	90
		22	Nilai kinerja anggaran lingkup Sekretariat Jenderal (nilai)	85	86	87	88	89
2	PNBP BLU sektor KP meningkat	23	Persentase pencapaian target PNBP BLU LPMUKP (%)	95	95	96	96	97
		24	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (%)	95	96	97	98	100

Tabel 66. Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 (Menjadi)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Indikator Kinerja	Target 2024 (Menjadi)
		2020	2021	2022	2023	2024 (semula)		
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal	1 Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34	Indeks RB KKP (Indeks)	80,00
	2 Nilai SAKIP KKP (nilai)	A (82,5)	A (83)	A (83,5)	A (84)	A (85)	-	-
	3 Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75	-	-
	4 Nilai SPBE KKP (nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	-	-
	5 Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-
	6 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	Batas tertinggi persentase nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal (%)	≤ 0,5
	7 Level maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (level)	3	3	3	3	3	-	-
	8 Indeks kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) KKP (indeks)	7	9	9	9	9	-	-
	9 Nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (nilai)	83	83,5	84	84,5	85	-	-
	10 Indeks sistem merit KKP (indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85	-	-
	11 Indeks Profesional ASN lingkup Sekretariat Jenderal	72	73	74	75	76	Indeks Profesionalitas ASN lingkup KKP (Indeks)	85,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Indikator Kinerja	Target 2024 (Menjadi)
		2020	2021	2022	2023	2024 (semula)		
	(indeks)							
	12 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	1	1	2	2	2	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup Sekretariat Jenderal (Unit)	5
	13 Persentase penyelesaian regulasi lingkup KKP (%)	100	100	100	100	100	-	-
	14 Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (%)	<15	<14	<13	<12	<11	-	-
	15 Unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1	Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (nilai)	76,00
	16 Unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup KKP (%)	94,00
	17 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	60	65	70	75	80	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	95,00
	18 Indeks pengelolaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Indikator Kinerja	Target 2024 (Menjadi)
		2020	2021	2022	2023	2024 (semula)		
	aset KKP (indeks)							
	19 Indeks pengelolaan keuangan KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
	20 Indeks perencanaan KKP (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
	21 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal (nilai)	88	89	89	90	90	-	-
	22 Nilai kinerja anggaran lingkup Sekretariat Jenderal (nilai)	85	86	87	88	89	Nilai kinerja perencanaan anggaran KKP (Nilai)	82,00
							Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (Indeks)	95,00
PNBP BLU sektor KP meningkat	23 Persentase pencapaian target PNBP BLU LPMUKP (%)	95	95	96	96	97	Persentase pencapaian target PNBP BLU LPMUKP (%)	97,00
	24 Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (%)	95	96	97	98	100	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (%)	90,00



Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kementerian Kelautan dan Perikanan



kkp.go.id



kkpgoid



kkpgoid